

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakekatnya manusia diciptakan menjadi 2 yaitu perempuan dan laki-laki. Keduanya diciptakan berbeda agar dapat saling melengkapi guna membangun suatu kekuatan (sinergi) yang lebih kuat dan bermanfaat bagi kelangsungan umat manusia dimuka bumi ini. Dalam perkembangan selanjutnya telah terjadi dominasi oleh satu pihak dengan yang lain, sehingga menimbulkan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Secara statistik pada umumnya kaum perempuan mendapatkan posisi yang kurang menguntungkan dalam berbagai aspek kehidupan (Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, 2000:3).

Situasi ini merupakan hasil akumulasi dan akses dari nilai sosio kultural suatu masyarakat. Sejak masyarakat berburu sampai berkembang masyarakat bertani dan industri, perempuan dapat mengalami peningkatan peran dalam kehidupan publik dan selalu lebih banyak berperan dalam kehidupan rumah tangga (domestik). Sejalan dengan perkembangan jaman perempuan mulai menyadari ketertinggalannya dalam kehidupan publik. Kesadaran ini mendorong kaum perempuan untuk memperjuangkan haknya dalam mengaktualisasikan dirinya, berperan dalam pembangunan dan mendapat akses yang sama.

Perjuangan kaum perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan jender mulai gencar setelah ditetapkan Deklarasi Hak-hak Azasi Manusia PBB (1948). Gerakan perjuangan tersebut berlangsung di dunia internasional tidak

terkecuali di Indonesia. Perjuangan tersebut menjadi isu global yang menarik.

Perubahan tersebut sejalan dengan pergeseran paradigma pembangunan dari pendekatan keamanan dan kestabilan (*security*) menuju pendekatan kesejahteraan dan keadilan (*prosperity*) atau dari pendekatan produksi (*production centered development*) menjadi pendekatan kemanusiaan (*people centered development*) dalam suasana yang lebih demokratis dan terbuka.

Administrasi Negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara Negara (Anonymous, 2011). Menurut Sondang. P. Siagian administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam hal ini terkait dengan kerjasama yang diarahkan pada suatu bentuk pencapaian tujuan negara. Manusia yang diciptakan berpasang-pasangan memerlukan kehadiran dan kerjasama satu sama lain. Keterpaduan antara dua bagian, tidak sama dengan kemitraan dan keharmonisan adalah prinsip dasar dari sesuatu yang diciptakan berpasangan.

Masalah gender pada dasarnya adalah menganut prinsip kemitraan dan keharmonisan, meskipun dalam kenyataannya sering terjadi perlakuan diskriminasi, marjinalisasi, sub ordinasi, dan tindak kekerasan dari satu pihak ke pihak lain. Perlakuan yang demikian mengakibatkan seluruh kesalahan sering ditimpakan pada kaum laki-laki yang telah mendominasi dan memarjinalkan

kaum perempuan tanpa menjelaskan mengapa budaya tersebut terjadi. Untuk itu, informasi tentang perjuangan kaum perempuan dalam menuntut kesetaraan dengan laki-laki menjadi cukup relevan dipelajari (Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, 2000:5).

Hakekat pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya secara adil dan merata dengan Pancasila sebagai dasar tujuan dan pembangunan Nasional. Bagi perkembangan bangsa, peran perempuan perlu diperhatikan tidak hanya dari keberadaannya tetapi juga kualitas perannya. Dari statistik penduduk Indonesia terlihat bahwa jumlah kaum perempuan menempati prosentase yang lebih besar dari pada kaum laki-laki yaitu 50,3% (BPS:2007). Dengan demikian apabila didukung oleh kualitas tinggi maka perempuan Indonesia akan menjadi potensi produktif dan modal bagi pembangunan. Pada hakekatnya sasaran program pemberdayaan perempuan diarahkan untuk mengembangkan dan mematangkan berbagai potensi yang ada pada diri perempuan yang memungkinkan dirinya dapat memanfaatkan hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki terhadap sumber daya pembangunan. Kenyataan yang ada sekarang ini adalah kedudukan dan peran perempuan walaupun telah diupayakan selama 2 dasawarsa hasilnya belum memadai. Hal itu terlihat dari masih banyak permasalahan yang ada, yaitu masih banyak peraturan perundangan yang diskriminatif terhadap kaum perempuan terutama di tempat kerja dan skala penggajian. Sindikat penipuan dan perdagangan perempuan untuk dipekerjakan dengan penghasilan yang menjanjikan. Masih adanya budaya adat istiadat yang bias jender, dan lain

sebagainya (Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, 2000:20). Hal ini disebabkan selama ini pendekatan pembangunan belum secara merata mempertimbangkan manfaat pembangunan secara adil bagi perempuan dan laki-laki sehingga hal tersebut turut memberi kontribusi terhadap timbulnya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender.

Untuk memperkecil kesenjangan tersebut maka kebijakan dan program yang dikembangkan saat ini dan mendatang. Dengan mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki.

Dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pada seluruh kebijakan dan program pembangunan nasional disamping meningkatkan kualitas hidup perempuan itu sendiri. Untuk itu maka dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan *Gender* (PUG) dalam pembangunan nasional dan panduan pelaksanaannya dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan *gender* (KKG). Dengan PUG ini pemerintah dapat bekerja lebih efisien dan efektif dalam memproduksi kebijakan publik yang adil dan responsif gender kepada rakyatnya, perempuan dan laki-laki. Seiring dengan perjalanan pembangunan yang sarat dengan perubahan – perubahan mendasar, baik pada tingkat paradigmatis maupun implementatif. Pembangunan dengan paradigma baru yang sudah banyak didengungkan, sebagai upaya dan usaha sungguh-sungguh untuk melakukan pembangunan bersama rakyat dan bertumpu kepada pembangunan komunitas. Sudah saatnya rakyat ditempatkan sebagai subyek dan bukan obyek pembangunan (sekarang pemetik manfaat, pengguna

prasarana fisik). Anggapan bahwa masyarakat adalah bodoh dan harus selalu dituntun oleh birokrat, hendaknya mulai ditinggalkan. Masyarakat harus menjadi aktor dari pembangunan itu sendiri, yang berhak melakukan identifikasi permasalahan, identifikasi potensi, merencanakan pembangunan sekaligus mewujudkan. Peran pemerintah dimasa yang akan datang adalah menjadi fasilitator dan wasit, sedangkan pelaku pembangunan adalah masyarakat itu sendiri. Dengan sebuah gerakan reformasi yang mengarah pada sistem demokrasi berkelanjutan guna terciptanya mekanisme desentralistik dengan mempertimbangkan potensi-potensi daerah dalam manajerial sistem pemerintah daerah (Otonomi Daerah), Garis Besar Haluan Negara tahun 1999 mengamanatkan bahwa arah kebijakan bagi terwujudnya otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah dan pertumbuhan daerah dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia. Secara khusus tujuan dalam Propenas yang sangat menarik adalah *“Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat dan peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat untuk memperoleh hak-hak masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik.* Menjadikan peluang dan harapan besar bagi pengembangan potensi-potensi dasar perempuan dalam berbagai organisasi sosial kemasyarakatan yang mempunyai kekuatan basis massa pada tingkat bawah.

Lembaga atau organisasi apapun yang dipilih para perempuan dalam mengaplikasikan potensi-potensi dirinya, mempunyai makna sesuai dalam

peningkatan sumber daya manusia serta partisipasi dalam menciptakan iklim kehidupan yang lebih kondusif. Sehingga organisasi perempuan apapun bentuknya bukan sekedar wadah yang akan mengumpulkan atau memberdayakan potensi-potensi perempuan yang semakin ketinggalan, karena banyak hal yang dapat dilakukan oleh para aktivis perempuan secara kolektif apabila ingin maju dan ikut serta menyelesaikan ketimpangan-ketimpangan sosial yang bermuara pada ketidakadilan dan kesetaraan gender dalam kehidupan.

Dengan berdasar pada permasalahan itulah peneliti berniat melakukan penelitian pada suatu instansi pemerintah yaitu Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di wilayah Kabupaten Jombang, dimana hal itu berdasarkan letak geografis yang dekat dengan Malang. Jombang merupakan Kabupaten yang menjadi percontohan bagi Kabupaten lainnya dalam permasalahan perempuan atau lebih spesifik lagi pada kesetaraan gender dan mencakup perlindungan terhadap anak, serta misi Kabupaten Jombang untuk tahun 2014 menjadi Kabupaten Layak Anak. Dan Kabupaten Jombang terdiri dari wilayah yang dapat dikatakan berupa desa-desa. Sehingga dengan itu dapat dilihat bahwa tingkat perekonomian desa di Jombang sebagian besar terbelah menengah ke bawah. Hal tersebut dikarenakan minimnya pendapatan laki-laki atau suami (Rekapitulasi Data Tepilah Jender: 2009). Agar supaya suatu perekonomian keluarga dapat tercukupi, maka dengan ini peran perempuan sangat diharapkan sebagai penunjang. Di sektor industri kecil dan rumah tangga ditandai dengan kepemilikan perempuan pada industri yang rendah, peran perempuan di sektor informal cukup tinggi namun pekerjaan informal

biasanya tidak ada standarisasi gaji / dibayar murah. Sifatnya pasar tidak tetap, cenderung fluktuatif pendapatannya dan jarang tersentuh program pembangunan (Rekapitulasi Data Terpilah Jender: 2009). Guna mengatasi keadaan yang demikian perlu keterlibatan semua pihak untuk menangani adanya program pengembangan kualitas perempuan dalam pembangunan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, kesehatan, perbaikan gizi perempuan sesuai budaya yang mendukung perempuan dan peningkatan kualitas kelembagaan dan organisasi perempuan yang salah satunya adalah pemberdayaan kelompok wirausaha kecil perempuan dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan untuk kesejahteraan keluarga dan percepatan ekonomi pedesaan (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang, 2009:5).

Melalui program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan yang menjadi salah satu program dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang. Program tersebut didukung dengan kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha. Yang merupakan cikal bakal terwujudnya P3EL (Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal) dimana suatu proses pemberdayaan perempuan terutama dalam bidang ekonomi menjadi lebih terangkat dan perempuan ikut berkecimpung dalam pembangunan. Dengan harapan akan dapat menumbuhkembangkan kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh perempuan dan berbasis pada sumber daya ekonomi lokal yang tersedia. Serta dengan adanya kegiatan Pemberdayaan Perempuan Pemberian Keterampilan menjadikan suatu wadah atau fasilitas bagi semua

perempuan di Jombang untuk dapat lebih mengasah potensinya dan melahirkan wirausaha baru.

Dengan adanya Inpres No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan nasional, dimana hal ini untuk dapat melaksanakan pengarusutamaan jender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berprespektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing. Serta komitmen pemerintah provinsi Jatim untuk melaksanakan pengarusutamaan *gender* sebagaimana diamanatkan Inpres tersebut diatas telah diwujudkan melalui kebijakan pemerintah provinsi Jawa Timur dalam RPJMD (Rencana Program Jangka Menengah Daerah) 2009-2014 yang mengagendakan pembangunan peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta terjaminnya kesetaraan gender yang diarahkan pada upaya percepatan penanganan permasalahan rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak, lemahnya kelembagaan dan jaringan PUG, dimana persoalan tersebut dapat mempengaruhi tingkat partisipasi perempuan dalam proses pembangunan.

Sementara itu komitmen untuk mengimplementasikan pengarusutamaan *gender* (PUG) di wilayah Jombang berdasarkan Instruksi Bupati Jombang No.2 tahun 2011 tentang Pengarusutamaan *Gender* di Kabupaten Jombang, Peraturan Bupati Jombang No. 39 tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.45/94/415.10.10/2009 tentang pembentukan kelompok kerja

pengarusutamaan *gender* di Kabupaten Jombang., Peraturan Bupati Jombang no.

18 tahun 2010 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P4A).

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk meneliti masalah yang terkait dengan keadilan dan kesetaraan jender di bidang ekonomi, sehingga peneliti mengangkat judul **“Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dalam**

Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Jender di Bidang Ekonomi pada Masyarakat Jombang (Studi Peran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang)”. Dengan tujuan mengetahui

penanganan yang dilakukan institusi pemerintah Kabupaten Jombang melalui programnya untuk meningkatkan kualitas perempuan Indonesia umumnya dan perempuan Jombang khususnya agar mampu mandiri, memberantas kemiskinan dan kelaparan serta mengoptimalkan potensi dari perempuan yang selama ini masih dipandang rendah oleh kaum laki-laki.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan jender di bidang ekonomi pada masyarakat Jombang terkait dengan peran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang?

2. Apa sajakah yang menjadi faktor penghambat dan pendukung pada pelaksanaan pemberdayaan perempuan terkait dengan peran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan jender di bidang ekonomi?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisa pelaksanaan pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan jender di bidang ekonomi pada masyarakat Jombang terkait dengan peran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang.
2. Mendeskripsikan apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung pada pelaksanaan pemberdayaan perempuan terkait dengan peran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan jender di bidang ekonomi.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kontribusi penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Menjadi bahan referensi tambahan dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Administrasi

Publik, terutama yang berkenaan dengan bagaimana suatu implementasi dari teori pembangunan yang dijalankan dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

2. Secara Praktis

Masukan kepada pemerintah agar lebih memahami secara lebih mendalam mengenai kesetaraan dan keadilan gender terutama pada bidang ekonomi.

a. Salah satu wahana bagi peneliti dalam rangka menambah dan memperluas pengetahuannya, khususnya bidang pembangunan serta sebagai sumbangan informasi bagi peneliti lainnya sepanjang menyangkut objek yang sama, sekalipun dalam ruang lingkup yang berbeda.

b. Menjadi bahan referensi bagi pemerintah agar lebih responsif lagi dalam menangani permasalahan pembangunan khususnya terkait dengan gender dimana berfokus pada mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

c. Mengajak masyarakat luas untuk meningkatkan rasa kepedulian terhadap kesetaraan dan keadilan gender.

E. Sistematika Penulisan

Dalam upaya untuk memberikan kemudahan dalam memahami isi skripsi ini secara keseluruhan dan mempermudah pemahaman untuk mendapatkan suatu susunan pengertian yang logis dan sistematis, maka peneliti mengemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari lima sub bab. Pertama akan menjelaskan tentang latar belakang yang mengemukakan tentang permasalahan yang diangkat sehingga dapat dijadikan alasan pemilihan judul penelitian. Kedua, rumusan masalah yang merupakan kajian yang akan dibahas dalam penelitian. Ketiga, tujuan penelitian yang berisikan tentang hal-hal yang hendak dicapai atau ditemukan dalam penelitian. Keempat, adalah kontribusi penelitian baik secara akademis maupun secara praktis sebagai bentuk pernyataan tentang hasil penelitian yang akan dilakukan secara lebih spesifik. Kelima, adalah sistematika pembahasan yang merupakan uraian singkat dari bab-bab penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini. Bab ini memuat tinjauan pustaka yang berisi tentang konsep dalam teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diketengahkan sebagai acuan dalam membahas permasalahan yaitu tentang penguatan kesetaraan dan keadilan jender dalam pembangunan yang terkait dengan ekonomi masyarakat Jombang.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi langkah-langkah teknis dan praktis sehingga tujuan penelitian diperoleh. Pertama mengenai jenis penelitian yang merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kedua, fokus penelitian yang meliputi bentuk pelaksanaan pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan jender di bidang ekonomi pada masyarakat Jombang terkait dengan peran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang. Ketiga, lokasi dan situs penelitian dilaksanakan yaitu Kabupaten Jombang tepatnya di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang. Keempat, sumber data yang digunakan dalam penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Kelima teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian yang meliputi teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Keenam, instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan perangkat penunjang lainnya yang berupa buku catatan, alat tulis dan alat bantu. Ketujuh, analisis data yang menggunakan metode interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menyampaikan hasil penelitian yang terdiri dari tiga subbab, dimana subbab pertama akan menguraikan gambaran umum Kabupaten Jombang serta terkait dengan instansi yaitu Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang. Subbab kedua, akan menampilkan bentuk penyajian data terkait dengan pelaksanaan peran Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang dalam memberdayakan perempuan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan jender di bidang ekonomi masyarakat Jombang. Pada subbab ini dibagi menjadi dua pokok bahasan yaitu pertama pelaksanaan pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan jender bidang ekonomi. Pokok pemikiran pertama, terkait tentang pembahasan pemberdayaan perempuan dan makna jender, pokok pemikiran yang kedua terkait dengan peranan instansi tersebut mengandung arti mengenai program, kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang dalam mewujudkan KKG (Keadilan dan Kesetaraan Jender) bidang ekonomi pada masyarakat Jombang. Pokok pemikiran yang ketiga terkait kesesuaian TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi) pada instansi dengan implementasinya. Subbab kedua, akan menguraikan hal apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan jender di bidang ekonomi pada masyarakat Jombang, terkait dengan peranan yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari ketiga subbab pokok yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan ditarik dengan menemukan garis merah pokok permasalahan yang telah dibahas. Sehingga dari kesimpulan tersebut peneliti dapat memberikan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang pada pelaksanaan pemberdayaan perempuan dalam

mewujudkan kesetaraan dan keadilan jender secara umum dan di bidang ekonomi masyarakat Jombang pada khususnya. Dan rekomendasi bagi pemerintah agar dapat saling bekerjasama dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan jender yang dalam perspektif ekonomi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembangunan

1. Pengertian

Kata pembangunan sudah menjadi kata kunci dalam segala hal. Secara umum, kata ini diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Ada banyak sekali bidang pembangunan yang menjadi tujuan dari pembangunan itu sendiri baik di bidang ekonomi, infrastruktur, ataupun sumber daya manusia. Bagaimanapun juga, pembangunan juga harus diarahkan dan ditujukan pada pembangunan sumber daya manusia, dimana nantinya akan mendorong lahirnya manusia yang kreatif dan mandiri serta mempunyai inisiatif dan dapat memecahkan berbagai macam permasalahan (Arief Budiman, 1995:55).

Oleh karena itu, sebenarnya pembangunan adalah masalah yang sangat kompleks dan salah satu yang utama adalah faktor manusia sebagai penopang. Di dalam konsep teori “manusia modern” juga dijelaskan mengenai pembangunan yang menitikberatkan pada aspek sumber daya manusia dengan ciri-ciri meliputi:

- 1) Keterbukaan terhadap pengalaman dan ide-ide baru
- 2) Berorientasi pada masa sekarang dan masa yang akan datang
- 3) Memiliki kesanggupan untuk merencanakan

Dalam hal ini, *pembangunan* dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah

kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2000:32). Tema pertama adalah koordinasi, yang berimplikasi pada perlunya suatu kegiatan perencanaan seperti yang telah dibahas sebelumnya. Tema kedua adalah terciptanya alternatif yang lebih banyak secara sah. Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan hendaknya berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh aspek kehidupan. Ada pun mekanismenya menuntut kepada terciptanya kelembagaan dan hukum yang terpercaya yang mampu berperan secara efisien, transparan, dan adil. Tema ketiga mencapai aspirasi yang paling manusiawi, yang berarti pembangunan harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan etika umat.

Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2004:51).

Siagian (1994:90) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai "Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)". Sedangkan (Ginjar Kartasasmita, 1996:27) memberikan

pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.

Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Portes mendefenisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Menurut Deddy T. Tikson (2005:72-73) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan.

Transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar.

Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, fasilitas rekreasi, dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Sedangkan transformasi budaya sering dikaitkan antara lain, dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme, disamping adanya perubahan nilai dan norma yang dianut masyarakat, seperti perubahan dan spiritualisme ke

materialisme/sekularisme. Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro (*commuinity/group*).

Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (*progress*), pertumbuhan dan diversifikasi.

2. Evolusi dan Pergeseran Makna Pembangunan

Beberapa ahli menganjurkan bahwa pembangunan suatu daerah harus mencakup tiga inti nilai (Kuncoro, 2000:43):

- a. Ketahanan (*Sustenance*): kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok(pangan,papan, kesehatan, dan proteksi) untuk mempertahankan hidup.
- b. Harga diri (*Self Esteem*): pembangunan haruslah memanusiakan orang. Dalam arti luas pembangunan suatu daerah haruslah meningkatkan kebanggaan sebagai manusia yang berada di daerah itu.
- c. *Freedom from servitude*: kebebasan bagi setiap individu suatu negara untuk berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Peranan sumber daya manusia(SDM) dalam strategi semacam ini hanyalah sebagai “instrumen” atau salah satu “faktor produksi” saja. Manusia ditempatkan sebagai posisi instrumen dan bukan merupakan subyek dari pembangunan. Titik berat pada nilai produksi dan produktivitas telah mereduksi manusia sebagai penghambat maksimisasi kepuasan maupun maksimisasi keuntungan.

Konsekuensinya, peningkatan kualitas sumber daya manusia diarahkan dalam rangka peningkatan produksi. Inilah yang disebut sebagai pengembangan sumber daya manusia dalam kerangka *production centered development* (Tjokrowinoto, 1996:77). Bisa dipahami apabila topik pembicaraan dalam perspektif paradigma pembangunan yang semacam itu terbatas pada masalah pendidikan, peningkatan ketrampilan, kesehatan, *link and match*, dan sebagainya. Kualitas manusia yang meningkat merupakan prasyarat utama dalam proses produksi dan memenuhi tuntutan masyarakat industrial. Alternatif lain dalam strategi pembangunan manusia adalah apa yang disebut sebagai *people-centered development* atau *panting people first* (Korten, 1981 dalam Kuncoro, 2003:89). Artinya, manusia (rakyat) merupakan tujuan utama dari pembangunan, dan kehendak serta kapasitas manusia merupakan sumber daya yang paling penting dimensi pembangunan yang semacam ini jelas lebih luas daripada sekedar membentuk manusia profesional dan trampil sehingga bermanfaat dalam proses produksi. Penempatan manusia sebagai subyek pembangunan menekankan pada pentingnya pemberdayaan (*empowerment*) manusia, yaitu kemampuan manusia untuk mengaktualisasikan segala potensinya.

Sejarah mencatat munculnya paradigma baru dalam pembangunan seperti pertumbuhan dengan distribusi, kebutuhan pokok (*basic needs*) pembangunan mandiri (*self-reliant development*), pembangunan berkelanjutan dengan perhatian terhadap alam (*ecodevelopment*), pembangunan yang memperhatikan ketimpangan pendapatan menurut etnis (*ethnodevelopment*)

(Kuncoro, 2003:32). paradigma ini secara ringkas dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Para proponent strategi “pertumbuhan dengan distribusi”, atau “redistribusi dari pertumbuhan”, pada hakekatnya menganjurkan agar tidak hanya memusatkan perhatian pada pertumbuhan ekonomi (memperbesar “kue” pembangunan) namun juga mempertimbangkan bagaimana distribusi “kue” pembangunan tersebut. Ini bisa diwujudkan dengan kombinasi strategi seperti peningkatan kesempatan kerja, investasi modal manusia, perhatian pada petani kecil, sektor informal dan pengusaha ekonomi lemah.
2. Strategi pemenuhan kebutuhan pokok dengan demikian telah mencoba memasukkan semacam “jaminan” agar setiap kelompok sosial yang paling lemah mendapat manfaat dari setiap program pembangunan.
3. Pembangunan “mandiri” telah muncul sebagai konsep strategis dalam forum internasional sebelum konsep “Tata Ekonomi Dunia Baru” (NIEO) lahir dan menawarkan anjuran kerja sama yang menarik dibanding menarik diri dari percaturan global.
4. Pentingnya strategi *ecodevelopment*, yang intinya mengatakan bahwa masyarakat dan ekosistem di suatu daerah harus berkembang bersama-sama menuju produktivitas dan pemenuhan kebutuhan yang lebih tinggi; namun yang paling utama adalah,

strategi pembangunan ini harus berkelanjutan baik dari sisi ekologi maupun sosial.

3. Indikator Pengukuran Keberhasilan Pembangunan

Sejumlah indikator ekonomi yang dapat digunakan oleh lembaga-lembaga internasional antara lain pendapatan perkapita (GNP atau PDB), struktur perekonomian, urbanisasi, dan jumlah tabungan. Disamping itu terdapat pula dua indikator lainnya yang menunjukkan kemajuan pembangunan sosial ekonomi suatu bangsa atau daerah yaitu Indeks Kualitas Hidup (IKH atau PQLI) dan Indeks Pembangunan Manusia (HDI).

Berikut ini, akan disajikan ringkasan Deddy T. Tikson (2005: 108) terhadap kelima indikator tersebut :

a. Pendapatan perkapita

Pendapatan per kapita, baik dalam ukuran GNP (*Gross National Product*) maupun PDB (*Product Domestic Bruto*) merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang telah lama digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif makro ekonomi, indikator ini merupakan bagian kesejahteraan manusia yang dapat diukur, sehingga dapat menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Tampaknya pendapatan per kapita telah menjadi indikator makro ekonomi yang tidak bisa diabaikan, walaupun memiliki beberapa kelemahan. Sehingga pertumbuhan pendapatan nasional, selama ini,

telah dijadikan tujuan pembangunan di negara-negara dunia ketiga.

Seolah-olah ada asumsi bahwa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara otomatis ditunjukkan oleh adanya peningkatan pendapatan nasional (pertumbuhan ekonomi). Walaupun demikian, beberapa ahli menganggap penggunaan indikator ini mengabaikan pola distribusi pendapatan nasional. Indikator ini tidak mengukur distribusi pendapatan dan pemerataan kesejahteraan, termasuk pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi.

b. Struktur ekonomi

Telah menjadi asumsi bahwa peningkatan pendapatan per kapita akan mencerminkan transformasi struktural dalam bidang ekonomi dan kelas-kelas sosial. Dengan adanya perkembangan ekonomi dan peningkatan per kapita, kontribusi sektor manufaktur/industri dan jasa terhadap pendapatan nasional akan meningkat terus. Perkembangan sektor industri dan perbaikan tingkat upah akan meningkatkan permintaan atas barang-barang industri, yang akan diikuti oleh perkembangan investasi dan perluasan tenaga kerja. Di lain pihak, kontribusi sektor pertanian terhadap pendapatan nasional akan semakin menurun.

c. Urbanisasi

Urbanisasi dapat diartikan sebagai meningkatnya proporsi penduduk yang bermukim di wilayah perkotaan dibandingkan dengan di

pedesaan. Urbanisasi dikatakan tidak terjadi apabila pertumbuhan penduduk di wilayah urban sama dengan nol. Sesuai dengan pengalaman industrialisasi di negara-negara eropa Barat dan Amerika Utara, proporsi penduduk di wilayah urban berbanding lurus dengan proporsi industrialisasi. Ini berarti bahwa kecepatan urbanisasi akan semakin tinggi sesuai dengan cepatnya proses industrialisasi. Di Negara-negara industri, sebagian besar penduduk tinggal di wilayah perkotaan, sedangkan di Negara-negara yang sedang berkembang proporsi terbesar tinggal di wilayah pedesaan. Berdasarkan fenomena ini, urbanisasi digunakan sebagai salah satu indikator pembangunan.

d. Angka Tabungan

Perkembangan sektor manufaktur/industri selama tahap industrialisasi memerlukan investasi dan modal. Finansial kapital merupakan faktor utama dalam proses industrialisasi dalam sebuah masyarakat, sebagaimana terjadi di Inggris pada umumnya Eropa pada awal pertumbuhan kapitalisme yang disusul oleh revolusi industri. Dalam masyarakat yang memiliki produktivitas tinggi, modal usaha ini dapat dihimpun melalui tabungan, baik swasta maupun pemerintah.

e. Indeks Kualitas Hidup

IKH atau *Physical Quality of life Index* (PQLI) digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Indeks ini dibuat indikator makroekonomi tidak dapat memberikan gambaran tentang

kesejahteraan masyarakat dalam mengukur keberhasilan ekonomi.

Misalnya, pendapatan nasional sebuah bangsa dapat tumbuh terus, tetapi tanpa diikuti oleh peningkatan kesejahteraan sosial. Indeks ini dihitung berdasarkan kepada :

- 1) Angka rata-rata harapan hidup pada umur satu tahun.
- 2) Angka kematian bayi.
- 3) Angka melek huruf.

Dalam indeks ini, angka rata-rata harapan hidup dan kematian bayi akan dapat menggambarkan status gizi anak dan ibu, derajat kesehatan, dan lingkungan keluarga yang langsung berasosiasi dengan kesejahteraan keluarga. Pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf, dapat menggambarkan jumlah orang yang memperoleh akses pendidikan sebagai hasil pembangunan. Variabel ini menggambarkan kesejahteraan masyarakat, karena tingginya status ekonomi keluarga akan mempengaruhi status pendidikan para anggotanya. Oleh para pembuatnya, indeks ini dianggap sebagai yang paling baik untuk mengukur kualitas manusia sebagai hasil dari pembangunan, disamping pendapatan per kapita sebagai ukuran kuantitas manusia.

f. Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*)

The United Nations Development Program (UNDP) telah membuat indikator pembangunan yang lain, sebagai tambahan untuk beberapa indikator yang telah ada. Ide dasar yang melandasi dibuatnya indeks ini

adalah pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya manusia.

Menurut UNDP, pembangunan hendaknya ditujukan kepada pengembangan sumberdaya manusia. Dalam pemahaman ini, pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan mengembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia.

Hal ini didasari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumberdaya manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang menentukan jalan hidup manusia secara bebas.

Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai faktor penting dalam kehidupan manusia, tetapi tidak secara otomatis akan mempengaruhi peningkatan martabat dan harkat manusia. Dalam hubungan ini, ada tiga komponen yang dianggap paling menentukan dalam pembangunan, umur panjang dan sehat, perolehan dan pengembangan pengetahuan, dan peningkatan terhadap akses untuk kehidupan yang lebih baik.

Indeks ini dibuat dengan mengkombinasikan tiga komponen :

- 1) Rata-rata harapan hidup pada saat lahir
- 2) Rata-rata pencapaian pendidikan tingkat SD, SMP, dan SMU
- 3) Pendapatan per-kapita yang dihitung berdasarkan *Purchasing Power Parity*.

Pengembangan manusia berkaitan erat dengan peningkatan kapabilitas manusia yang dapat dirangkum dalam peningkatan *knowledge*, *attitude* dan *skills*, disamping derajat kesehatan seluruh anggota keluarga dan lingkungannya.

B. Pemberdayaan

1. Konsep Pemberdayaan

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial, individu maupun institusi melakukan intervensi baik secara sosial, ekonomi, maupun budaya. Salah satu intervensi yang dilakukan dan telah menjadi salah satu icon dalam upaya mengurangi kemiskinan masyarakat serta mengatasi berbagai permasalahan sosial yang terjadi adalah pemberdayaan. Istilah pemberdayaan memiliki arti yang berbeda dalam konteks politik dan sosiokultural yang berbeda pula. Istilah ini meliputi kekuatan dari dalam diri, kontrol, kekuasaan, kepercayaan diri, pilihan, martabat hidup terkait dengan nilai, kemampuan memperjuangkan hak, kemandirian, pengambilan keputusan secara mandiri, bebas, terbangun dan kapabilitas (Narayan, 2002:10). Pengertian ini melekat pada nilai lokal dan sistem kepercayaan. Pemberdayaan sebagai sebuah intervensi merupakan suatu upaya untuk memperkuat aset masyarakat berdasarkan lembaga dan mengubah peraturan institusional yang mengatur perilaku dan interaksi antarmanusia. Meningkatkan akses seperti informasi atau kredit dapat mengembangkan keberdayaan suatu masyarakat. Perubahan institusional dapat memberdayakan masyarakat dengan menciptakan seperangkat hak dan kewajiban yang baru, merubah sanksi dan insentif dan mengurangi biaya ekonomi dan sosial dalam mengekspresikan pilihan yaitu dapat menciptakan kesetaraan dan meraih kesempatan bagi mereka yang kurang beruntung (World Bank, 2005 dalam Alsop dkk, 2006:12).

Dalam arti luas, pemberdayaan merupakan perluasan dari kebebasan untuk memilih dan bertindak. Ini dapat diartikan meningkatkan otoritas dan kontrol

seseorang yang memiliki sumber daya yang terbatas. Keterbatasan ini dapat terjadi akibat kurangnya aset yang dimiliki ataupun ketidakmampuan untuk bernegosiasi guna meningkatkan kemampuan mereka dengan institusi formal ataupun informal. Dalam hal ini, ketidakberdayaan melekat pada hubungan institusional. Berdasarkan hal tersebut maka Narayan (2002) mendefinisikan pemberdayaan sebagai berikut. *“Empowerment is the expansion of assets and capabilities of poor people to participate in negotiate with, influence, control, and hold accountable institutions that affect their lives”*. (pemberdayaan adalah perluasaan aset dan kemampuan kaum miskin untuk berpartisipasi dalam bernegosiasi dengan mempengaruhi, memiliki kontrol, dan memiliki institusi yang akuntabel yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka). Secara konseptual pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Oleh karena itu ide utama pemberdayaan ini selalu bersentuhan dengan konsep kekuasaan. Menurut (Ife, 1995:61-64), pengertian kekuasaan tidak berhenti pada kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan seseorang atas beberapa hal berikut :

- 1) Pilihan personal dan kesempatan hidup : kemampuan dalam membuat keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.
- 2) Pendefinisian kebutuhan : kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
- 3) Ide atau gagasan : kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.

- 4) Lembaga-lembaga : kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata masyarakat seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan.
- 5) Sumber-sumber : kemampuan memobilisasi sumber formal, informal dan kemasyarakatan.
- 6) Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa.
- 7) Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

Pendapat Ife ini sejalan (Kabeer, 2001:19) yang menyatakan bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk membuat pilihan. Lebih lanjut menurut Kabeer, pilihan disini dapat diartikan sebagai kemampuan perempuan untuk memilih hal lain. Adapun pengertian pemberdayaan disini adalah sebagai berikut :

“Empowerment thus refers to the expansion in people’s ability to make strategic life in a context where this ability was previously denied to them”.

Dalam kegiatan pemberdayaan prinsip *“Self Determination”* (Bistek dalam Adi 2002: 162) merupakan suatu prinsip dasar dalam bidang pekerjaan sosial maupun kesejahteraan sosial. Gagasan ini dapat diartikan sebagai dorongan yang diberikan kepada komunitas sasaran untuk menentukan sendiri apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Secara lebih lanjut gagasan ini bertujuan agar komunitas sasaran memiliki kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk masa depannya (Adi, 2002:163).

a. Aspek Pemberdayaan

Dalam pelaksanaannya, (Narayan, 2002:18) mengungkapkan bahwa untuk meningkatkan keberdayaan suatu komunitas didukung oleh beberapa elemen berikut :

1) Akses terhadap informasi

Informasi merupakan salah satu sarana bagi masyarakat untuk memperoleh akses terhadap kekuasaan dan kesempatan. Kekuasaan disini tidak didefinisikan secara harfiah begitu saja, melainkan pengertian kekuasaan ini merupakan kemampuan masyarakat terutama masyarakat miskin untuk memperoleh akses dan kesempatan dan memperjuangkan hak-hak dasarnya. Informasi memberikan khasanah dan wawasan baru bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Informasi ini tidak hanya berupa kata-kata yang tertulis namun dapat pula diperoleh melalui diskusi kelompok, radio, televisi dan internet.

2) Inklusi dan partisipasi

Inklusi memfokuskan pada siapa yang terlibat. (Bennet 2002 dalam Malhotra, 2002:5) mengungkapkan bahwa pengertian inklusi sosial sebagai berikut *“The removal of institutional barriers and the enhancement of incentives to increase of diverse individuals groups to assets and development opportunities”*. (Pengurangan hambatan institusional dan peningkatan insentif untuk meningkatkan akses bagi

individu dan kelompok yang beragam untuk memiliki kesempatan dan pengembangan). Lebih lanjut Bannet menekankan bahwa pengertian pemberdayaan dan inklusi sosial adalah sebab proses dari pada suatu hasil akhir. Inklusi sosial pada komunitas miskin merupakan aspek penting dalam proses pembuatan kebijakan publik. Hal ini bertujuan agar setiap proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan memperhatikan aspek kebutuhan masyarakat, serta memiliki komitmen untuk membuat suatu perubahan yang merupakan hakekat dari pemberdayaan. Dalam hal ini partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan memiliki peran vital untuk menentukan berjalan atau tidaknya suatu pemberdayaan. Partisipasi masyarakat dalam berbagai tahap pemberdayaan akan mendukung mereka menjadi lebih berdaya dan memiliki ketahanan dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi. Conyers (1991:86-187) mengungkapkan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat diantaranya adalah masyarakat akan merasa lebih dihargai apabila keterlibatan mereka berpengaruh terhadap suatu kebijakan tertentu dan berpengaruh langsung terhadap apa yang mereka rasakan.

3) Akuntabilitas

Akuntabilitas merujuk pada kemampuan pemerintah, perusahaan swasta atau penyedia pelayanan untuk dapat mempertanggungjawabkan kebijakan, yang penggunaan dana

mendukung pelaksanaan tindakan tersebut. Terdapat tiga tipe mekanisme akuntabilitas yaitu mekanisme politik, administratif dan publik. Akuntabilitas politik terjadi melalui partai politik dan wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Akuntabilitas administratif dapat terjadi melalui mekanisme akuntabilitas internal lembaga pemerintah. Sementara mekanisme akuntabilitas publik merupakan suatu upaya pemerintah untuk dapat akuntabel bagi warganya.

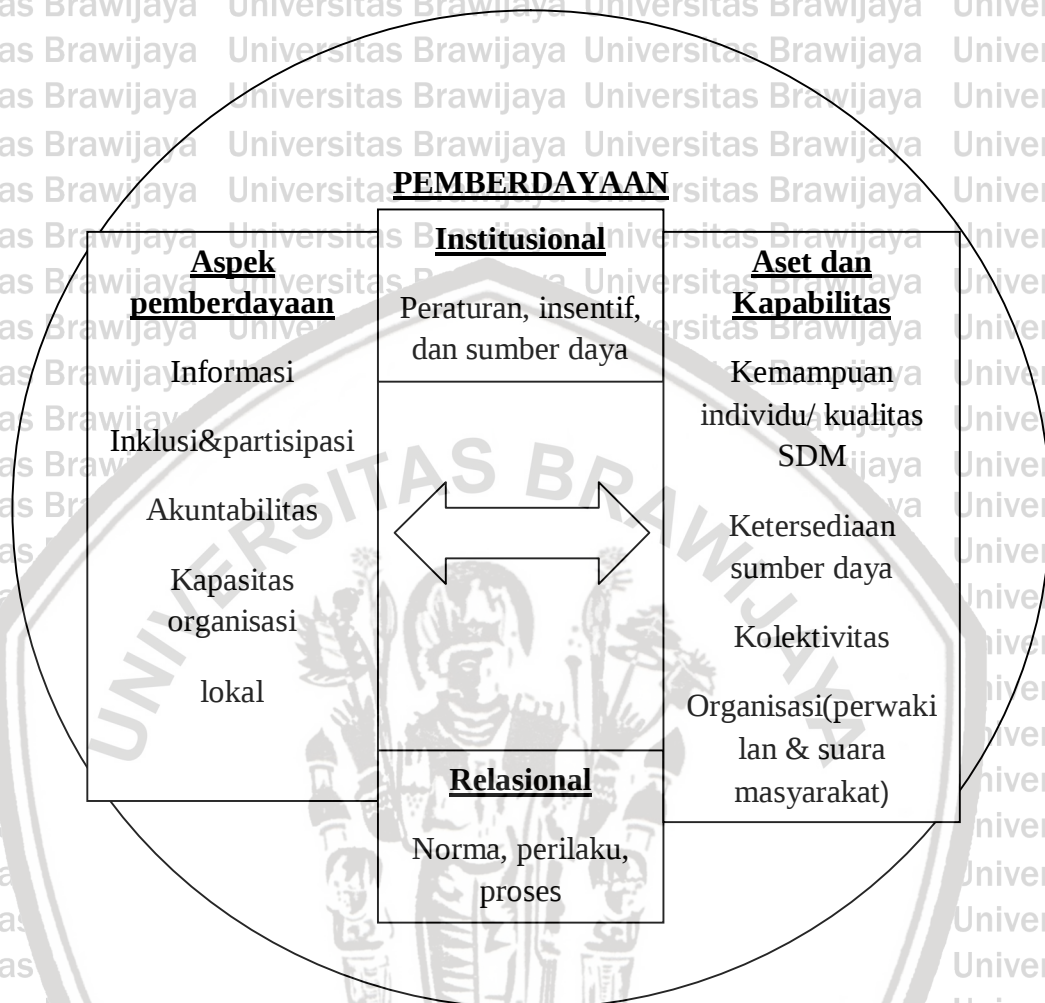
4) Kapasitas organisasi lokal

Merujuk pada kemampuan masyarakat untuk bekerja sama, mengorganisasikan diri mereka dan memobilisasi sumber daya untuk memecahkan masalah. Seringkali di luar jangkauan sistem formal, perempuan miskin saling mendukung satu sama lain dan memiliki kekuatan untuk memecahkan masalah sehari-hari. Organisasi masyarakat miskin umumnya bersifat informal. Contohnya kelompok wanita yang saling meminjam uang atau beras satu sama lain. Mereka juga dapat berbentuk formal dengan atau tanpa registrasi yang sah, contohnya kelompok tani atau kelompok lingkungan ketetanggaan.

Keanggotaan masyarakat miskin berdasarkan organisasi dapat lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan mendasarnya, namun mereka terhambat oleh sumber daya dan pengetahuan teknis yang terbatas.

Kapasitas organisasi lokal merupakan kunci dari efektifnya sebuah pemberdayaan.

Gambar 1 : Kerangka Pemberdayaan



Sumber : Telah diolah kembali dari Narayan (2002)

Berdasarkan diagram diatas, aspek pemberdayaan serta aset dan kapabilitas saling berkaitan dalam upaya mewujudkan tujuan pemberdayaan yang diinginkan. Dapat terlihat bahwa suatu pemberdayaan akan dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh kualitas sumber daya manusia, ketersediaan sumber daya, kolektivitas dan organisasi (perwakilan masyarakat). Aset dan kapabilitas ini saling bersinergi dengan aspek pemberdayaan (informasi, inklusi dan

partisipasi, akuntabilitas dan kapasitas organisasi lokal). Lebih lanjut Narayan mengungkapkan bahwa kaum miskin tidak akan berpartisipasi dalam sebuah kegiatan apabila partisipasi mereka tidak dihargai dan tidak menimbulkan perubahan yang signifikan bagi kesejahteraan mereka dan berguna dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun terdapat organisasi lokal yang kuat, hal ini tetaplah menyebabkan kaum miskin tidak memiliki akses terhadap pemerintah lokal, sektor ekonomi swasta, dan kurangnya akses terhadap informasi.

b. Tahap-tahap Pemberdayaan

Pada hakekatnya, pemberdayaan merupakan suatu kegiatan yang lebih menekankan proses tanpa bermaksud menafikan hasil dari pemberdayaan itu sendiri. Dalam kaitannya dengan proses maka partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pemberdayaan mutlak diperlukan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Adi (2003:70-75) bahwa pemberdayaan menekankan pada *process goal*, yaitu tujuan yang berorientasi pada proses yang mengupayakan integrasi masyarakat dan dikembangkan kapasitasnya guna memecahkan masalah mereka secara kooperatif atas dasar kemampuan dan kemauan menolong diri sendiri sesuai prinsip demokratis. Dengan menekankan pada proses, maka pemberdayaan pun memiliki tahap-tahap sebagai berikut (Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 2007:1) :

a) Penyadaran

Pada tahap ini dilakukan sosialisasi terhadap komunitas agar mereka mengerti bahwa kegiatan pemberdayaan ini penting bagi peningkatan kualitas hidup mereka dan dilakukan secara mandiri.

b) Pengkapasitasan

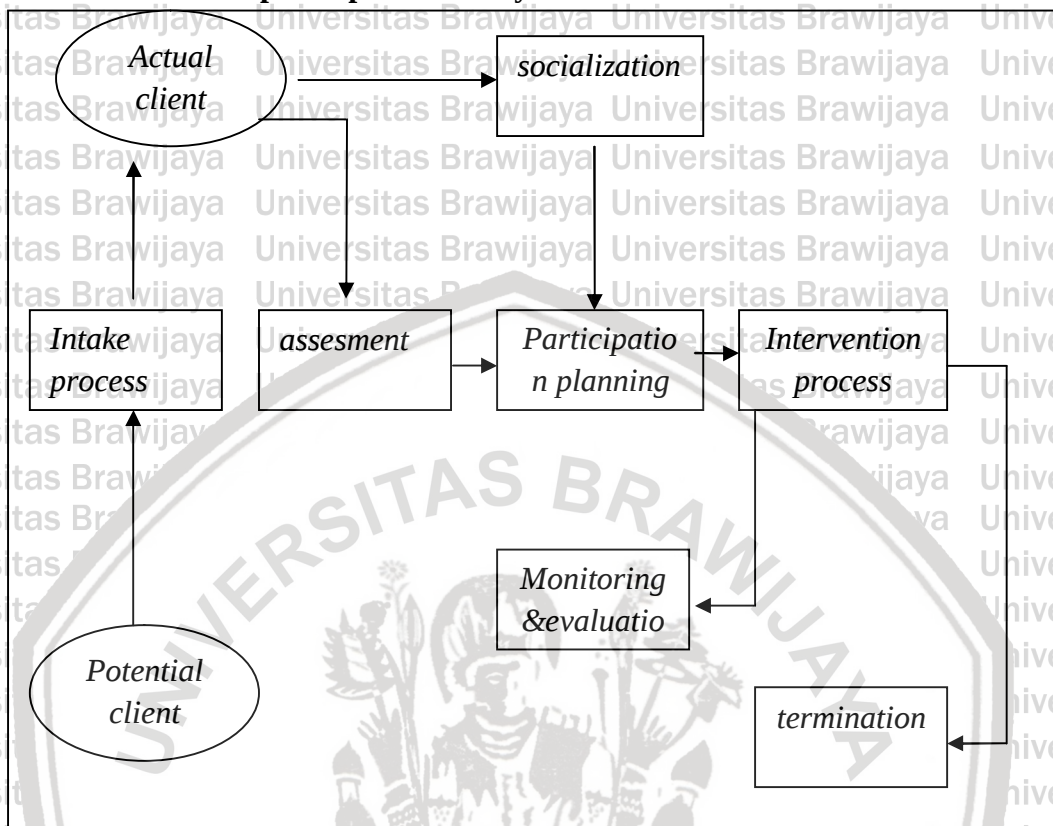
Sebelum diberdayakan, komunitas perlu diberikan kecakapan dalam mengelolanya. Tahap ini sering disebut *capacity building* yang terdiri atas pengkapasitasan manusia, organisasi dan sistem nilai.

c) Pendayaan

Pada tahap ini target diberikan daya, kekuasaan dan peluang sesuai dengan kecakapan yang sudah diperoleh.

Tahapan program pemberdayaan masyarakat ataupun pengembangan masyarakat merupakan sebuah siklus perubahan yang berusaha mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Secara lebih jelas tahapan tersebut digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2 : Tahap-tahap Pemberdayaan



Sumber : Lubis, 2008

Berdasarkan gambar diatas, tahap-tahap pemberdayaan dibagi ke dalam tujuh tahap. Yaitu tahap persiapan (*intake process*), *assessment*, perencanaan partisipasi, proses intervensi, monitoring dan evaluasi serta terminasi. Pada tahap *intake* terdapat dua sasaran yang dituju yaitu klien aktual dan klien potensial.

Klien aktual merujuk pada klien yang akan diintervensi, sementara klien potensial adalah klien yang memiliki potensi untuk diintervensi. Kedua klien tersebut memperoleh sosialisasi dan melalui tahap *assessment* untuk kemudian direncanakan sebuah rencana aksi untuk kegiatan pendampingan. Dalam setiap tahap terutama tahap pendampingan, monitoring dan evaluasi diperlukan.

Kemudian akhirnya tahap terminasi atau pelepasan merupakan tahap terakhir dari

proses pemberdayaan dimana komunitas sasaran telah mampu mandiri dan berdaya. Berikut merupakan tahap-tahap pemberdayaan:

1) Tahap persiapan

Tahap ini mencakup tahap penyiapan petugas dan tahap penyiapan lapangan. Penyiapan petugas dalam hal ini merupakan prasyarat suksesnya suatu pengembangan masyarakat.

2) Tahap pengkajian (*assesment*)

Proses *assessment* dilakukan dengan mengidentifikasi masalah (kebutuhan yang dirasakan) dan juga sumber daya yang dimiliki.

3) Tahap perencanaan alternatif program

Agen perubahan secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya.

4) Tahap *capacity building* dan *networking*

a) Melakukan pelatihan, *workshop* untuk membangun kapasitas setiap individu masyarakat sasaran agar siap menjalankan kekuasaan yang diberikan kepada mereka.

b) Masyarakat sasaran bersama membuat aturan main dalam menjalankan program, berupa anggaran dasar organisasi, sistem dan prosedurnya.

- c) Membangun jaringan dengan pihak luar negeri seperti pemerintah daerah setempat yang dapat mendukung kelembagaan lokal.

5) Tahap pelaksanaan dan pendampingan

Melaksanakan kegiatan yang telah disusun dan direncanakan

6) Tahap evaluasi

- a) Memantau setiap tahapan pemberdayaan yang dilakukan.
- b) Mengevaluasi kekurangan dan kelebihan dari tahapan pemberdayaan yang dilakukan.
- c) Mencari solusi atas konflik yang mungkin muncul dalam setiap tahapan pemberdayaan.

Tahap evaluasi akhir dilakukan setelah semua tahap diatas dijalankan.

Tahap evaluasi akhir menjadi jembatan menuju tahap terminasi.

7) Tahap terminasi

Tahap terminasi dilakukan setelah program dinilai berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dengan berakhirnya tahap terminasi ini, maka fasilitator menyerahkan kontinuitas program kepada masyarakat sasaran, sebagai bagian dari kegiatan keseharian mereka.

Pemerintah, sebagai ‘agen perubahan’ dapat menerapkan kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin dengan tiga arah tujuan, yaitu *enabling*, *empowering*, dan *protecting* (Anonymous:2009). *Enabling* maksudnya menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk

berkembang. Sedangkan *empowering*, bertujuan untuk memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, yakni dengan menampung berbagai masukan dan menyediakan prasarana dan sarana yang diperlukan. *Protecting*, artinya melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah (Anonymous : 2009). Untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya merupakan unsur yang penting (Anonymous : 2009).

2. Pemberdayaan Perempuan

a. Pengertian

Pemberdayaan Perempuan adalah usaha pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi, politik, sosial dan budaya agar perempuan dapat mengatur diri, meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif guna memecahkan masalah pembangunan serta mampu membangun dirinya (Anonymous, 2010).

Pada hakekatnya sasaran program pemberdayaan perempuan diarahkan untuk mengembangkan dan mematangkan berbagai potensi yang ada pada diri perempuan yang memungkinkan dirinya dapat memanfaatkan hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki terhadap sumber daya pembangunan.

Perempuan dan anak merupakan bagian yang sangat penting dalam konteks keberlanjutan suatu bangsa, bukan saja dipandang dalam kaidah agama, tetapi dalam implementasinya merupakan sumberdaya manusia bagi pembangunan. Di dalam MDGs (*Millenium Development Goal's*) terdapat indikator-indikator MDGs yang menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-

2014 (RPJMN 2010-2014), (Hasil *Workshop* Penguatan Kelembagaan PUG dan PUHA se-Kabupaten Jombang : 2012) antara lain sebagai berikut,;

1. Menanggulangi Kemiskinan Dan Kelaparan
2. Mencapai Pendidikan dasar Untuk Semua
3. Mendorong Kesetaraan Jender dan Pemberdayaan Perempuan
4. Menurunkan Angka Kematian Anak
5. Meningkatkan Kesehatan Ibu Hamil
6. Memerangi HIV dan AIDS, Malaria, dan Penyakit menular
7. Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup
8. Membangun Kemitraan Global Untuk Pembangunan

Melihat banyaknya permasalahan banyaknya perempuan dan anak seperti, tindak kekerasan terhadap perempuan, perdagangan perempuan dan anak, rendahnya gaji tenaga kerja perempuan dan permasalahan anak yang dipekerjakan, oleh sebab itu dilakukan suatu upaya seperti program pemberdayaan perempuan serta upaya-upaya perlindungan anak dan pengarusutamaan jender.

b. Unsur-unsur Pemberdayaan Perempuan

Senada dengan Kabeer (2001), Longwe (1989, 1991 dalam Mayoux, 2005a) menyatakan bahwa terdapat 5 unsur utama yang perlu diperhatikan dalam proses pemberdayaan perempuan, yaitu sebagai berikut :

1) Welfare (Kesejahteraan)

Merupakan salah satu aspek yang penting dalam pemberdayaan perempuan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam akses terhadap

kesejahteraan, perempuan menempati posisi yang tidak menguntungkan. Kesejahteraan ini dibagi ke dalam 3 unsur utama

(Claros and Zahidi, 2005:2-5) yaitu :

- (a) Partisipasi ekonomi perempuan, merupakan hal yang penting tidak hanya mengurangi level kemiskinan pada perempuan melainkan pula sebagai langkah penting untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga dan mendorong pembangunan ekonomi negara secara keseluruhan.
- (b) Pencapaian pendidikan, merupakan aspek paling fundamental dalam kegiatan pemberdayaan perempuan. Tanpa memperoleh pendidikan yang memadai perempuan tidak mampu mengakses pekerjaan sektor formal, mendapatkan upah yang lebih baik, berpartisipasi dalam pemerintahan dan mencapai pengaruh politik.
- (c) Kesehatan dan kesejahteraan, merupakan sebuah konsep yang terkait dengan perbedaan substansial antara perempuan dan laki-laki dalam mengakses nutrisi yang cukup, kesehatan, fasilitas reproduksi dan untuk mengemukakan keselamatan integritas seseorang.

Amartya Sen (1999, dalam Claros dan Zahidi, 2005:2) menyatakan bahwa pendidikan, kesejahteraan, pekerjaan dan kepemilikan hak perempuan memberikan pengaruh yang kuat untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menguasai lingkungan dan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi. Partisipasi ekonomi tidak

hanya berhenti pada meningkatnya jumlah perempuan bekerja, melainkan pula kesetaraan dalam pemberian upah.

2) *Access* (akses)

Akses diartikan sebagai kemampuan perempuan untuk dapat memperoleh hak/akses terhadap sumber daya produktif seperti tanah, kredit, pelatihan, fasilitas pemasaran, tenaga kerja dan semua pelayanan publik yang setara dengan perempuan. Akses informasi dan teknologi juga merupakan aspek penting lainnya. Melalui teknologi dan informasi, perempuan dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dan sosial mereka dan mempengaruhi lingkungan setempat. Tanpa hal tersebut perempuan jauh lebih termarginalisasi dari komunitasnya, negaranya bahkan dunia.

3) *Consientisation* (Konsientisasi)

Pemahaman atas perbedaan peran jenis kelamin dan peran gender.

4) *Participation* (Partisipasi)

Kesetaraan partisipasi perempuan dalam proses pembuatan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan dan administrasi. Partisipasi ini merujuk pada keterwakilan perempuan yang setara dalam struktur pembuatan keputusan baik secara formal maupun informal, dan suara mereka dalam penformulasian kebijakan mempengaruhi masyarakat (Claros dan Zahidi, 2005:4).

5) *Equality of control* (kesetaraan dalam kekuasaan)

Kesetaraan dalam kekuasaan atas faktor produksi, dan distribusi keuntungan sehingga baik perempuan maupun laki-laki berada dalam posisi yang dominan.

c. Tujuan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan

Adapun tujuan pembangunan pemberdayaan perempuan berdasarkan artikel (Mushowir, Ahmad , 2009), yaitu :

- 1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Perempuan yang mempunyai kemampuan dan kemauan guna kemandirian, dengan bakal kepribadian, memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan, keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Terciptanya gerak langkah yang terpadu dan harmonis antara sektor dan sub sektor pemerintah, organisasi (kemasyarakatan dan politik), LSM, tokoh dan pemuka masyarakat dan agama dalam upaya proses pembangunan perempuan.
- 3) Mengoptimalkan koordinasi dan keterpaduan dalam pengelolaan pemberdayaan perempuan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- 4) Berkembangnya upaya lembaga pemerintah, swasta dan organisasi masyarakat dalam pengarusutamaan gender disegala bidang kehidupan.

d. Sasaran Umum Pembangunan Pemberdayaan Perempuan

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia perempuan diberbagai kegiatan sektor dan sub sektor serta lembaga dan non lembaga yang mengutamakan peningkatan kemampuan dan profesionalisme / keahlian kaum perempuan.
- 2) Mewujudkan kepekaan, kepedulian jender dari seluruh masyarakat, penentu kebijakan, pengambil keputusan, perencana dan penegak hukum serta pembaharuan produk hukum yang bermuatan nilai sosial budaya serta keadilan yang berwawasan jender.
- 3) Mengarusutamakan jender melalui peningkatan kualitas hidup perempuan dalam berbagai kehidupan yang merupakan salah satu upaya kongkrit dalam pencapaian penurunan angka kemiskinan (Mushowir, Ahmad, 2009).

e. Kebijakan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan

- 1) Mengarusutamakan jender dalam pembangunan daerah pada semua sektor melalui kelembagaan / wadah yang telah ada.
- 2) Memperluas kelembagaan penanganan pemberdayaan perempuan sebagai wadah jejaring (*Network*) untuk mendukung kemajuan dan kemandirian perempuan.

- 3) Meningkatkan komitmen antar lembaga pemerintah, swasta dan independen untuk pemberdayaan perempuan baik dalam hal pengembangan kelembagaan, proses perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan dan evaluasi (Mushowir, Ahmad, 2009).

f. Upaya Mengatasi Permasalahan

Dalam pencapaian sasaran pembangunan pemberdayaan perempuan masih dirasa perlu terus dilaksanakan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan kemampuan dan peran serta kaum perempuan dalam mengisi pembangunan antara lain ;

- a) Sosialisasi / advokasi pengarusutamaan gender perlu dilanjutkan secara berkesinambungan untuk membangun kesepakatan pembangunan pemberdayaan perempuan antara pemerintah, swasta dan anggota masyarakat untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender disegala bidang dan sektor.
- b) Meningkatkan koordinasi antara lembaga – lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan baik dalam bentuk program, proyek maupun kegiatan rutin.
- c) Pelaksanaan pelatihan / pendidikan analisa gender, agar dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tentang gender serta meningkatkan kemampuan untuk mengarusutakan issue gender ke dalam kebijakan program / perencanaan pembangunan.

- d) Mengupayakan keterlibatan kaum perempuan dalam setiap proses dan pengambilan keputusan.

C. Jender

1. Konsep Jender

Istilah jender berdasarkan (modul *study gender*: 2012) diketengahkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan mana perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan mana yang merupakan bentukan budaya yang dikonstruksikan, dipelajari, dan disosialisasikan.

Pembedaan ini sangat penting karena selama ini sering sekali mencampur adukan ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati dan tidak berubah dengan ciri-ciri manusia yang bersifat non kodrat (jender) yang sebenarnya, dapat berubah atau diubah.

Pembedaan peran jender ini sangat membantu untuk memikirkan kembali tentang pembagian peran yang selama ini dianggap telah melekat pada manusia perempuan atau laki-laki. Oleh karena *gender* merupakan suatu istilah yang dikonstruksi secara sosial dan kultural untuk jangka waktu yang lama, yang disosialisasikan secara turun temurun maka pengertian yang baku tentang konsep *gender* ini pun belum ada sampai saat ini, sebab perbedaan laki-laki dan perempuan berlandaskan hubungan *gender* dimaknai secara berbeda dari satu tempat ke tempat lain, dari satu budaya ke budaya lain dan dari waktu ke waktu.

Dengan mengenali perbedaan jender sebagai sesuatu yang tidak tetap, tidak permanen, memudahkan untuk membangun suatu gambaran tentang realitas relasi perempuan dan laki-laki yang dinamis yang lebih tepat dan cocok dengan

kenyataan yang ada dalam masyarakat. *Gender* sering diidentikkan dengan jenis kelamin (*sex*), padahal *gender* berbeda dengan jenis kelamin. *Gender* sering juga dipahami sebagai pemberian dari Tuhan atau kodrat Ilahi, padahal *gender* tidak semata-mata demikian. Secara etimologis kata '*gender*' berasal dari bahasa Inggris yang berarti 'jenis kelamin' (John M. Echols dan Hassan Shadily, 1983: 265). Kata '*gender*' bisa diartikan sebagai 'perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dalam hal nilai dan perilaku (Victoria Neufeldt (ed.), 1984: 561).

Tabel 1

Perbedaan Gender dan Seks

GENDER	SEKS/ JENIS KELAMIN
▪ Bisa berubah ▪ Dapat dipertukarkan ▪ Tergantung musim ▪ Tergantung budaya masing-masing ▪ Bukan kodrat (buatan masyarakat)	▪ Tidak bisa berubah ▪ Tidak dapat dipertukarkan ▪ Berlaku sepanjang masa ▪ Berlaku di mana saja ▪ Kodrat (ciptaan Tuhan): perempuan menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui

Sumber : (Victoria Neufeldt (ed), 1984 : 561)

Secara terminologis, '*gender*' bisa didefinisikan sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (Hilary M. Lips, 1993: 4). Definisi lain tentang *gender* dikemukakan oleh Elaine Showalter. Menurutnya, '*gender*' adalah pembedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya (Elaine Showalter (ed.), 1989: 3). *Gender* bisa juga dijadikan sebagai konsep analisis yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu (Nasaruddin Umar, 1999: 34).

Lebih tegas lagi disebutkan dalam *Women's Studies Encyclopedia* bahwa *gender* adalah suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku,

mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Siti Musdah Mulia, 2004: 4).

Dengan kata lain mengapa perlu memisahkan perbedaan jenis kelamin biologis dan jender adalah karena konsep jenis kelamin biologis yang bersifat permanen dan statis itu tidak dapat digunakan sebagai alat analisis yang berguna untuk memahami realitas kehidupan dan dinamika perubahan relasi laki-laki dan perempuan. Di lain pihak alat analisis sosial yang telah ada seperti analisis kelas, analisis diskursus (*discourse analysis*) dan analisis kebudayaan yang selama ini digunakan untuk memahami realitas sosial tidak dapat menangkap realitas, adanya relasi kekuasaan yang didasarkan pada relasi jender dan sangat berpotensi menumbuhkan penindasan. Dengan begitu analisis jender sebenarnya menggenapi dan sekaligus mengkoreksi alat analisis sosial yang ada yang dapat digunakan untuk meneropong realitas sosial lelaki dan perempuan serta akibat-akibat yang ditimbulkan.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa *gender* adalah suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi kondisi sosial dan budaya, nilai dan perilaku, mentalitas, dan emosi, serta faktor-faktor nonbiologis lainnya. *Gender* berbeda dengan *sex*, meskipun secara etimologis artinya sama dengan *sex*, yaitu jenis kelamin (John M. Echols dan Hassan Shadily, 1983: 517). Secara umum *sex* digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis, sedang *gender* lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, dan aspek-aspek nonbiologis lainnya. Kalau studi *sex* lebih menekankan

kepada perkembangan aspek biologis dan komposisi kimia dalam tubuh seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka studi *gender* lebih menekankan kepada perkembangan aspek maskulinitas dan femininitas seseorang.

Tabel 2

Perbedaan Laki-laki dan Perempuan Dilihat dari Sifat, Fungsi, Ruang Lingkup, dan Tanggungjawab

ASPEK	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
▪ Sifat ▪ Fungsi ▪ Ruang Lingkup ▪ Tanggungjawab (peran)	▪ Maskulin ▪ Produksi ▪ Publik ▪ Nafkah Utama	▪ Feminin ▪ Reproduksi ▪ Domestik ▪ Nafkah Tambahan

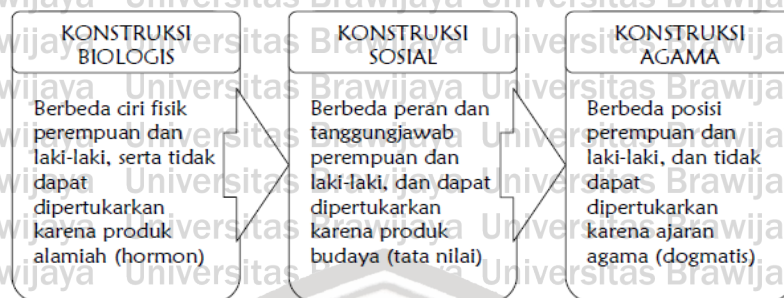
Sumber : (Ratna Megawangi, 1999:45)

Jadi jelas mengapa gender perlu dipersoalkan. Perbedaan konsep gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Secara umum adanya gender telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi dan bahkan ruang tempat dimana manusia beraktivitas. Sedemikian rupanya perbedaan ini melekat pada cara pandang, sehingga hal itu merupakan sesuatu yang permanen sebagaimana abadinya ciri biologis yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki. Secara sederhana perbedaan gender telah melahirkan pembedaan peran sifat dan fungsi yang terpolakan sebagai berikut :

- 1) Konstruksi biologis dari ciri primer, sekunder, *maskulin*, *feminine*.
- 2) Konstruksi sosial dari peran citra baku (*stereotype*).
- 3) Konstruksi agama dari keyakinan kitab suci agama.

Gambar 3

Konstruksi Biologis, Sosial, dan Agama



Sumber : (Ratna Megawangi, 1999:67)

Anggapan bahwa sikap perempuan *feminine* dan laki-laki *maskulin* bukanlah sesuatu yang mutlak, semutlak kepemilikan manusia atas jenis kelamin biologisnya. Dengan demikian jender berdasarkan modul *study gender: 2012* adalah perbedaan laki-laki dan perempuan yang dibentuk, dibuat dan dikonstruksikan oleh masyarakat dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman. Dan untuk memahami konsep jender harus dibedakan kata jender dengan kata *sex*. *Sex* adalah perbedaan jenis kelamin yang ditentukan secara biologis yang secara fisik melekat pada masing-masing jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Perbedaan jenis kelamin merupakan kodrat atau ketentuan Tuhan sehingga sifatnya permanen dan *universal*.

Jadi jelas bahwa jenis kelamin atau *sex* adalah perbedaan biologis hormonal dan anatomis antara perempuan dan laki-laki. *Sex* tidak bisa berubah, permanen dan tidak bisa dipertukarkan. Sedangkan jender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal persifatan, peran, fungsi, hak perilaku yang dibentuk oleh masyarakat karena bersifat relatif, dapat berubah dan dapat

dipertukarkan (modul *study gender*: 2012). Perubahan ciri dari sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu-kewaktu dan dari satu tempat ke tempat lainnya.

2. Teori Jender

Membahas masalah jender berarti membahas permasalahan perempuan dan juga laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pembahasan mengenai jender termasuk kesetaraan dan keadilan jender dikenal adanya 2 aliran atau teori yaitu teori *nuture* dan teori *nature*. Namun demikian dapat pula dikembangkan satu konsep teori yang diilhami dari 2 konsep teori tersebut yang merupakan kompromistis atau keseimbangan yang disebut dengan teori *equilibrium*. Secara rinci teori-teori tersebut diuraikan sebagai berikut :

a. Teori *Nurture*

Menurut teori *nurture* adanya perbedaan perempuan dan laki-laki pada hakekatnya adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan itu menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki-laki dalam perbedaan kelas.

Laki-laki diidentikan dengan kelas *borjuis* dan perempuan sebagai *proletar*. Perjuangan untuk persamaan dipelopori oleh kaum feminis internasional yang cenderung mengejar kesamaan (*sameness*) dengan konsep 50:50, konsep yang kemudian dikenal dengan istilah *perfect equality* (kesamaan kuantitas). Perjuangan tersebut sulit dicapai karena

berbagai hambatan baik dari nilai agama maupun budaya. Berangkat dari kenyataan tersebut, para feminis berjuang dengan menggunakan pendekatan sosial konflik, yaitu konsep yang diilhami oleh ajaran Karl Marx (1818-1883) dan Machiavelli dilanjutkan oleh David Lockwood (1957) dengan tetap menerapkan konsep dialektika. Randal Collins (1987) beranggapan keluarga adalah wadah tempat pemaksaan, suami sebagai pemilik dan wanita sebagai abdi. Margit Eichlen beranggapan keluarga dan agama adalah sumber terbentuknya budaya dan perilaku diskriminasi jender.

Konsep sosial konflik menempatkan kaum laki-laki sebagai kaum penindas dan perempuan sebagai kaum tertindas. Bagi kaum *proletar* tidak ada pilihan lain kecuali dengan perjuangan menyingkirkan penindasan demi untuk mencapai kebebasan dan persamaan. Karena itu aliran *nurture* melahirkan paham sosial konflik yang banyak dianut masyarakat sosialis komunis yang menghilangkan strata penduduk (*egalitarian*). Paham sosial konflik memperjuangkan kesamaan proporsional (*perfect equality*) dalam segala aktivitas masyarakat seperti di DPR, militer, menejer, manteri, gubernur pilot dan pimpinan parpol.

b. Teori *Nature*

Menurut teori *nature* adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah kodrat sehingga harus diterima. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi dan implikasi bahwa diantara kedua jenis tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan,

tetapi ada yang tidak bisa karena memang berbeda secara kodrat alamiahnya. Dalam proses perkembangannya banyak kaum perempuan sadar terhadap beberapa kelemahan teori *nurture* di atas, lalu beralih ke teori *nature*. Pendekatan *nurture* dirasa tidak menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam hidup berkeluarga dan bermasyarakat.

Perbedaan biologis diyakini memiliki pengaruh pada peran yang bersifat naluri. Perjuangan kelas tidak pernah mencapai hasil yang memuaskan karena manusia memerlukan kemitraan dan kerjasama secara struktural dan fungsional. Manusia baik perempuan maupun laki-laki memiliki perbedaan kodrat sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dalam kehidupan sosial ada pembagian tugas begitu pula dalam kehidupan berkeluarga. Talcott Parsons (1902-1979) dan Parsons dan Bales berpendapat bahwa keluarga adalah sebagai unit sosial yang memberikan perbedaan peran suami dan istri untuk saling melengkapi dan saling membantu satu sama lain. Karena itu peran keluarga semakin penting dalam masyarakat modern terutama dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Aliran ini melahirkan paham struktural fungsional yang menerima perbedaan peran asal dilakukan secara demokratis dan dilandaskan oleh kesepakatan antara suami-istri dalam keluarga atau antara kaum perempuan dan laki-laki.

c. Teori *Equilibrium*

Menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Pandangan ini tidak mempertentangan antara perempuan dan laki-laki karena keduanya harus bekerjasama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Untuk mewujudkan gagasan tersebut, maka dalam setiap kebijakan dan strategi pembangunan agar diperhitungkan kepentingan dan peran perempuan dan laki-laki secara seimbang. Hubungan laki-laki dan perempuan bukan dilandasi konflik dikotomis bukan pula struktural fungsional tetapi lebih dilandasi kebutuhan kebersamaan guna membangun kemitraan yang harmonis, karena setiap pihak punya kelebihan dan kekurangan yang perlu diisi dan saling melengkapi.

d. Teori Adaptasi Awal

Pada prinsipnya teori ini menyatakan bahwa adaptasi awal manusia merupakan dasar pembagian kerja secara seksual sekaligus dasar subirdinasi perempuan. Teori adaptasi awal dibangun berdasarkan asumsi sebagai berikut :

- 1) Berburu sangat penting bagi kelangsungan nenek moyang kita.
- 2) Laki-laki yang hampir selalu melakukan kegiatan berburu.
- 3) Perempuan tergantung pada laki-laki untuk memperoleh daging.
- 4) Laki-laki berbagi daging buruannya terutama dengan istri dan anaknya.

- 5) Sekali pola pembagian berdasar jenis kelamin ini terbentuk, tidak berubah hingga sekarang.

e. Teori Teknik Lingkungan

Teori teknik lingkungan ini didasarkan pada apa yang dianggap sebagai hukum alam, yaitu kelangsungan sumber daya alam dan tekanan penduduk. Teori ini menjelaskan bahwa upaya untuk mengontrol pertumbuhan penduduk sudah menjadi sejak jaman dahulu. Dalam konteks ini perempuan berakar pada peran reproduktif mereka.

f. Teori Struktural

Serangkaian teori yang dikelompokkan dalam kategori struktural dibangun berdasarkan asumsi bahwa subordinasi perempuan adalah kultural sekaligus struktural. Satu kelompok teori yang beranggapan bahwa perempuan berstatus lebih rendah, sekaligus otoritas yang lebih sedikit daripada laki-laki, karena perempuan berhubungan dengan area domestik. Sebaliknya dengan laki-laki yang bergelut dengan dunia publik. Pembagian bidang kehidupan menjadi arena publik dan domestik ini dianggap *universal*. Akar dari pembagian ini adalah tanggung jawab perempuan dalam proses kehamilan dan perawatan anak. Dengan demikian status relatif perempuan tergantung pada derajat keterlibatan mereka dalam arena publik dan partisipasi laki-laki dalam arena domestik.

g. Teori Struktural-Fungsionalis

Teori ini mengemukakan tentang bagaimana memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang saling berkaitan. Teori mengakui

adanya keanekaragaman dalam kehidupan sosial. Dalam kondisi seperti itu, dibuatlah suatu sistem yang dilandaskan pada konsensus nilai-nilai agar terjadi interelasi yang demi sesuatu yang dinamakan harmoni, stabilitas dan keseimbangan (*equilibrium*). Sistem ini mensyaratkan aktor dalam jumlah memadai, sehingga fungsi dan struktur seseorang dalam sistem menentukan tercapainya stabilitas atau harmoni tersebut. Ini berlaku untuk semua sistem sosial : agama, pendidikan, struktur politik, sampai rumah tangga, dalam hal ini termasuk mengenai jender William F. Ogburn dan Talcott Parsons (Ratna Megawangi, 1999: 56). Sosialisasi fungsi dan struktur tersebut dilakukan dengan institusionalisasi, melalui norma yang disosialisasikan.

h. Teori Konflik-Sosial

Teori ini meyakini perubahan dalam sistem sosial dimotori oleh konflik. Konflik ini timbul karena adanya kepentingan (*interest*) dan kekuasaan (*power*) (Ratna Megawangi, 1999: 76). Bila salah satu kepentingan yang memiliki kekuasaan memenangkan konflik, maka ia akan menjadi dominan dan melanggengkan sistem sosial yang telah terbentuk. Teori ini sangat sinis terhadap kekuasaan, kemapanan, sifat borjuis, sistem kapitalis dan semua hal yang memiliki strata dan struktur.

Teori ini juga memandang institusionalisasi sebagai sistem yang melembagakan pemaksaan.

3. Aliran Gerakan Feminisme

a. Gerakan Feminisme Liberal

Gerakan ini muncul pada awal abad 18 berbarengan dengan lahirnya zaman pencerahan. Tuntutannya adalah kebebasan dan kesamaan terhadap akses pendidikan dan pembaruan hukum yang bersifat diskriminatif. Asumsi dasar feminisme liberal berakar pada pandangan rasionalisme serta pemisahan antara ruang privat dan publik. Kerangka kerja feminis liberal adalah perjuangan atas kesempatan yang sama dari hak yang sama bagi setiap individu, termasuk perempuan. Jejak dari usaha tampak pada konsep *Women in Development* (WID), yakni keterlibatan perempuan dalam pembangunan.

b. Gerakan Feminisme Marxis Tradisional

Para penganutnya memperjuangkan perlawanan terhadap sistem sosial-ekonomi yang eksploitatif terhadap perempuan. Penindasan perempuan adalah bagian dari penindasan kelas dalam sistem produksi. Oleh karena itu menurut aliran ini isu perempuan harus diletakkan dalam kerangka kritik atas kapitalisme. Sebelum kapitalisme berkembang, keluarga merupakan satu kesatuan produksi. Salah satu tokoh aliran ini adalah Clara Zetkin (1857-1933).

c. Gerakan Feminisme Radikal

Gerakan ini mengacu pada konsep *biological essentialism* (perbedaan esensi biologis), pendekatan yang menyatakan bahwa apa saja yang berhubungan dengan makhluk laki-laki adalah negatif dan menindas. Kelompok ini berusaha memutuskan hubungan dengan laki-laki, membentuk kelompok lesbi dan membangun kebudayaan perempuan. Gerakan ini juga berjuang menyempatkan struktur patriarki yang ada di masyarakat.

d. Gerakan Feminisme Sosialis

Gerakan ini menganggap bahwa perempuan tereksplotasi oleh dua hal, yaitu sistem patriarki dan kapitalis. Jadi walaupun perempuan sudah mandiri di negara kapitalis mereka sebenarnya masih hidup dalam kungkungan sistem patriarki. Sebaliknya, perjuangan kaum feminis akan tetap tidak berarti nilai mengabaikan kelas. Teori kapitalis patriarki yang pertama diungkapkan oleh Zillah Einstein bahwa ketidakadilan bukan akibat perbedaan biologis perempuan dan laki-laki tetapi lebih karena penilaian dan anggapan sosial (*social construction*). Dengan demikian yang diperangi adalah konstruksi visi dan ideologi masyarakat serta bangunan struktur dan sistem yang tidak adil alias bias gender.

e. Gerakan Ekofeminis

Gerakan ini lebih memfokus pandangannya pada analisis kualitas feminine. Mereka melontarkan kritik tajam pada aliran feminisme modern lain dengan menyatakan bahwa ketidakadilan gender bukan

semata-mata disebabkan oleh konstruksi sosial budaya namun faktor intrinsik. Teori ini cenderung melihat individu secara lebih komprehensif sebagai makhluk yang terikat dan berinteraksi dengan lingkungannya. Dipengaruhi oleh keadaan ekologi yang makin rusak kaum ini merasa kecewa pada janji feminisme modern yang menyatakan bila perempuan masuk pada dunia maskulin maka akan tercipta dunia yang lebih *feminine* dan damai.

f. Gerakan Perempuan Dunia Ketiga

Berangkat dari kondisi sebagai bangsa yang pernah dijajah, situasi penindasan perempuan dunia ketiga bertumpuk berjalin-berkelindan. Dalam keadaan lemah, mendapat penindasan dan tekanan dari segala arah, gerakan ini kemudian menentukan pilihan prioritas untuk terlebih dahulu melawan penindas terbesar yaitu imperialisme, penindasan bangsa, kelas, ras dan etnis. Strategi geraknya adalah afiliasi untuk membangun kekuatan perlawanan bersama untuk satu-persatu “sang penindas”. Secara umum isu utama yang diusung adalah pembebasan nasional.

4. Stratifikasi Perempuan Berlandaskan Perbedaan Gender

Jika mengaitkan masalah jender dengan stratifikasi maka mau tidak mau harus melihai kembali pada proses sosialisasi yang telah mengawali pemapanan pembedaan laki-laki dan perempuan berdasarkan hubungan jender.

Selama ini telah disosialisasikan, ditanamkan sedemikian rupa, ke dalam benak, ke dalam pribadi-pribadi seseorang, laki-laki dan perempuan, bahwa karena “kodrat”-nya seorang laki-laki berhak dan sudah seharusnya untuk mendapat kebebasan, mendapat kesempatan yang lebih luas daripada perempuan.

Tuntutan nilai-nilai yang ditentukan oleh masyarakat telah mengharuskan seorang laki-laki untuk lebih pintar, lebih kaya, lebih berkuasa daripada seorang perempuan. Akibatnya segala perhatian dan perlakuan yang diberikan kepada masing-masing dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan tersebut pun disesuaikan dan diarahkan untuk memenuhi tuntutan tersebut. Kepada laki-laki diberikan prioritas dan kesempatan lebih luas untuk sekolah dan menuntut ilmu lebih tinggi daripada kesempatan yang diberikan kepada kaum perempuan.

Kepada kaum laki-laki pula dibuka pintu selebar-lebarnya untuk bekerja di berbagai sektor publik dalam dunia pekerjaan yang dianggap maskulin, sementara perempuan lebih diarahkan untuk masuk ke sektor domestik dengan pekerjaan-pekerjaan yang selama ini memang dianggap sebagai “urusan” perempuan.

Bertolak dari kondisi tersebut maka akses perempuan terhadap “sesuatu” yang dihargai dalam masyarakat, yang menjadi sumber kelahiran pelapisan dalam masyarakat pun menjadi sangat rendah. Sehingga kaum perempuan dengan segala keterbatasan yang sudah ditentukan oleh masyarakat untuknya terpaksa menempati lapisan yang lebih rendah di masyarakat daripada kaum laki-laki.

Kondisi yang telah menempatkan kaum perempuan dalam posisi yang tidak menguntungkan di atas telah juga melahirkan pelbagai bentuk ketidakadilan jender (*gender inequalities*) yang termanifestasi antara lain dalam bentuk:

Dalam memahami konsep jender ada beberapa hal yang perlu dipahami :

a. Ketidakadilan dan diskriminasi jender

Ketidakadilan dan diskriminasi jender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial dimana baik perempuan dan laki-laki menjadi korban dari sistem tersebut. Berbagai pembedaan peran dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki baik secara langsung yang berupa perlakuan maupun sikap, dan yang tidak langsung berupa dampak suatu peraturan perundang-undangan maupun kebijakan telah menimbulkan berbagai ketidak-adilan yang telah berakar dalam sejarah, adat, norma ataupun dalam berbagai struktur yang ada dimasyarakat.

Ketidakadilan jender terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk yang bukan hanya menimpa perempuan saja tetapi juga laki-laki.

Meskipun secara *agregat* ketidakadilan jender dalam berbagai kehidupan ini lebih banyak dialami oleh perempuan, namun ketidakadilan jender itu berdampak pula terhadap laki-laki. Bentuk manifestasi ketidakadilan akibat diskriminasi jender itu meliputi stratifikasi perempuan berlandaskan perbedaan jender. Bentuk-bentuk manifestasi

ketidakadilan akibat diskriminasi gender tersebut dapat meliputi hal berikut :

1) *Marjinalisasi* (peminggiran/pemiskinan) perempuan

Proses marjinalisasi yang mengakibatkan kemiskinan banyak terjadi dalam masyarakat di negara berkembang seperti pengusuran dari kampung halamannya, eksploitasi, dan sebagainya. Namun pemiskinan atas perempuan maupun atas laki-laki yang disebabkan karena jenis kelaminnya adalah merupakan salah satu bentuk ketidakadilan yang disebabkan gender. Sebagai contoh banyak pekerja perempuan tersingkir dan menjadi miskin akibat dari program pembangunan seperti intensifikasi pertanian hanya menfokuskan pada petani laki-laki. Perempuan dipinggirkan dari beberapa jenis kegiatan pertanian dan industri yang lebih memerlukan keterampilan yang biasanya lebih banyak dimiliki oleh laki-laki. Selain itu perkembangan teknologi juga menyebabkan apa yang semula dikerjakan secara manual oleh perempuan diambil alih oleh mesin yang pada umumnya dikerjakan oleh tenaga kerja laki-laki. Sebaliknya banyak lapangan pekerjaan yang menutup pintu bagi laki-laki karena anggapan bahwa mereka kurang teliti melakukan pekerjaan yang memerlukan kecermatan dan kesabaran.

Contoh-contoh marjinalisasi :

- a) Pemupukan dan pengendalian hama dengan teknologi baru yang dikerjakan laki-laki.
- b) Pemotongan padi dengan peralatan mesin yang diasumsikan hanya membutuhkan tenaga kerja dan keterampilan laki-laki. Menggantikan tangan perempuan dengan anai-anai.
- c) Usaha konveksi yang lebih suka menyerap tenaga perempuan
- d) Peluang menjadi pembantu rumah tangga lebih banyak diberikan kepada perempuan.
- e) Peluang untuk menjadi pimpinan dilingkungan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) lebih banyak diberikan kepada laki-laki.

Demikian juga banyak pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan perempuan seperti guru taman kanak-kanak, sekretaris, atau perawat dinilai lebih rendah dibanding pekerjaan laki-laki. Hal tersebut berpengaruh pada perbedaan gaji yang diterima oleh perempuan.

2) *Sub Ordinasi*

Sub ordinasi pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Sudah sejak dulu ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah dari

pada laki-laki. Banyak kasus dalam tradisi, tafsir keagamaan maupun dalam aturan birokrasi yang meletakkan kaum perempuan pada tatanan sub ordinat. Kenyataan memperlihatkan pula bahwa masih ada nilai-nilai masyarakat yang mengatasi ruang gerak terutama perempuan diberbagai kehidupan. Sebagai contoh apabila seorang istri yang hendak berpergian ke luar negeri, ia harus mendapat izin dari suami. Tetapi apabila suami yang akan pergi ia dapat mengambil keputusan sendiri tanpa harus mendapat izin istri. Konsisi semacam itu telah menempatkan perempuan pada posisi tidak penting sehingga jika karena kemampuannya ia bisa menempati posisi penting sebagai pimpinan, bawahannya yang berjenis kelamin laki-laki sering merasa tertekan. Menjadi bawahan seorang perempuan yang pada pola pikirannya merupakan makhluk lemah dan lebih rendah membuat laki-laki merasa “kurang laki-laki”. Inilah bentuk ketidakadilan jender yang dialami oleh perempuan namun berdampak pada laki-laki.

3) Pandangan Stereotype

Pelabelan atau penandaan (*stereotype*) yang sering kali bersifat negatif secara umum selalu melahirkan ketidak-adilan. Salah satu jenis *stereotype* yang melahirkan ketidak-adilan dan diskriminasi bersumber dari pandangan jender karena menyangkut pelabelan atau penandaan terhadap salah satu jenis kelamin tertentu. Misalnya, pandangan terhadap perempuan bahwa tugas dan

funksinya hanya melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan kerumahtanggaan atau tugas domestik dan sebagai akibatnya ketika ada di ruang publik maka jenis pekerjaan, profesi atau kegiatan dimasyarakat bahkan di tingkat pemerintahan dan negara hanyalah merupakan “perpanjangan” peran domestiknya. Misalnya, karena perempuan dianggap pandai merayu maka dianggap lebih cocok kerja di bagian penjualan. Apabila seorang laki-laki marah, maka dianggap tegas, namun jika perempuan marah atau tersinggung dianggap emosional dan tidak dapat menahan diri. Standar penilaian terhadap perempuan dan laki-laki berbeda dan hal itu lebih merugikan perempuan. Contoh-contoh pelabelan (*stereotype*):

- a) Label kaum perempuan sebagai “ibu rumah tangga” sangat merugikan mereka jika hendak aktif dalam kegiatan laki-laki seperti kegiatan politik, bisnis maupun birokrasi.
- b) Sementara label laki-laki sebagai “pencari nafkah” mengakibatkan apa saja yang dihasilkan oleh perempuan dianggap “sambilan” sehingga kurang dihargai. Keramah-tamahan laki-laki dianggap merayu dan keramah-tamahan perempuan dinilai genit.

4) Kekerasan

Berbagai kekerasan terhadap perempuan sebagai akibat perbedaan peran muncul dalam berbagai bentuk. Kata “kekerasan” yang

merupakan terjemahan dari *violence* artinya suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. Oleh karena itu kekerasan tidak hanya menyangkut serangan fisik saja seperti perkosaan, pemukulan, dan penyiksaan, tetapi juga yang bersifat non fisik seperti pelecehan seksual, ancaman dan paksaan sehingga secara emosional perempuan atau laki-laki yang mengalaminya akan merasa terusik batinnya. Pelaku kekerasan yang bersumber karena jender ini bermacam-macam. Ada yang bersifat individual seperti KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) maupun ditempat umum dan juga didalam masyarakat dan negara. Contoh-contoh kekerasan :

- a) Suami membatasi uang belanja dan memonitor pengeluarannya secara ketat.
- b) Istri menghina/ mencela kemampuan seksual atau kegagalan karier suami.
- c) Perempuan dan anak-anak dijadikan sandera dalam suatu konflik sosial / etnis atau antar negara.
- d) Istri tidak boleh bekerja oleh suami setelah menikah.

5) Beban Kerja

Sebagai suatu bentuk diskriminasi dan ketidakadilan jender adalah beban kerja yang harus dijalankan oleh salah satu jenis kelamin tertentu. Dalam suatu rumah tangga pada umumnya beberapa jenis

kegiatan dilakukan oleh laki-laki dan beberapa lainnya dilakukan oleh perempuan. Berbagai observasi, (BPS, 2007) menunjukkan perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan dalam rumah tangga, sehingga bagi mereka yang bekerja di luar rumah selain bekerja di wilayah publik mereka juga harus mengerjakan pekerjaan domestik. Misalnya, seorang ibu dan anak perempuannya memiliki tugas untuk menyiapkan makanan dan menyediakannya di atas meja, kemudian merapikan kembali sampai mencuci piring yang kotor. Seorang Bapak dan anak laki-laki setelah selesai makan tanpa merasa berkewajiban mereka akan meninggalkan meja. Apabila yang mencuci istri, walaupun bekerja mencari nafkah keluarga ia tetap menjalankan tugas pelayanan yang dianggap kewajibannya.

b. Kesetaraan dan Keadilan Jender

Kesetaraan dan keadilan jender suatu kondisi dimana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

Kondisi ini dapat terwujud apabila terdapat perlakuan adil antara perempuan dan laki-laki. Penerapan kesetaraan dan keadilan jender harus memperhatikan masalah kontekstual dan situasional, bukan berdasarkan perhitungan secara matematis dan tidak bersifat *universal*.

Padahal ini membedakan sekurang-kurangnya 3 konteks kehidupan seseorang dalam keluarga, masyarakat, dan agama. Contoh kontekstual dari segi agama : mengenai hak waris. Karena pemahaman terhadap

kaidah agama berbeda secara individual sedangkan sifat kaidah (norma statis) tidak dapat berubah, maka seharusnya ada pemahaman yang benar, sehingga tidak berdampak negatif karena aplikasi sebagian dapat menyesuaikan dan sebagian lagi merupakan *dogmatis* sedang situasional menunjukkan penerapan kesetaraan jender tidak bisa dilakukan sama disemua strata masyarakat. Karena itu (Vandana Shiva) menyebutkan *equility in diversity* (persamaan dalam keragaman). Hidup akan memiliki makna jika dilakukan dalam hubungan yang komplementer yang dapat diwujudkan melalui strategi pengarusutamaan jender (*gender mainstreaming*).

5. PUG (Pengarusutamaan Jender)

Adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan jender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

a. Peraturan Perundangan

Dalam lampiran Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000, bahwa pengertian tentang pengarusutamaan jender telah disusun dan dikembangkan oleh berbagai pihak. Laporan Dewan Ekonomi PBB 1997, menyebutkan bahwa pengarusutamaan jender adalah suatu proses

penilaian implikasi dari setiap rencana aksi bagi perempuan dan laki-laki, mencakup peraturan, kebijakan atau program pada tiap bidang di semua tingkatan pembangunan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengarusutamaan jender sebagai suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan jender, harus dapat membuktikan aspek jender tercermin dan terpadu dalam 4 fungsi utama manajemen program setiap instansi, lembaga maupun organisasi yaitu :

- 1) Perencanaan, menyusun pernyataan atau tujuan yang jelas bagi perempuan dan laki-laki.
- 2) Pelaksanaan, memastikan bahwa strategi yang dijelaskan mempunyai dampak pada perempuan dan laki-laki.
- 3) Pemantauan, mengukur kemajuan dalam pelaksanaan program dalam hal partisipasi dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki.
- 4) Penilaian (evaluasi), memastikan bahwa status perempuan / laki-laki sudah menjadi lebih setara sebagai hasil prakarsa tersebut.

b. Cakupan dan Batasan

Untuk memahami lebih dalam tentang Pengarusutamaan Jender sebaiknya memahami dalam kebijakan dan program sektoral, yaitu :

- 1) Jender dapat menjadi pemikiran semua pihak.
- 2) Memasukkan permasalahan jender dalam program pembangunan.
- 3) Mengintegrasikan permasalahan jender dalam agenda pembangunan.
- 4) Suatu usaha untuk memasukkan kerangka jender ke dalam *design* pelaksanaan rencana dan program sektoral.

5) Pengakuan adanya suatu arus utama dimana gagasan, keputusan dan penyebaran sumber daya dilakukan melalui pencapaian tujuan pembangunan.

6) Bukan hanya memadukan isu gender ke dalam arus utama tetapi mengubah agar lebih tanggap dan kondusif terhadap tujuan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.

c. Tujuan Pengarusutamaan Gender

Seperti tercantum dalam Panduan Pelaksanaan Inpres No. 9 tahun

2000, tujuan pengarusutamaan gender adalah :

- 1) Membentuk mekanisme untuk formulasi kebijakan dan program yang responsif gender.
- 2) Memberikan perhatian khusus pada kelompok yang mengalami marginalisasi sebagai dampak dari bias gender.
- 3) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran semua pihak baik pemerintah maupun non pemerintah sehingga mau melakukan tindakan yang sensitif gender dibidang masing-masing.

d. Sasaran Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender akan berhasil, jika secara konsisten dan bertanggungjawab dilaksanakan oleh seluruh kalangan masyarakat baik yang bergabung dalam lembaga pemerintah (departemen dan Non departemen), organisasi perempuan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, organisasi swasta, organisasi keagamaan maupun pada masyarakat yang paling kecil yaitu keluarga. Para pelaksana dari

lembaga pemerintah merupakan sasaran utama dari PUG

(Pengarusutamaan Jender) seperti tertuang dalam Inpres No. 9 tahun 2000.

Dengan kewenangan yang dimiliki SDM (Sumber Daya Manusia) yang

tersedia mulai dari tingkat pusat sampai dengan lini lapangan yang

berperan dalam membuat kebijakan, program dan kegiatan (*policy maker*)

dan perencanaan program (*technical planning*) mutlak harus

mengarusutamakan jender dalam setiap langkahnya. Begitu pula LSM

(Lembaga Swadaya Masyarakat) / organisasi perempuan, organisasi

swasta, organisasi profesi, organisasi keagamaan, dan lain sebagainya

adalah organisasi yang sangat menguasai keadaan di lapangan dan dekat

dengan masyarakat.

e. Prinsip Penerapan Pengarusutamaan Jender di Indonesia

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dalam mensosialisasikan

PUG (Pengarusutamaan Jender) dan penerapannya di Indonesia mengenal

prinsip yang mengacu kepada teori jender sebagai berikut :

1) Menghargai Keragaman Pluralistik

Yaitu menerima keragaman etnis budaya, agama dan adat istiadat

(pluralistik). Karena bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari

yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama dan adat istiadat

merupakan kekayaan potensial dan keragaman yang perlu

dipertahankan di dalam pengarusutamaan jender tanpa harus

mempertentangkan keragaman tersebut.

2) Bukan Pendekatan Dikotomis

Yaitu pendekatan dalam rangka pengarusutamaan jender tidak melalui pendekatan dikotomis yang selalu mempertimbangkan antara kepentingan perempuan dan laki-laki.

3) Melalui Proses Pemampuan Sosialisasi dan Advokasi

Prinsip yang penting dalam pengarusutamaan jender di Indonesia adalah melalui perjuangan dan penerapan secara bertahap melalui proses sosialisasi dan advokasi. Pelaksanaan pengarusutamaan jender tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tetapi pelaksanaannya harus dengan pertimbangan melalui proses sosialisasi dan advokasi yang tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

4) Menjunjung Nilai HAM (Hak Azasi Manusia) dan Demokrasi

Pendekatan pengarusutamaan jender di Indonesia tidak melalui pertentangan dan penekanan sehingga ada kelompok yang merasa dirugikan. Penerapan pengarusutamaan jender selalu menjunjung nilai-nilai HAM (Hak Azasi Manusia) dan demokrasi, sehingga akan diterima oleh lapisan masyarakat secara sadar.

f. Ruang Lingkup Pengarusutamaan Jender

Ruang lingkup pengarusutamaan jender (PUG) mencakup aspek-aspek sebagai berikut berdasarkan Inpres No. 9 Tahun 2000:

1) Perencanaan

Perencanaan merupakan upaya untuk mencapai tujuan secara rasional baik dalam tahapan membuat kebijakan maupun program, di

tingkat nasional, propinsi maupun kabupaten. Perencanaan kebijakan merupakan penentuan tujuan dan sasaran pembangunan, sedangkan perencanaan program merupakan operasionalisasi dari kewenangan pemerintah yang dilakukan pada setiap lingkup diberbagai tingkatan wilayah. Pengertian program disini adalah program/proyek/kegiatan operasional yang merujuk kepada Propenas/ Propeda dan Repeta/ Repetada serta RAPBN/RAPBD.

a) Perencanaan yang responsif gender

Adalah perencanaan yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah, organisasi profesi, masyarakat, dan sebagainya yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek seperti peran, akses, manfaat dan kontrol yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Hal ini berarti bahwa perencanaan tersebut perlu mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunan maupun dalam pelaksanaan kegiatan sehingga perencanaan program sampai operasionalisasinya di lapangan.

Perencanaan yang responsif gender dilakukan setiap 5 tahun sekali (kebijakan jangka menengah) sedangkan perencanaan program dilakukan setiap tahun dalam rangka menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan (kebijakan jangka pendek) dan evaluasi dapat dilakukan dalam kurun waktu tersebut jika terjadi kekeliruan.

Perencanaan yang responsif gender penting dilakukan dengan

tujuan agar tersusunnya kebijakan dan program pembangunan yang responsif jender diberbagai bidang pembangunan seperti ekonomi, hukum, politik, pendidikan, agama, sosial dan budaya.

Dukungan anggaran terhadap proyek/ kegiatan yang telah disusun tersebut hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Menekankan prioritas ulang pada peningkatan pengeluaran pemerintah.
- (2) Menekankan pada reorientasi anggaran yang semula mendanai program dan kegiatan yang netral jender menjadi anggaran yang mendanai program dan kegiatan yang responsif jender.
- (3) Memfokuskan penggunaan dana yang memberi manfaat secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek pembangunan.
- (4) Adanya partisipasi yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan penganggaran.
- (5) Sesuai dengan keperluannya anggaran dapat dialokasikan untuk membiayai kebutuhan praktis, strategis maupun kebutuhan untuk perempuan penyelenggaraan pengarusutamaan jender.

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan pengarusutamaan jender perlu didukung dan diefektifkan dengan menyiapkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pemampuan para pelaksana pengarusutamaan jender.
- 2) Penyusunan perangkat analisis, pemantauan dan penilaian.

3) Pembentukan mekanisme pelaksanaan pengarusutamaan jender,

antara lain :

a) Forum Komunikasi

b) Kelompok Kerja

c) Panitia Pengarah (*Steering Committee*)

d) Tim Penggerak pengarusutamaan jender (*Gender Focal Point*)

4) Pembuatan kebijakan formal yang mampu mengembangkan komitmen kesegnap jajaran pemerintah dan swasta serta disemua tingkatan, propinsi, kabupaten dan kota, pembentukan mekanisme jejaring kerja yang melibatkan semua *stakeholders* dalam proses pengarusutamaan jender.

5) Pembentukan Kelembagaan pengarusutamaan jender pada instansi pemerintah disetiap tingkatan wilayah.

Mekanisme kerja instansi pemerintah dalam melaksanakan Pengarusutamaan jender (PUG) :

1) Penanggung jawab dan perumus kebijakan tentang pengarusutamaan jender secara nasional dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan.

2) Pelaksanaan pengarusutamaan jender dilakukan oleh semua instansi pemerintah pusat, daerah, lembaga swadaya masyarakat yang peduli pada kesetaraan dan keadilan jender.

3) Penanggung jawab operasional di tingkat daerah dipegang oleh Gubernur atau Bupati/ Walikota yang secara teknis dilaksanakan oleh Biro/Bagian/ Seksi yang menangani program pemberdayaan perempuan di daerah.

4) Kerjasama koordinasi antara instansi dan lembaga swadaya masyarakat melalui kelompok kerja untuk menyatukan langkah dan mengevaluasi pelaksanaan pengarusutamaan jender guna dilaporkan kepada Bupati/ Walikota, Gubernur, Presiden.

3) Pemantauan dan Evaluasi

Berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang sudah disusun perlu dipantau dan dievaluasi dengan memperhatikan hal-hal berikut :

- (1) Dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Tepat waktu.
- (3) Sederhana, efektif dan efisien.
- (4) Transparan, dapat dipercaya dengan data yang valid.
- (5) Menggunakan data terpilah menurut jenis kelamin.
- (6) Adanya indikator dan tolak ukur.

Pemantauan dan evaluasi pengarusutamaan jender mencakup pertanyaan :

- (1) Sejauh mana prakondisi dan komponen kunci pengarusutamaan jender telah ada.
- (2) Sejauh mana perempuan dan laki-laki memiliki akses dan kontrol yang sama atas sumber daya dan fasilitas serta pelayanan kegiatan.

(3) Sejauh mana para staf, mitra kerja dan kelompok sasaran, baik perempuan dan laki-laki telah atau belum berpartisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan serta dalam pelaksanaan program.

(4) Sejauh mana kinerja kegiatan staf telah responsif gender.

g. Prosedur dan Langkah-langkah Pengarusutamaan Gender

Banyak pembuat kebijakan masih belum menyadari akan arti penting serta relevansi dari keseluruhan diskusi kesetaraan dan keadilan gender ke dalam lingkungan profesinya. Dalam melaksanakan pengarusutamaan gender beberapa hal / prosedur harus diperhatikan yaitu :

- 1) Inventarisasi pendataan para peserta pelatihan /advokator.
- 2) Melaksanakan pelatihan/ advokasi untuk member kepekaan dan kesadaran gender bagi para pengambil kebijakan maupun praktisi pembangunan.
- 3) Memahami visi, misi dan program organisasi, serta menilai kepekaan gender yang terkandung di dalamnya.
- 4) Menyediakan pangkalan data yang akurat yang dikumpulkan dan disajikan secara terpilah menurut jenis kelamin. Data dimaksud dikumpulkan baik oleh Badan Pusat Statistik maupun oleh masing-masing sektor/kementerian/ lembaga yang secara rutin diperbaharui.
- 5) Menyediakan data statistik gender yaitu data yang berkaitan dengan isu gender yang muncul karena permasalahan ketimpangan di dalam memperoleh akses, manfaat, peran dan kontrol atas sumber daya

pembangunan sekaligus memahami penyebab masalah dan kesenjangan tersebut.

Berdasarkan prosedur di atas maka langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pengarusutamaan gender adalah :

- (1) Meninjau dan menelaah kembali amanat dan pesan yang terkandung dalam berbagai kesepakatan nasional maupun internasional.
- (2) Mempelajari statistik gender yang perlu ditangani dan memformulasikan cara menanganinya.
- (3) Mengidentifikasi masalah gender yang mempengaruhi program dan kegiatan.
- (4) Meninjau kembali berbagai kebijakan, visi , misi dan tujuan organisasi untuk menilai :
 - (a) Bias gender : kebijakan dan program yang mementingkan laki-laki dan sama sekali mengabaikan perempuan atau sebaliknya.
 - (b) Manfaat gender : sejauh mana perempuan dan laki-laki sama mendapat manfaat dari program dan kegiatan tersebut.
 - (c) Memformulasikan kembali secara eksplisit kebijakan dan program tersebut untuk memastikan bahwa manfaat yang sama akan diperoleh perempuan dan laki-laki, jika terjadi bias gender.
 - (d) Memaparkan advokasi kebijakan, rencana, tujuan dan kegiatan yang telah direvisi kepada pejabat berwenang

untuk memperoleh komitmen dan dukungan politik untuk membentuk *Gender Focal Point* serta alokasi sumber daya bagi pelaksanaannya.

(5) Mengadakan sosialisasi suatu pertemuan orientasi dengan staf yang bersangkutan untuk memberitahukan tentang kebijakan dan rencana sektoral yang sudah direvisi.

(6) Menyusun petunjuk pelaksanaan kebijakan dan program aksi.

h. Identifikasi Permasalahan Jender

Permasalahan jender dapat ditinjau dari beberapa aspek, berdasarkan Inpres No.9 Tahun 2000 meliputi :

1) Sosial Budaya

Kondisi yang diciptakan oleh norma (adat istiadat) membedakan peran dan fungsi laki-laki dan perempuan yang berkaitan dengan kemampuan. Baik *universal* seperti intelektual maupun kemampuan spesifik yang berkaitan dengan aspek biologis.

2) Ekonomi

Adanya anggapan bahwa perempuan dengan bentuk dan keterbatasan fisik biologis ikut dikondisikan sebagai makhluk yang kurang produktif dalam bidang ekonomi, sedangkan laki-laki dikondisikan sebagai unsur pencari nafkah yang lebih produktif.

Sehubungan dengan itu laki-laki memperoleh kesempatan untuk berperan dalam berbagai sumber pembangunan. Di Indonesia dalam rumah tangga perempuan dipolakan sebagai unsur pengatur / pengguna

penghasil suami (laki-laki), dengan pembagian tugas antar yang menghasilkan (laki-laki) dan yang mengatur pengeluaran (perempuan).

3) Peraturan Perundangan

Secara hukum menurut UUD 1945 laki-laki dan perempuan sebagai warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pembangunan dan membela negara. Namun bila dicermati secara teliti dan cermat dari ketentuan dasar tersebut masih dirasakan adanya perbedaan (diskriminasi) terhadap kaum perempuan dalam berbagai hal, antara lain dalam kesempatan pendidikan, perlakuan dan penggajian di tempat kerja, perlindungan terhadap tindak kekerasan termasuk hal reproduksinya

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian dengan metode deskriptif, pendekatan kualitatif, karena peneliti bermaksud menggambarkan tentang pelaksanaan pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di bidang ekonomi pada masyarakat Jombang yang mengambil studi pada peran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang. Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian yang non hipotesis sehingga dalam rangka penelitiannya bahkan tidak perlu merumuskan hipotesisnya. Pelaksanaan metode penelitian deskriptif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut, selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti. Dengan penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti berharap mampu menggambarkan keadaan yang sebenarnya sesuai dengan kenyataan mengenai pelaksanaan pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di bidang ekonomi pada masyarakat Jombang yang didalamnya meliputi peran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang.

B. Fokus Penelitian

Peneliti mengambil fokus penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan peran yang dilakukan Badan Pemberdayaan Perempuan dan

Keluarga Berencana dalam pemberdayaan perempuan terkait perwujudan keadilan dan kesetaraan jender di bidang ekonomi.

a. Program Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kabupaten Jombang dalam mewujudkan KKG (Keadilan dan Kesetaraan Jender) di bidang ekonomi bagi masyarakat Jombang.

Program yang dimaksud adalah Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan

b. Kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan

Keluarga Berencana untuk menunjang program yang telah direncanakan.

1) Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha. Kegiatan ini diturunkan atau diwujudkan dengan P3EL (Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal).

2) Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Pemberian Keterampilan

3) Pengadaan survei lapangan.

4) Sosialisasi dan *workshop* penguatan kelembagaan pada 51 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Jombang.

c. Kesesuaian TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi) yang menjadi pedoman bagi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang dengan implementasinya.

Secara yuridis komitmen untuk mengimplementasikan pengarusutamaan *gender* (PUG) di wilayah Jombang berdasarkan Instruksi Bupati Jombang No. 2 tahun 2011 tentang Pengarusutamaan *Gender* di Kabupaten Jombang, Peraturan Bupati Jombang No. 39 tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.45/94/415.10.10/2009 tentang pembentukan kelompok kerja pengarusutamaan *gender* di Kabupaten Jombang, Peraturan Bupati Jombang No. 18 tahun 2010 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P4A).

d. Peranan masyarakat Jombang dalam penguatan keadilan dan kesetaraan jender di bidang ekonomi :

1. Keterlibatan masyarakat Jombang, dari segala lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan sosialisasi.
2. Keaktifan masyarakat khususnya kaum perempuan dalam menerima bentuk pemberian keterampilan yang diberikan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang.
3. Ketersediaan masyarakat Jombang dalam pengadaan program pengembangan ekonomi lokal.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat pelaksanaan pemberdayaan perempuan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan jender di bidang ekonomi .

a. Hal yang menjadi faktor pendukung Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang (Kassubid Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pengarusutamaan Jender) :

1) Faktor Internal :

a) Dari segi anggaran : dimana anggaran berasal dari bantuan dana APBD 1 dan APBD (Anggaran Perencanaan Belanja Daerah) II, yaitu dari Kabupaten Jombang. Pemberian dana ini melalui DPA (Dokumen Perencanaan Anggaran) SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) BPPKB (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana) Jombang, sebesar kurang lebih Rp 600.000.000,00.

b) Memiliki Sumber Daya Manusia, 1 orang Kepala Bidang, 2 orang Kepala SubBidang, 4 orang staf.

c) Dari segi sarana dan prasarana : difasilitasi dengan 2 mobil dinas, masing-masing pegawai diberi motor dinas, dan mendapatkan literatur untuk panduan pelaksanaan materi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan.

2) Faktor Eksternal :

a) Antusiasme masyarakat Jombang khususnya anggota P4A

(Pembentukan Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan

dan Anak) dan kaum perempuan.

b) Adanya tim fasilitator Pengarusutamaan jender yang

membantu dalam pelaksanaan program baik itu sosialisasi

maupun *workshop* kelembagaan pada 51 SKPD

Kabupaten Jombang.

c) Dukungan dari organisasi perempuan dan PSW (Pusat

Studi Wanita) yang beranggotakan para akademisi

perempuan di Kabupaten Jombang.

d) Kerjasama yang baik dengan LSM (Lembaga Swadaya

Masyarakat) pemerhati perempuan seperti ; KPI (Koalisi

Perempuan Indonesia cabang Jombang), WCC (Women

Crisis Centre), Narisakti Jombang.

b. Hal yang menjadi faktor penghambat Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang

(Kassubid Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan

Pengarusutamaan Gender):

1) Faktor Internal :

Dengan jumlah SDM yang tersedia yaitu 7 orang, menjadikan

suatu hambatan tersendiri. Sedangkan program dan kegiatan

pemberdayaan perempuan sangat banyak.

2) **Faktor Eksternal :**

a) Dari segi pendidikan : tingkat pemahaman masyarakat terkait dengan keadilan dan kesetaraan gender kurang.

b) Dari segi ekonomi : dalam pengembangan ekonomi lokal kurang permodalan untuk mengembangkan kearifan lokal.

c) Dari segi teknologi dan informasi : masih dirasa kurang, tidak adanya pemanfaatan teknologi secara benar.

Masyarakat masih sangat tradisional.

d) Dari segi budaya : masyarakat tidak ingin berkembang atau maju, dikarenakan masih adanya pemikiran yang tradisional. Dalam arti tidak memikirkan kearah depan namun hanya terpacu pada pemikiran sesaat saja.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melakukan sebuah penelitian. Berdasarkan lokasi penelitian ini, peneliti memperoleh data dan informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan permasalahan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian yaitu Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang, masyarakat Jombang khususnya kaum perempuan yang terdiri atas anggota organisasi wanita, dan masyarakat desa yang memperoleh peringkat terbaik atas keberhasilan program yang direncanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang.

Situs penelitian adalah tempat dimana sebenarnya peneliti menangkap keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti untuk dapat memperoleh data yang valid dan akurat. Berkaitan dengan lokasi penelitian dan rumusan masalah yang diambil, maka situs penelitiannya diarahkan pada lembaga atau dinas yang relevan dan terkait dengan masalah yang diangkat. Sehingga yang menjadi situs penelitian dalam penelitian ini adalah di wilayah Kabupaten Jombang tepatnya di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di Jalan KH. Abdurahman Wahid No.161 Jombang.

D. Sumber Data

Data adalah segala keterangan yang disertai bukti atau fakta yang dapat dirumuskan untuk menyusun perumusan, kesimpulan, atau kepastian sesuatu (Puspa, 1977 dalam Patilima, 2005). Setiap peneliti agar mempunyai hasil yang baik sesuai dengan yang dikehendaki tentunya harus ditunjang oleh data-data yang relevan, baik jumlah maupun jenis data yang digunakan. Sedangkan data-data tersebut harus digali dan diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini pihak-pihak yang ada kaitannya dengan obyek penelitian ini. Sumber data tersebut menunjukkan darimana peneliti mendapatkan data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian, dapat berupa orang atau benda.

Sedangkan jenis datanya adalah:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan pengamatan atau data yang diperoleh secara langsung dari

informan atau wawancara dengan narasumber yang digunakan sebagai pendukung dalam melakukan analisis penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah pegawai dan staf Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang, Kabidang Pemberdayaan Perempuan, Kasubbid Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pengarusutamaan Jender, Sub Bidang Umum, Kabad Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang, masyarakat Jombang dalam hal ini anggota organisasi perempuan dibawah naungan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang, serta pada masyarakat Desa GenenganJasem wilayah Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang.

2. Data sekunder adalah data untuk mendukung data primer berupa laporan-laporan, dokumen, catatan-catatan, dan arsip-arsip lain yang ada relevansinya dengan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah program yang diambil sebagai peranan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan jender di bidang ekonomi, arsip-arsip dan data-data yang dapat memberikan informasi tentang permasalahan yang akan diteliti. Data lain yang menunjang misalnya buku, dokumentasi, internet dan sumber data sekunder lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah pegawai dan staf Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang, Kabidang Pemberdayaan Perempuan, Kasubbid Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Sub Bidang Umum, Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang, masyarakat Jombang dalam hal ini anggota organisasi perempuan dibawah naungan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang, serta pada masyarakat Desa GenenganJasem wilayah Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang.

2. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap masalah-masalah yang diteliti, tanpa mengajukan pertanyaan-pertanyaan meskipun objeknya adalah orang. Dengan observasi memungkinkan peneliti untuk mengamati sendiri kemudian mencatat hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian mengenai pelaksanaan pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di bidang ekonomi terkait dengan peran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang. Peneliti akan melakukan observasi mengenai bagaimana sebenarnya peran dari instansi yaitu Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Jombang khususnya pada kaum perempuan maupun organisasi

wanita dan desa yang memiliki ekonomi lemah, dikarenakan masih terjadi bias jender dan pendapatan keluarga yang kurang mencukupi, maka disitulah peran dari pada perempuan atau istri dapat dimasukkan. Artinya bahwa Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang ini menjadi fasilitator untuk dapat menampung serta mengembangkan potensi perempuan agar dapat bekerja dengan baik yaitu melalui program-program pemberdayaan yang direncanakan instansi sesuai dengan tupoksinya. Yang pada akhirnya itu merupakan suatu strategi agar pengarusutamaan jender ini dapat mewujudkan keadilan dan kesetaraan jender. Sehingga kebutuhan ekonomi keluarga dapat teratasi atau dengan kata lain tidak kekurangan lagi dengan perempuan ikut bekerjasama. Dengan dapat tercapainya suatu kesejahteraan maka secara otomatis pembangunan dapat dirasakan secara adil dan merata. Artinya perempuan dan laki-laki sama merasakan pembangunan. Peneliti juga melakukan observasi pada masyarakat Desa GenenganJasem wilayah Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, terkait dengan program pengembangan ekonomi lokal yang menyediakan modal atau memberikan modal pada desa yang memiliki potensi dari sumber daya alamnya. Dimana desa ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan berupa anyaman tikar.

Dengan adanya hal demikian tersebut maka, peneliti menemukan faktor yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan yang berfokus pada keadilan dan kesetaraan jender dalam prespektif ekonomi. Dimana terdapat dua faktor yang berpengaruh yaitu faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pemberdayaan perempuan ini.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini merupakan pengumpulan data dari dokumen, arsip, foto dan lain-lain yang masih terkait dengan penelitian mengenai pelaksanaan pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di bidang ekonomi pada masyarakat Jombang terkait dengan peran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui foto yaitu bagaimana proses implementasi program melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan antara instansi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang dengan seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Jombang dalam penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, antara Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dengan masyarakat Jombang khususnya kaum perempuan baik kegiatan pada pusat organisasi wanita maupun pada masyarakat desa yang memiliki ekonomi lemah melalui program dan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh instansi terkait. Selain itu, peneliti juga mendokumentasikan saat wawancara berlangsung dengan para informan.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan dalam proses pengumpulan data yang berwujud sarana atau benda, khususnya dalam kegiatan pengumpulan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti Sendiri

Hal ini sesuai dengan metode penelitian yang dipakai yaitu metode penelitian kualitatif, dimana pengumpulan data lebih tergantung pada diri peneliti sendiri. Disini peneliti sebagai instrumen utama (*instrumen guide*) dengan menggunakan panca indera untuk menyaksikan dan mengamati apa yang terjadi dan bagaimana sebenarnya peranan yang dilakukan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terkait dengan pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di bidang ekonomi dengan melakukan penelitian secara langsung di lapangan. Pengamatan yang dilakukan harus sesuai dengan tujuan daripada penelitian itu sendiri.

2. Catatan Lapangan (*field note*)

Catatan ini dibuat setelah peneliti mengadakan pengamatan ataupun wawancara. Catatan ini merupakan hasil dari penelitian yang didengar, dilihat, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi data dalam penelitian kualitatif. Hasil dari catatan ini dianalisis sehingga nantinya dapat memberi hasil tentang penelitian, terutama

berkaitan dengan pemberdayaan perempuan berkaitan dengan pengarusutamaan jender sebagai sarana mewujudkan keadilan dan kesetaraan jender dalam perspektif ekonomi.

G. Analisa Data

Sesuai dengan tipe penelitian deskriptif, maka setelah data terkumpul proses selanjutnya adalah menyederhanakan data yang telah diperoleh kedalam bentuk yang mudah dibaca, dipahami, dan diinterpretasikan yang pada hakekatnya merupakan upaya peneliti untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. Data yang ada dipaparkan, dianalisa dan diinterpretasi secara mendalam dan serinci mungkin sehingga diharapkan dapat diperoleh kesimpulan yang memadai. Dalam penelitian ini menggunakan metode dari Miles dan Huberman (1992) dalam (Sugiono 2007:91) yang menyatakan bahwa analisa data kualitatif terdiri dari tiga kegiatan, antara lain meliputi:

1. Data *Reduction* adalah proses pemilihan, pemberian fokus, penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data mentah (*raw method*) yang terdapat dalam buku catatan lapangan. Peneliti memilih dan memilah data mana yang benar-benar berkaitan dengan penelitian.
2. Data *display* adalah susunan informasi yang terorganisir yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan tindak lanjut yaitu menganalisis hasil

data yang dikomparasikan dengan teori yang relevan dengan permasalahan penelitian.

3. *Conclution drawing* adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi yang merupakan akhir dari kegiatan analisis. Setelah proses analisis selesai dan tidak ditemukan informasi lagi mengenai kasus yang diteliti, penulis melakukan penarikan kesimpulan mengenai hasil penelitian. Tahap ini dilakukan untuk mempermudah pembacaan terhadap keseluruhan penelitian.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Situs Penelitian

a. Kondisi Kabupaten Jombang

Kabupaten Jombang terletak di Pulau Jawa pada posisi $05^{\circ}20',01''$ - $05^{\circ}30',01''$ Bujur Timur dan $07^{\circ}24',01''$ - $07^{\circ}45',01''$ Lintang Selatan. Kabupaten ini mempunyai batas-batas daerah dimana sebelah barat Kabupaten Nganjuk, di sebelah utara dengan Kabupaten Lamongan, di sebelah timur dengan Kabupaten Mojokerto, sebelah selatan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang. Kabupaten Jombang terdiri atas 21 kecamatan yang dibagi lagi menjadi 301 desa dan 4 kelurahan, yaitu kelurahan Kaliwungu, Kepanjen, Jelakombo, Jombatan . Kecamatan di Kabupaten Jombang adalah :

- 1) Kecamatan Jombang
- 2) Kecamatan Diwek
- 3) Kecamatan Gudo
- 4) Kecamatan Perak
- 5) Kecamatan Bandar Kedungmulyo
- 6) Kecamatan Megaluh
- 7) Kecamatan Tembelang
- 8) Kecamatan Ploso

- 9) Kecamatan Plandaan
- 10) Kecamatan Kabuh
- 11) Kecamatan Kudu
- 12) Kecamatan Ngusikan
- 13) Kecamatan Peterongan
- 14) Kecamatan Sumobito
- 15) Kecamatan Kesamben
- 16) Kecamatan Jogoroto
- 17) Kecamatan Mojoagung
- 18) Kecamatan Mojowarno
- 19) Kecamatan Wonosalam
- 20) Kecamatan Bareng
- 21) Kecamatan Ngoro

Kecamatan yang terluas adalah kecamatan Kabuh 13.233 Ha dan yang terkecil Kecamatan Ngusikan 34,980 Ha. Jombang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, yang terdiri dari daratan seluas 1.159,50 km yang keseluruhannya terdiri dari daratan. Kabupaten Jombang adalah salah satu kabupaten di Indonesia yang tidak mempunyai pantai. Curah hujan terbesar antara 1750 s/d 2500 mm pertahun.

1) Sejarah Jombang

Jombang termasuk Kabupaten yang masih muda usia, setelah memisahkan diri dari gabungannya dengan Kabupaten

Mojokerto yang berada di bawah pemerintahan Bupati Raden

Adipati Ario Kromodjojo, yang ditandai dengan tampilnya pejabat

yang pertama mulai tahun 1910 sampai dengan tahun 1930 yaitu

Raden Adipati Ario Soerjo Adiningrat. Menurut sejarah lama,

konon dalam cerita rakyat mengatakan bahwa salah satu desa yaitu

desa Tunggorono, merupakan gapura keraton Majapahit bagian

Barat, sedang letak gapura sebelah selatan di desa Ngrimbi, dimana

sampai sekarang masih berdiri candinya. Cerita rakyat ini

dikuatkan dengan banyaknya nama-nama desa dengan awalan

"Mojo" (Mojoagung, Mojotrisno, Mojolegi, Mojowangi,

Mojowarno, Mojojejer, Mojodanu dan masih banyak lagi).

Salah Satu Peninggalan Sejarah di Kabupaten Jombang

Candi Ngrimbi, Pulosari Bareng Bahkan di dalam lambang daerah

Jombang sendiri dilukiskan sebuah gerbang, yang dimaksudkan

sebagai gerbang Mojopahit dimana Jombang termasuk

wewenangnyanya Suatu catatan yang pernah diungkapkan dalam

majalah Intisari bulan Mei 1975 halaman 72, dituliskan laporan

Bupati Mojokerto Raden Adipati Ario Kromodjojo kepada residen

Jombang tanggal 25 Januari 1898 tentang keadaan Trowulan (salah

satu *onderdistrict afdeeling* Jombang) pada tahun 1880.

Sehingga kegiatan pemerintahan di Jombang sebenarnya

bukan dimulai sejak berdirinya (tersendiri) Kabupaten jombang

kira-kira 1910, melainkan sebelum tahun 1880 dimana Trowulan pada saat itu sudah menjadi *onderdistrict afdeeling* Jombang, walaupun saat itu masih terjalin menjadi satu Kabupaten dengan Mojokerto. Fakta yang lebih menguatkan bahwa sistem pemerintahan Kabupaten Jombang telah terkelola dengan baik adalah saat itu telah ditempatkan seorang *Asisten Resident* dari Pemerintahan Belanda yang kemungkinan wilayah Kabupaten Mojokerto dan Jombang lebih-lebih bila ditinjau dari berdirinya Gereja Kristen Mojowarno sekitar tahun 1893 yang bersamaan dengan berdirinya Masjid Agung di Kota Jombang, juga tempat peribadatan Tridharma bagi pemeluk Agama Kong hu Chu di kecamatan Gudo sekitar tahun 1700. Konon disebutkan dalam ceritera rakyat tentang hubungan Bupati Jombang dengan Bupati Sedayu dalam soal ilmu yang berkaitan dengan pembuatan Masjid Agung di Kota Jombang dan berbagai hal lain, semuanya merupakan petunjuk yang mendasari eksistensi awal-awal suatu tata pemerintahan di Kabupaten Jombang (Anonymous, 2002).

2) Visi Dan Misi Kabupaten Jombang

VISI : " Terwujudnya Masyarakat Jombang Yang Sejahtera, Agamis Dan Berdaya Saing Berbasis Agribisnis "

MISI :

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik, yaitu mengandung makna penyempurnaan struktur kelembagaan pemerintah daerah yang dititikberatkan pada proses penataan struktur organisasi agar dapat menjalankan fungsi-fungsi yang diamanatkan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang professional, efektif, berkompetensi tinggi serta tanggap terhadap tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan publik
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yaitu dengan mengupayakan partisipasi seluruh komponen masyarakat, pemerintahan daerah dan swasta agar pembangunan di Kabupaten Jombang mampu menghasilkan sumberdaya manusia yang berkompetensi tinggi dan mempunyai keunggulan kompetitif, mempunyai integritas dan jati diri masyarakat santri yang dipandu oleh nilai-nilai luhur budaya dan agama
3. Membangun struktur perekonomian yang kokoh dengan berbasis keunggulan kompetitif di bidang agribisnis, yaitu penegmbangkan daerah dengan memperkuat perekonomian daerah yang berbasis pada kekuatan sektor pertanian dan produk unggulan daerah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan produksi, distribusi, dan pelayanan; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, menumbuhkan keberpihakan pada ekonomi kerakyatan; serta memantapkan program penanggulangan kemiskinan
4. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, yaitu pembangunan yang dilaksanakan tidak semata untuk mengejar pertumbuhan, namun

bagaimana pertumbuhan yang ada sekaligus dapat dirasakan secara merata hasilnya oleh semua lapisan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan faktor alam dan lingkungan sekitarnya (*Sustainable development*) (Anonymous,2002).

Pembangunan yang ada di Kabupaten Jombang memang mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tetapi selain keberhasilan tentu masih menyisakan beberapa masalah yang perlu segera ditangani, apalagi dengan adanya berbagai krisis yang menimpa Indonesia yang pastinya berdampak menghambat laju ekonomi nasional dan imbasnya dapat dirasakan di daerah-daerah termasuk di Kabupaten Jombang. Masalah kemiskinan, masalah ketenagakerjaan termasuk masalah ketimpangan jender antara pria dan wanita dalam berbagai bidang kehidupan merupakan contoh permasalahan sosial yang sampai saat ini masih belum dapat ditangani dengan maksimal.

Data demografi dewasa ini semakin banyak diperlukan oleh berbagai pihak, tidak saja data pendukung tetapi juga sebagai input maupun *output* dari kegiatan. Ada 2 hal yang dilihat dari data demografi, pertama karakteristik dan kedua besaran serta komposisinya. Dalam hal ini hanya akan dibahas berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 3 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

No.	RANGE UMUR	LAKI- LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI+ PEREMPUAN
1.	0- 14 TAHUN	174.107	177.724	351.831
2.	15- 64 TAHUN	290.178	296.211	586.389
3.	65 TAHUN KEATAS	116.070	118.486	234.556
	JUMLAH	580.335	592.421	1.172.776

Sumber : Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.

Jombang Tahun 2009

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan Kabupaten Jombang berdasarkan jenis kelamin dan sebaran usianya. Bahwa penduduk perempuan lebih banyak dari pada laki-laki.

b. Potensi Perempuan Kabupaten Jombang di Bidang Ekonomi

1) Pemilik dan Pekerja di Sektor Industri Kecil

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa kesempatan perempuan bekerja di sektor industri kecil masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki. Terbukti dari jumlah pemilik usaha laki-laki sebesar 1507 orang sedangkan perempuan sebesar 315 orang.

Table 4 : Jumlah Pemilik dan Pekerja Industri Kecil

NO.	JENIS KELAMIN	PEMILIK	PEKERJA
1.	LAKI-LAKI	1507	6809
2.	PEREMPUAN	315	3057
	JUMLAH	1822	9866

Sumber : Rekapitulasi Data Terpilah Jender 2009

2) Pemilik dan Pekerja di Sektor Industri Rumah Tangga

Tabel menunjukkan bahwa kaum laki-laki mendominasi kepemilikan di sektor industri rumah tangga. Dengan jumlah laki-laki sebagai pemilik sebesar 3171 sedangkan perempuan sebesar 1610. Dan pekerja untuk industri rumah tangga pun juga didominasi oleh laki-laki sebesar 2394 orang, sedangkan perempuan hanya 1849 orang.

**Tabel 5 : Jumlah Pemilik dan Pekerja Industri Rumah
Tangga**

NO.	JENIS KELAMIN	PEMILIK	PEKERJA
1.	LAKI-LAKI	3171	2394
2.	PEREMPUAN	1610	1849
	JUMLAH	4781	4243

Sumber : Rekapitulasi Data Terpilah Jender Tahun 2009

3) Pemilik dan Pegawai Usaha Katering

Dari tabel menunjukkan bahwa usaha catering didominasi oleh perempuan. Dengan jumlah pemilik usaha catering perempuan sebesar 255 orang, sedangkan laki-laki sebesar 34 orang. Jumlah pekerja perempuan pada usaha catering sebesar 204 orang, sedangkan laki-laki sebesar 30 orang.

Tabel 6 : Jumlah Pemilik dan Pegawai Usaha Katering

NO.	JENIS KELAMIN	PEMILIK	PEKERJA
1.	LAKI-LAKI	34	30
2.	PEREMPUAN	225	204
	JUMLAH	289	234

Sumber : Rekapitulasi Data Terpilah Jender Tahun 2009

4) Pemilik dan Pegawai Usaha Konveksi

Dari data tabel dapat diketahui bahwa jumlah perempuan yang bergerak dalam bidang menjahit/konveksi lebih banyak dibandingkan laki-laki. Ini terlihat dari jumlah pemilik usaha konveksi untuk laki-laki sebesar 547 orang, sedangkan perempuan sebesar 995 orang. Hal serupa juga terjadi pada pekerjanya, yaitu perempuan sebesar 212 orang sedangkan laki-laki sebesar 175 orang.

Tabel 7 : Jumlah Pemilik dan Pekerja Usaha Konveksi

NO.	JENIS KELAMIN	PEMILIK	PEKERJA
1.	LAKI-LAKI	547	175
2.	PEREMPUAN	995	212
	JUMLAH	1542	387

Sumber : Rekapitulasi Data Terpilah Jender Tahun 2009

5) Pembantu Rumah Tangga

Jumlah pembantu rumah tangga yang ada di Kabupaten Jombang masih banyak yang didominasi oleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Terbukti dari data pada tabel. Bahwa jumlah pembantu rumah tangga perempuan sebesar 2610 orang sedangkan laki-laki sebesar 514 orang

Tabel 8 : Jumlah Pembantu Rumah Tangga

NO.	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	LAKI-LAKI	514
2.	PEREMPUAN	2610

Sumber : Rekapitulasi Data Terpilah Jender Tahun 2009

c. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kabupaten Jombang

1) Sejarah singkat Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

BPPKB adalah suatu badan atau instansi pemerintah yang bergerak di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Awalnya, sebelum adanya otonomi daerah segala kebijakan baik itu kebijakan berupa peraturan ataupun anggaran termasuk yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan selalu berjalan secara vertikal yaitu ditentukan oleh pusat dan dilaksanakan oleh daerah. Secara bertahap setelah adanya otonomi daerah di tahun 2004, maka setiap daerah diberikan keleluasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri termasuk membentuk suatu badan atau

lembaga. Oleh sebab itu, adanya otonomi daerah ini otomatis juga diikuti oleh lahirnya Lembaga Keluarga Berencana pada tahun 2007 yaitu cikal bakal dari (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana). Struktur penataan kelembagaan BPPKB yang ada di Jombang ini awalnya hanya memiliki dua bidang utama saja yaitu: bidang Keluarga Berencana dan juga bidang Keluarga Sejahtera hingga tahun 2009. Barulah setelah adanya berbagai macam permasalahan dan tuntutan terkait peningkatan kesejahteraan perempuan, mulai tahun 2009 bertambah di satu bidang yaitu bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga menjadi tiga bidang: Bidang Keluarga Berencana, Bidang Keluarga Sejahtera, dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan sampai saat ini berganti nama menjadi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

2) Lokasi instansi

Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang terletak di Jl. KH. Abdurahman Wahid No. 161 Jombang.

3) Visi dan Misi Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana

Visi

“Semua Keluarga Ikut KB Yang Berkesetaraan Dan Berkeadilan Jender”

Visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana dan seluruh *stakeholder's* dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Jombang secara terpadu. Secara filosofis visi tersebut juga bermakna bahwa semua keluarga selain menjadi konseptor KB, juga terlibat meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarganya serta terlibat dalam peningkatan peran perempuan dalam segala bidang kehidupan dan mampu melindungi anak-anaknya.

Misi

Berikut ini adalah misi Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana, antara lain :

- a) Mewujudkan keluarga kecil dan bahagia
- b) Menurunkan jumlah keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
- c) Meningkatkan kualitas hidup perempuan yang berkesetaraan dan berkeadilan jender

d) Penghapusan segala bentuk tidak kekerasan bagi perempuan dan anak

e) Mewujudkan ketahanan keluarga dan meningkatkan pendapatan keluarga sejahtera

4) Strategi dan Kebijakan

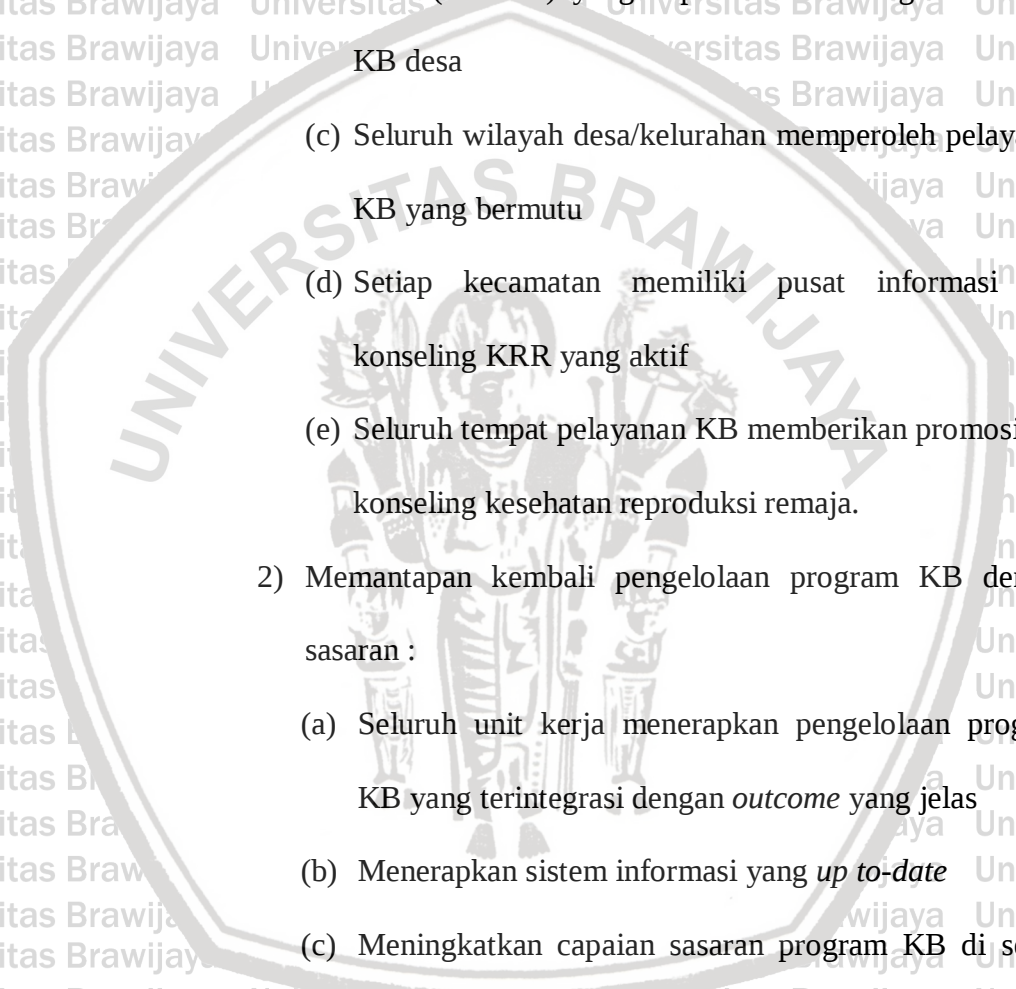
Untuk mencapai visi dan misi ditetapkan strategi pencapaiannya. Strategi tersebut berupa penetapan kebijakan dan program kerja sebagai berikut:

a) Strategi

- 1) Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
- 2) Menata kembali pengelolaan program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
- 3) Memperkuat SDM operasional program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
- 4) Meningkatkan pembiayaan program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

b) Kebijakan

- 1) Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam program KB dengan sasaran :

- 
- (a) Setiap desa/ kelurahan memiliki tokoh agama/tokoh masyarakat yang melakukan advokasi dan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) KB
- (b) Setiap desa/kelurahan memiliki Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) yang berperan aktif sebagai fasilitator KB desa
- (c) Seluruh wilayah desa/kelurahan memperoleh pelayanan KB yang bermutu
- (d) Setiap kecamatan memiliki pusat informasi dan konseling KRR yang aktif
- (e) Seluruh tempat pelayanan KB memberikan promosi dan konseling kesehatan reproduksi remaja.
- 2) Memantapan kembali pengelolaan program KB dengan sasaran :
- (a) Seluruh unit kerja menerapkan pengelolaan program KB yang terintegrasi dengan *outcome* yang jelas
- (b) Menerapkan sistem informasi yang *up to-date*
- (c) Meningkatkan capaian sasaran program KB di setiap tingkatan wilayah
- (d) Setiap tingkatan wilayah mempunyai jejaring kerja yang aktif dengan mitra kerja

3) Memperkuat sumber daya manusia operasional program

KB dengan sasaran :

(a) Setiap desa/kelurahan dilayani oleh tenaga

PLKB/PKB yang terlatih

(b) Setiap kecamatan memiliki tenaga pengelola KB

(c) Setiap petugas KB memenuhi *standard* kompetensi

dengan jumlah yang memadai

4) Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

melalui pelayanan KB dengan sasaran :

(a) Seluruh keluarga yang memiliki balita menjadi anggota

aktif Bina Keluarga Balita (BKB)

(b) Setiap keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I

anggota UPPKS memiliki usaha ekonomi produktif

(c) Setiap kecamatan memiliki percontohan bina keluarga

remaja

(d) Membentuk kelompok percontohan bina lingkungan

keluarga

5) Meningkatkan pembiayaan program KB dengan sasaran :

(a) Program KB memperoleh prioritas penganggaran

pemerintah pusat dan daerah

(b) Terciptanya sistem jaminan pembiayaan program KB

terutama bagi rakyat miskin

(c) Di setiap kecamatan tersedia alat dan obat kontrasepsi swasta dengan harga terjangkau

6) Program

Program yang telah ditetapkan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

(1) Untuk meningkatkan capaian peserta KB, ditetapkan program sebagai berikut:

(1) Program keluarga berencana

(2) Program pelayanan kontrasepsi

(2) Untuk meningkatkan pendewasaan usia perkawinan, ditetapkan program sebagai berikut”

a. Program kesehatan reproduksi remaja (KRR)

b. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

(3) Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, ditetapkan program :

a. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB yang mandiri

b. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kegiatan di masyarakat

c. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

d. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

e. Program pengkajian model BKB-Posyandu-Padu

(4) Meningkatkan kesejahteraan perempuan, ditetapkan program :

a. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas perempuan dan anak

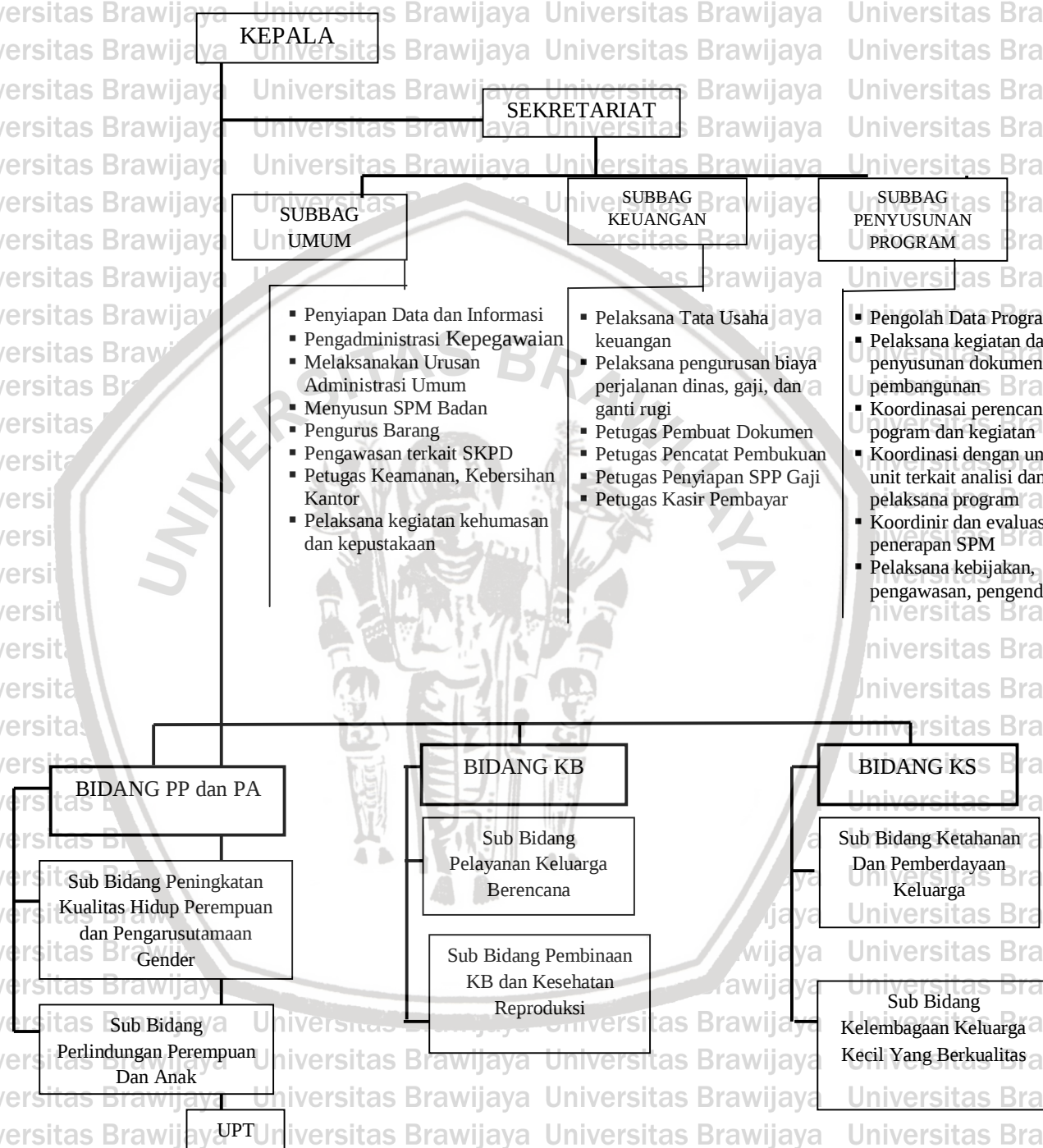
b. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan jender dan anak

c. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

d. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

e. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan jender

5) Struktur Organisasi



Gambar 4 : Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Jombang, 2010

6) Tugas Pokok, Fungsi dan Urusan

Berdasarkan peraturan bupati Kabupaten Jombang No. 6 tahun 2009 tentang tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang. Tugas pokok Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang dibidang Pemberdayan Perempuan Dan Keluarga Berencana.

Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana:

- a. Penyusunan program pembangunan dibidang Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
- b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan operasional, koordinasi dan penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan program pembangunan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera
- c. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi serta melaksanakan koordinasi dibidang pemberdayaan

perempuan, keluarga berencana dan keluarga
sejahtera

d. Penyelenggaraan peningkatan peran serta
masyarakat dan keluarga dibidang pemberdayaan
perempuan, keluarga berencana dan keluarga
sejahtera

e. Penyelenggaraan pembinaan, pemantauan dan
pengembangan terhadap program pemberdayaan
perempuan, keluarga berencana dan keluarga
sejahtera

f. Pemberian rekomendasi pengembangan modal
Usaha Peningkatan Pendapatann Keluarga Sejahtera
(UPPKS)

g. Penyelenggaraan pengawasan melekat administrasi
umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan
perbekalan serta evaluasi pelaporan

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Bupati

Dalam melaksanakan kedudukan tugas dan fungsi Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, merupakan
unsur pelaksanaan otonomi daerah yang mempunyai tugas pokok
sebagai berikut:

7) Dinas atau badan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah

8) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas

9) Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

10) Dinas, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dan strategi di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya

11) Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut fungsi badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana mempunyai fungsi :

Uraian Tugas dan Wewenang:

1. Tugas dan Fungsi Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

a. Tugas Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

b. Fungsi Kepala badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dan strategis dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Tugas dan Fungsi Sekretariat

a. Tugas Sekretariat :

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, di bidang ketatausahaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan serta tata usaha perlengkapan.

b. Fungsi sekretariat:

Fungsi Sekretariat badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana adalah sebagai berikut :

1. Pelaksana koordinasi pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan kebijakan teknis dan operasional badan
2. Pelaksana koordinasi pelaksanaan tugas – tugas organisasi badan
3. Pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan program kerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan badan
4. Pengelolaan administrasi kepegawaian, pelaksanaan pembinaan, peningkatan disiplin, dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai
5. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran, pelaksanaan penatausahaan keuangan, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan
6. Pelaksanaan urusan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan, ketalaksanaan dan kearsipan

7. Penyusunan SPM (Standar Pelayanan Minimal) lingkup unit kerja

8. Penyiapan data dan informasi kepastakaan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan inventarisasi aset

9. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan instansi terkait, perangkat daerah dan pihak ketiga

10. Pelaksanaan sistem pengawasan melekat

11. Penyusunan dan pelaksanaan sistem informasi lingkup badan

12. Pelaksanaan kebersihan, keindahan dan keamanan

13. Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat

3. Tugas dan Fungsi Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum memiliki tugas :

1. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional
2. Melaksanakan administrasi kepegawaian, melaksanakan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai
3. Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga, perjalanan dinas dan perlengkapan ketalaksanaan dan kearsipan
4. Menyusun SPM (Standar Pelayanan Minimal) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
5. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan kantor
6. Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup SKPD

7. Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barang – barang inventaris badan
8. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepustakaan badan
9. Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas
10. Membantu sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur

4. Tugas dan Fungsi Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan memiliki tugas yaitu :

1. Melaksanakan penatausahaan keuangan meliputi pengelolaan anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi, pertanggungjawaban, dan verifikasi serta penyusunan anggaran
2. Melaksanakan pengurusan biaya perjalanan dinas, perpindahan pegawai dang anti rugi, gaji pegawai dan pembayaran hak – hak keuangan lainnya
3. Menyusun, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan anggaran badan
4. Melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai

5. Tugas dan Fungsi Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan

Sub bagian penyusunan program dan pelaporan memiliki tugas yaitu :

1. Menghimpun, mengolah, mengkaji dan meneliti data dalam rangka penyusunan rencana program dan anggaran
2. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan penyusunan dokumen pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana
3. Melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana

4. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka analisis dan penilaian pelaksanaan program dan anggaran
5. Melaksanakan kebijakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana
6. Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan SPM (Standar Pelayanan Minimal) bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana
7. Melaksanakan pembuatan umpan balik hasil penyusunan dan penetapan anggaran guna perencanaan program dan anggaran untuk tahun berikutnya
8. Mengelola, mengembangkan data dan system informasi lingkup badan
9. Melaksanakan *supervise*, pelaporan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas

6. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak :

Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah melaksanakan sebagian tugas badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana dibidang penetapan kebijakan dan pengelolaan kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak.

b. Fungsi bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak :

1. Perumusan dan penetapan program kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

2. Pelaksanaan program peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, sosial budaya, peningkatan kesejahteraan pegawai
3. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan bantuan dana yang menunjang kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
4. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga swasta / LSM sebagai sinkronisasi program dan kegiatan dalam menunjang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
5. Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi jender dan anak dengan merujuk pada kebijakan nasional
6. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, pendokumentasian data, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi jender dan anak
7. Pelaksanaan motivasi tingkat partisipasi dan kemandirian masyarakat, penguatan kelembagaan masyarakat yang mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
8. Pelaksanaan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan program serta pelaporan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

7. Tugas dan Fungsi Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pengarusutamaan Gender

a. Tugas Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pengarusutamaan Gender yaitu :

1. Menyiapkan dan menganalisis data dalam penetapan kebijakan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan guna terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender
2. Menyusun dan melaksanakan program peningkatan kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan gender perempuan dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya
3. Melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan melalui peningkatan sumberdaya manusia dan pelatihan ketrampilan.
4. Melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan peranan perempuan sebagai pengambil keputusan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender
5. Memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas peran pusat studi wanita (PSW), organisasi masyarakat / LSM pemerhati perempuan dan dunia usaha
6. Memfasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin

7. Melakukan analisis jender, perencanaan anggaran, yang responsif jender, dan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi pengarusutamaan jender (KIE PUG)
8. Melaksanakan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya
9. Mengembangkan usaha pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga serta masyarakat melalui kegiatan P2WKSS (Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera) dan P3EL (Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal)
10. Melaksanakan pembinaan, sosialisasi dan implementasi program peningkatan kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan
11. Menyiapkan bahan koordinasi dengan komponen terkait dalam rangka mengembangkan pelaksanaan pengarusutamaan jender
12. Melaksanakan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan program serta pelaporan terhadap dampak, perkembangan program peningkatan kualitas hidup dan pengarusutamaan jender

7) Potensi SDM

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugasnya memiliki 186 orang pegawai yang terdiri dari 186 orang PNS dan 1 orang honorer. Dari 186 orang PNS tersebut terbagi dalam golongan dan pendidikan sebagai berikut:

Tabel 9: Daftar Golongan dan Jumlah Pegawai

No	Golongan	Jumlah Pegawai
1	Golongan I	0 orang
2	Golongan II	19 orang
3	Golongan III	163 orang
4	Golongan IV	4 orang
Jumlah		186 Orang

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Jombang, 2011

Tabel 10: Daftar Pendidikan Pegawai

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	S3	0 orang
2	S2	6 orang
3	S1	69 orang
4	D4	0 orang
5	D3	0 orang
6	D2	0 orang
7	D1	0 orang
8	SMA sederajat	102 orang
9	SMP sederajat	0 orang
10	SD sederajat	0 orang
11	Tidak sekolah	0 orang
Jumlah		186 Orang

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Jombang, 2011

d. Masyarakat Desa Genengan Jasem, Kecamatan Kabuh

Adapun data yang ditulis peneliti ini berdasarkan buku Data Potensi Sosial Ekonomi Desa Genengan Jasem Tahun 2010.

1) Kondisi fisik wilayah

a) Kondisi Geografis

Sebelah Utara : berbatasan dengan Perhutani, Kecamatan Kabuh

Sebelah Timur : berbatasan dengan Munungkerep, Kecamatan Kabuh

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kauman, Kecamatan Kabuh

Sebelah Barat : berbatasan dengan Sumbergondang, Kecamatan Kabuh

b) Tipologi

Merupakan Desa yang letaknya disekitar hutan dan tidak berbatasan dengan Kecamatan atau Kabupaten lainnya di wilayah Jombang.

c) Iklim

Curah Hujan : 45 mm/tahun

Jumlah Bulan Hujan : 5 bulan/tahun

Suhu Rata-rata : 26-31 derajat Celcius

d) Orbitasi

Jarak Desa Genengan Jasem ke Ibukota Kecamatan 7 km.

sedangkan jarak ke Ibukota Kabupaten 26 km.

2) Kependudukan

a) Jumlah penduduk

Jumlah penduduk Desa Genengan Jasem seluruhnya 2.221 jiwa. Dengan rincian, jumlah penduduk laki-laki 1.041 dan perempuan sebesar 1.180 jiwa. Jumlah Kepala Keluarga yang ada di Desa tersebut adalah 675 KK.

b) Jumlah penduduk menurut pendidikan

Di Desa Genengan Jasem, masih banyaknya orang yang berpendidikan rendah. Hal ini dibuktikan dengan jumlah penduduk yang buta huruf 125 orang, penduduk yang tidak pernah sekolah sejumlah 849 orang. Penduduk yang pernah sekolah SD namun tidak tamat 131 orang, berpendidikan terakhir SD 535 orang, SMP 295 orang, SMA 229 orang, Sarjana hanya 2 orang.

c) Jumlah rumah tangga miskin

Desa Genengan Jasem termasuk dalam kategori desa merah. Yang artinya merupakan desa yang tertinggal dan miskin. Dengan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) 653 KK.

3) Prasarana dan Sarana Pendukung Sosial Ekonomi

a) Jaringan jalan dan jembatan

(1) Jalan desa

Berupa jalan aspal hanya sepanjang 2 km, jalan makadam sepanjang 5 km, jalan tanah sepanjang 3 km. Sedangkan jalan antar

desa hanya berupa jalan aspal sepanjang 7 km dan jalan makadam sepanjang 2 km.

(2) Jembatan desa

Di Desa ini jembatannya hanya ada 1 yang terbuat dari kayu saja. Sedangkan untuk sarana antar desa hanya memiliki 2 jembatan yang terbuat dari beton.

b) Fasilitas pendidikan formal

Di desa Genengan Jasem ini fasilitas untuk pendidikan pun juga sangat minim. Terlihat pada jumlah TK (Taman Kanak-kanak) hanya ada 1 bangunan saja. Sedangkan untuk Sekolah Dasar pun juga hanya memiliki 1 bangunan saja.

c) Fasilitas kesehatan

Terkait dengan permasalahan kesehatan, Desa Genengan Jasem tidak memiliki puskesmas apalagi rumah sakit. Di desa ini hanya tersedia rumah bersalin dan posyandu saja.

d) Kegiatan usaha kecil

Kebanyak orang di desa ini menjadi pengrajin dari anyaman pandan. Sehingga memiliki unit kerajinan disana sejumlah 525 unit.

B. Penyajian Data

1. Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesetaraan Gender di Bidang Ekonomi

a. Peranan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang Terkait dengan Program dan Kegiatan :

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang, memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di Kabupaten Jombang. Salah satu strategi untuk dapat mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender adalah dengan adanya kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan. Dalam hal ini, BPPKB Kabupaten Jombang mempunyai tiga program dan 7 kegiatan dalam rangka memberdayakan perempuan di segala bidang. Namun, untuk memberdayakan perempuan di bidang ekonomi, BPPKB Kabupaten Jombang memiliki satu program dan 2 kegiatan yang mendukung terlaksananya program tersebut.

1) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan

Adapun indikator dan tolak ukur kinerja belanja langsung dari program ini adalah :

Tabel 11: Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Kegiatan P3EL(Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal)

INDIKATOR	TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KERJA
MASUKAN	Jumlah Dana	Rp 32. 507.522
KELUARAN	Meningkatnya anggaran kelompok dan perekonomian masyarakat. (Meningkatnya perempuan dalam bidang usaha)	12 Kelompok
HASIL	Pengembangan Usaha 12 Kelompok P3EL	12 Kelompok
MANFAAT	Meningkatnya pendapatan anggota kelompok	12 Kelompok
DAMPAK	Meningkatnya kesejahteraan anggota kelompok P3EL	12 Kelompok
SASARAN	Perempuan Pengelola Usaha	

Sumber : DPPKAD Kabupaten Jombang bidang Anggaran 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat dikaji bahwa mekanisme dana bantuan tersebut adalah dengan terjadinya perguliran dana, yaitu dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Di Desa Genengen Jasem ini pada awalnya terdapat 7 kelompok yang masing-masing terdiri dari 10 orang. Namun dengan seiring berjalannya waktu dan terjadinya perkembangan modal yang awalnya Rp 25.000.000 menjadi Rp 52.239.758. Maka terjadinya penambahan kelompok yaitu 12 kelompok (Laporan Monitoring P3EL Desa Genengen Jasem Tahun 2011). Sesuai dengan petunjuk teknis operasional kegiatan P3EL di Desa ini, modal yang diberikan tersebut dibagi ke dalam kelompok-kelompok. Dengan acuan bahwa modal tersebut sebagai pinjaman yang berbunga 1%. Dengan bunga 1% tersebut maka dana dapat digulirkan kelompok lainnya. Sehingga mampu

menghasilkan tambahan kelompok pada kegiatan tersebut. Begitu seterusnya terkait dengan mekanisme perguliran dana (Laporan Monitoring P3EL Desa Genengan Jasem Tahun 2011). Hal tersebut menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pasalnya masukan dana yang diharapkan atau yang menjadi tolak ukur dari BPPKB Kabupaten Jombang berkisar Rp 32.507.522, 00 justru menjadi Rp 52.239.758 yang merupakan pendapatan kotor.

Peningkatan jumlah kelompok tersebut tidak hanya bergerak di sektor mengayam akan tetapi perempuan di Desa tersebut mampu mengembangkan pada sektor perdagangan yaitu adanya 1 kelompok yang membuka warung, dan 2 kelompok membuka toko. Dengan secara tidak langsung manfaat yang dirasakan adalah adanya peningkatan pendapatan bagi anggota kelompok. Selain itu, berdampak pada kesejahteraan kelompok karena pendapatannya sudah meningkat.

**Tabel 12: Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Kegiatan Pelatihan Pemberian Ketrampilan**

INDIKATOR	TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KERJA
MASUKAN	Jumlah Dana	Rp 50. 000.000
KELUARAN	Meningkatnya Kinerja P4A Kabupaten (terwujudnya keadilan dan kesetaraan jender dalam setiap pelaksanaan pembangunan)	6 Kegiatan
HASIL	Terciptanya keadilan dan kesetaraan jender	6 Kegiatan
MANFAAT	Peningkatan kinerja anggota P4A dan menumbuhkembangkan wirausaha perempuan	6 Kegiatan
DAMPAK	Peningkatan upaya penyelesaian permasalahan perempuan di bidang ekonomi	6 Kegiatan
SASARAN	Anggota P4A Kabupaten dan perempuan desa di lokasi P2WKSS	

Sumber : DPPKAD Kabupaten Jombang bidang Anggaran 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat dikaji bahwa masukan dana Rp50.000.000,00 tersebut, digunakan untuk menjadikan kegiatan pemberian keterampilan pada perempuan dapat berjalan baik. Dimana di dalamnya anggaran tersebut digunakan untuk 6 kegiatan. Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Rapat koordinasi dengan 51 SKPD Kabupaten Jombang. Kegiatan ini menghabiskan dana sebesar Rp 3.120.000,00.
2. Adanya kegiatan pemantapan anggota P4A yang terdiri atas 100 orang perempuan dari segala lapisan masyarakat dengan dana Rp 5.000.000,00
3. Kegiatan pelatihan pada perempuan yaitu terdiri dari 4 kegiatan. Kegiatan pelatihan anyaman bambu di Kecamatan Ploso dengan peserta 30 orang perempuan, dalam waktu 2 hari. Anggaran yang dipergunakan sebesar Rp 4.837.000,00.
4. Kegiatan pelatihan merajut benang di Kecamatan Sumobito dan Kecamatan Jombang, dengan masing-masing jumlah peserta 20 orang perempuan dalam waktu 3 hari. Dimana kegiatan ini menghabiskan dan sekitar Rp 24.355.000,00.
5. Kegiatan Pelatihan Pengolahan Pangan Berbahan Dasar Ikan, dilakukan di Kecamatan Jombang dengan jumlah peserta 20 orang perempuan dalam waktu 3 hari. Kegiatan ini menghabiskan dana sekitar Rp 6.208.000,00.
6. Kegiatan pelatihan pengolahan pangan non beras, dilakukan di Kecamatan Ngoro dengan jumlah peserta 20 orang perempuan dalam waktu 2 hari. Kegiatan ini menghabiskan dana sekitar Rp 6.480.000,00.

Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut keluaran yang dihasilkan adalah meningkatnya kinerja P4A, dengan kata lain bahwa semakin mempermudah BPPKB Kabupaten Jombang menjalankan misinya yaitu mewujudkan kesetaraan dan keadilan jender dalam pembangunan. Dengan adanya kegiatan ini tentunya bermanfaat bagi perempuan Kabupaten Jombang (P4A) dimana dapat menciptakan wirausaha baru yang kompeten untuk bersaing. Adapun dampak lain yang dirasakan dari kegiatan ini adalah dapat menyelesaikan permasalahan perempuan terutama di bidang ekonomi.

2) Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha

Merupakan salah satu kegiatan di bidang ekonomi untuk memberdayakan perempuan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk membimbing perempuan agar dapat mengatur perekonomiannya dari sudut pandang usaha yang sedang dijalani. Kegiatan ini dilakukan dengan :

P3EL (Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal)

Kegiatan P3EL di Jawa Timur dilaksanakan sejak tahun 2003 dan sampai dengan tahun 2008 telah menjangkau pada 196 Desa/Kelurahan.

Pada tahun 2009, kegiatan P3EL direncanakan akan dialokasikan pada 38 Desa/Kelurahan. Sebagai upaya untuk meningkatkan peran serta perempuan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi di Pedesaan.

Dengan harapan akan menumbuhkembangkan kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh perempuan dan berbasis pada sumber daya lokal yang tersedia.

a) Pelaksanaan Teknis Operasional P3EL : (Buku Petunjuk Teknis Operasional P3EL Tahun 2009)

1. Ruang Lingkup

Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi

Lokal, meliputi :

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia

- 1) Menumbuhkan semangat kewirausahaan para perempuan yang tergabung dalam kelompok usaha ekonomi produktif.
- 2) Peningkatan wawasan, pengetahuan, kecakapan, keterampilan sehingga menjadi sumber daya yang inovatif, kreatif, produktif serta memiliki tanggung jawab dan disiplin yang tinggi.
- 3) Mendorong tumbuhnya kemandirian serta kesetaraan di dalam berwirausaha guna meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat sekitarnya.

a) Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan

- 1) Menumbuhkembangkan kelembagaan yang dijiwai oleh prinsip kebersamaan dan keserasian untuk mencapai tujuan bersama.
- 2) Menumbuhkan kemitraan dengan lembaga lain atas dasar kesetaraan dan saling menguntungkan.

b) Pengembangan Usaha yang Rasional

- 1) Pengembangan usaha dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal secara efisien dengan menerapkan teknologi tepat guna serta tetap menjaga kelestarian lingkungan.

- 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas produk yang berorientasi pasar.

- 3) Pengembangan akses pasar dan peluang pasar baru.

- 4) Pengembangan sumber-sumber permodalan yang dapat diperoleh dari anggota kelompok maupun pihak lain

c) Manajemen Program

Dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Menjamin terwujudnya prinsip-prinsip pengelolaan Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL).

d) Pendampingan

Dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi Negeri yang memiliki kompetensi pendampingan dalam bentuk : (i) fasilitasi proses kegiatan sesuai dengan mekanisme kegiatan yang telah ditetapkan. Mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban. (ii) fasilitasi pengelolaan (manajemen) kelembagaan dan pengembangan usaha ekonomi produktif. (iii)

fasilitasi perluasan akses dan jaringan kerja UPK dan kelompok Perempuan Usaha Ekonomi Produktif (KP-UEP).

e) Penetapan Lokasi dan Sasaran

1) Penetapan lokasi program P3EL dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur setelah

mendapatkan usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

2) Setiap Kabupaten/Kota mendapat alokasi kegiatan P3EL pada 1 Desa/Kelurahan.

3) Lokasi program P3EL diprioritaskan pada Desa/Kelurahan Gerdu taskin kategori merah/kuning. Desa/Kelurahan miskin menurut *update* kemiskinan Kabupaten/Kota atau lokasi P2WKSS (Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera).

4) Penetapan lokasi program P3EL yang didanai dari APBD provinsi diharapkan didukung oleh kesediaan pemerintah kabupaten/kota untuk mengalokasikan dana penyertaan.

5) Sasaran utama program P3EL adalah kelompok usaha ekonomi produktif perempuan yang memiliki

kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan usahanya.

f) Pendanaan

1) Pendanaan kegiatan untuk masing-masing

Desa/Kelurahan, lokasi maupun Biaya Operasional

Program (BOP) bersumber dari Pemerintah Provinsi

Jawa Timur dan dana penyertaan dari APBD

Kabupaten/ Kota. Dana APBD Provinsi

dipergunakan untuk :

a. Kegiatan pengembangan usaha bagi

Desa/Kelurahan Kabupaten/Kota sebesar

Rp. 25.000.000,00. Dana kegiatan dipergunakan

untuk Usaha Simpan Pinjam (USP) khusus

perempuan yang dikelola oleh UPK.

b. Biaya Operasional Program (BOP) sebesar

Rp. 5.000.000,00. Proporsi penggunaan BOP

denga rincian :

a. BOP Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota

sebesar Rp. 3.000.000,00

b. BOP Tenaga Fasilitas Kecamatan sebesar

Rp, 500.000,00

c. BOP Tim Pelaksana pada tingkat Pemerintah

Desa/Kelurahan sebesar Rp. 500.000,00

d. BOP UPK sebesar Rp. 1.000.000,00

c. Dana penyertaan (*sharing*) dari Pemerintah Kabupaten/Kota dipergunakan untuk :

Biaya Operasional Program (BOP) Tim Pembina pada Tingkat Kabupaten/Kota, Tenaga Fasilitasi Kecamatan (TFK), tim Pembina pada tingkat desa/kelurahan dan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Sedangkan proporsi penggunaan dana *sharing* diatur oleh pemerintah kabupaten/kota.

g) Prinsip-prinsip

1) Desentralisasi

Dalam rangka mewujudkan desentralisasi P3EL, maka pemerintah menyerahkan wewenang penuh kepada masyarakat untuk :

- a. Memanfaatkan dan mengelola dana P3EL
- b. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang dibiayai oleh dana P3EL
- c. Mempertanggungjawabkan pengelolaan dan P3EL

2) Keterbukaan

Segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan P3EL terbuka untuk umum. Keterbukaan tersebut bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam hal :

- a. Mengambil keputusan yang berkaitan dengan P3EL. Misalnya menentukan jenis kegiatan dan mengelola dana P3EL
- b. Memperoleh informasi secara lengkap dan terus-menerus tentang segala sesuatu yang menyangkut P3EL
- c. Menumbuhkembangkan kepedulian dan partisipasi perempuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan
- d. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan P3EL
- e. Meningkatkan kepercayaan diantara sesama pelaku P3EL

3) Partisipatif

Pengertian partisipatif dalam P3EL adalah adanya keterlibatan perempuan secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan P3EL. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan serta pelestarian dan pengembangan kegiatan.

4) Keterlibatan Perempuan

P3EL mengharuskan adanya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan pada semua tahap

perencanaan dan pelaksanaan program. Agar tidak memarjinalkan perempuan.

5) Swadaya

Adalah kemauan dan kemampuan masyarakat yang disumbangkan secara sukarela sebagai bagian dari rasa ikut memiliki terhadap P3EL. Swadaya dapat diwujudkan dengan menyumbangkan tenaga, dana maupun material untuk pelaksanaan kegiatan.

6) Perguliran dana

Adalah batuan permodalan bagi kelompok perempuan usaha ekonomi produktif P3EL yang dipergunakan sebagai usaha simpan pinjam yang dikelola oleh UPK dan nantinya apabila usaha simpan pinjam tersebut sudah berkembang harus digulirkan kepada kelompok lain yang membutuhkan di Desa/Kelurahan yang sama sesuai dengan musyawarah Desa/Kelurahan.

7) Sanksi

a. Adalah hukuman terhadap pelanggaran kesepakatan dan peraturan yang telah dibuat dalam kelompok P3EL.

b. Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab berbagai pihak terkait dalam pengelolaan kegiatan P3EL.

c. Sanksi dapat ditetapkan oleh pemerintah maupun masyarakat.

5) Organisasi Pelaksana Program

Organisasi pelaksana P3EL pada hakekatnya merupakan struktur hierarki atau hubungan tugas dan tanggungjawab yang disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan P3EL.

Struktur organisasi tersebut telah mempertimbangkan kebutuhan lingkup kerja serta mekanisme dari kegiatan P3EL.

a) Organisasi Pelaksana Provinsi

1. Tim Pelaksana P3EL Provinsi

Adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur. yang memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- 1) Membuat Pedoman Umum P3EL
- 2) Membuat Petunjuk Teknis Operasional P3EL
- 3) Melakukan identifikasi lokasi P3EL
- 4) Menyelenggarakan pendidikan kemasyarakatan P3EL
- 5) Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi P3EL

6) Melaporkan pelaksanaan kegiatan P3EL kepada Gubernur

2. Organisasi Pelaksana Kabupaten/ Kota

a. SKPD/Tim Pelaksanan P3EL Kabupaten/Kota

Adalah pelaksanan kegiatan P3EL yang dibentuk oleh

Bupati / Walikota, kepala badan/dinas/kantor yang

membidangi P3EL. SKPD / Tim pelaksana ini diketuai

oleh pejabat pada badan/dinas/kantor yang membidangi

P3EL di Kabupaten / Kota. Beranggotakan pejabat dan

staf pada unit kerja badan/dinas/kantor yang

membidangi P3EL. Dengan tugas dan tanggungjawab :

1) Melaksanakan sosialisasi P3EL di tingkat

Kecamatan dan Desa/Kelurahan

2) Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi

P3EL

3) Melaporkan pelaksanaan P3EL secara periodik ke

provinsi

4) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam

rangka menunjang pelaksanaan kegiatan P3EL

5) Menganggarkan dana *sharing* / penyertaan sebagai

penunjang pelaksanaan kegiatan P3EL

6) Melakukan koordinasi ke Provinsi dalam hal

pelaksanaan kegiatan

b. Tenaga Fasilitas Kecamatan(TFK)

Merupakan bagian dari pelaksana Kabupaten / Kota yang berada di Kecamatan. Bertugas memberikan bimbingan, monitoring serta bantuan teknis yang diperlukan guna mendukung kelangsungan pelaksanaan kegiatan. TFK berada di bawah tanggung jawab Camat.

Dalam pelaksanaannya dapat menugaskan Kasi(Kepala Seksi) Pemberdayaan Perempuan. Dengan tugas dan tanggung jawab meliputi :

- a. Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi di Desa / Kelurahan bersama dengan pendamping
- b. Bersama dengan pendamping memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- c. Membantu tim pelaksana Kabupaten / Kota dalam pembinaan, monitoring pelaksanaan dan perkembangannya
- d. Melaporkan kegiatan fasilitasi yang telah dilaksanakan kepada Tim Pelaksana Kabupaten / Kota secara berkala

3. Organisasi Pelaksana Desa/ Kelurahan

a. Pemerintah Desa/ Kelurahan

Kepala Desa / Kelurahan sebagai unsur Pembina pada tingkat Desa / Kelurahan. Bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap pelaksanaan P3EL di Desa/ Kelurahan. Menjamin pemanfaatan dana bantuan P3EL tepat sasaran serta bertanggung jawab terhadap keberlanjutan kegiatan.

b. Unit Pengelola Keuangan (UPK)

Adalah pelaksanaan program P3EL di Desa / Kelurahan yang mengelola kegiatan ekonomi produktif khusus perempuan. UPK dibentuk melalui musyawarah Desa / Kelurahan khusus perempuan. Ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes). Sedangkan untuk kelurahan ditetapkan melalui Keputusan Walikota / Bupati. UPK sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Pengurus UPK dipilih berdasarkan kriteria :

1) Warga desa perempuan setempat yang

dikenal jujur, kreatif dan bertanggungjawab.

2) Mempunyai kemampuan pengelolaan

keuangan

3) Bukan aparat pemerintah desa / kelurahan /

anggota BPD

- 4) Tidak ada hubungan keluarga dengan
kepada desa / lurah

Tugas dan tanggungjawab UPK meliputi :

1. Bersama dengan pendamping memfasilitasi identifikasi kebutuhan untuk menggali dan menyusun usulan kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat
2. Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah desa/ kelurahan
3. Memfasilitasi pembentukan Kelompok Perempuan Usaha Ekonomi Produktif (KP-UEP). Melayani permohonan pinjaman yang diusulkan oleh KP-UEP
4. Melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha calon penerima. Menetapkan persetujuan pinjaman yang diusulkan oleh KP-UEP
5. Menyusun dan menetapkan berbagai aturan yang diperlukan, terutama yang berkaitan dengan kegiatan simpan pinjam
6. Bertanggungjawab terhadap pengembalian dana pinjaman dari KP-UEP sesuai akad pinjaman
7. Membukukan secara teratur, tertib, dan rapi semua transaksi UPK
8. Melaporkan proses pelaksanaan, hasil kegiatan dan realisasi penggunaan dana maupun perkembangan usaha kepada Tim Pelaksana Kabupaten / Kota dibantu pendamping dan TFK secara berkala

c. Kelompok Perempuan Usaha Ekonomi Produktif (KP-UEP)

Merupakan himpunan dari beberapa perempuan pelaku ekonomi mikro yang bersepakat untuk memperoleh pinjaman dari UPK sesuai dengan kebutuhannya. Satu KP-UEP beranggotakan 6-12 orang yang dibentuk secara sukarela berdasarkan kesamaan bidang usaha. Tugas dan tanggung jawab KP-UEP :

- 1) Membuat dan menyepakati aturan kelompok
- 2) Melaksanakan kesepakatan dengan UPK, khususnya berkaitan dengan ketentuan pinjaman
- 3) Bertanggungjawab terhadap pengembalian pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kelompok
- 4) Mencatat kegiatan dan keuangan kelompok P3EL
- 5) Melakukan koordinasi dan melaporkan perkembangan kegiatan ke UPK
- 6) Menyertakan tabungan wajib atau penyertaan modal minimal Rp 5.000,00. Pembayaran diserahkan pada ketua UPK.

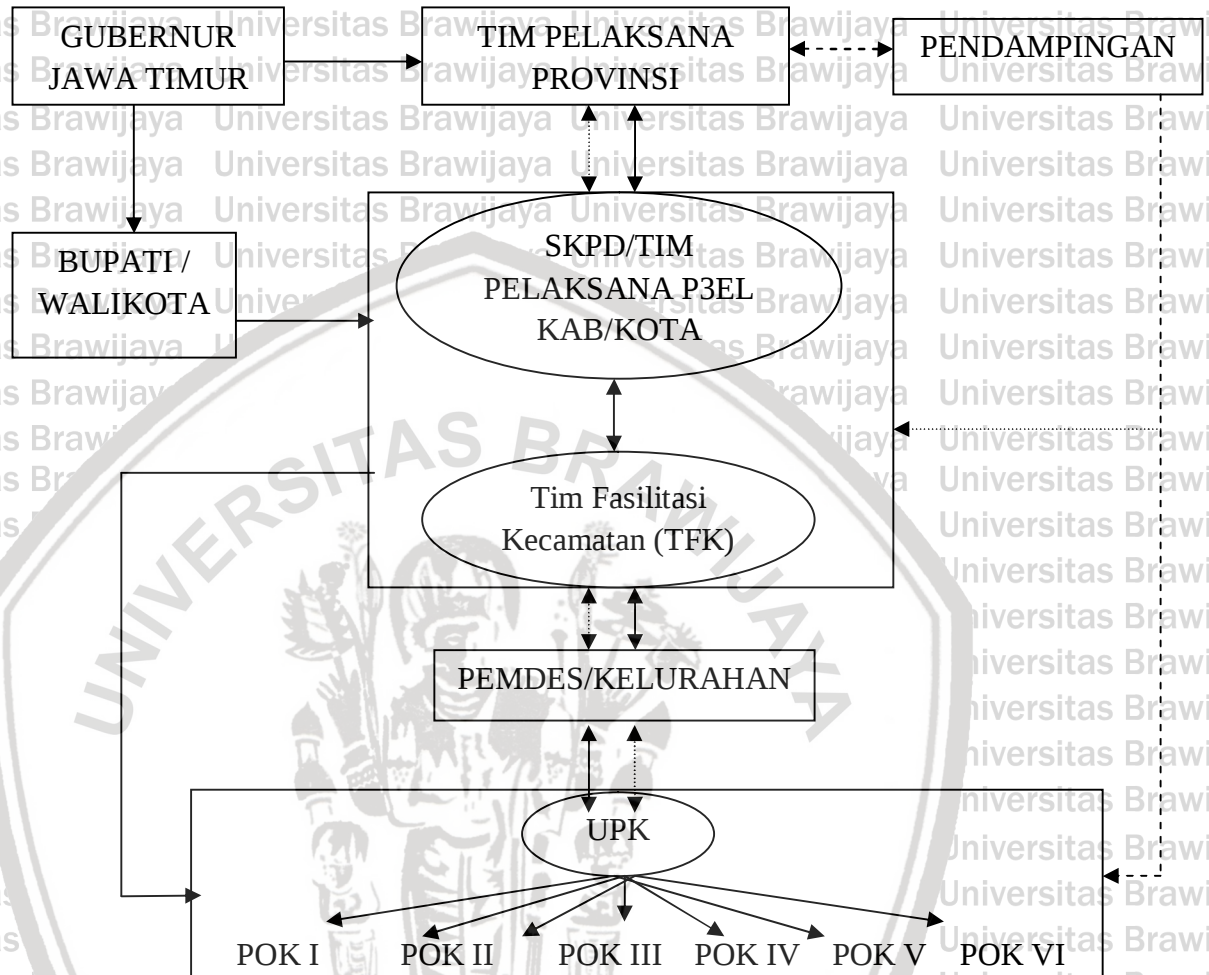
d) Pendamping

Pendamping P3EL berasal dari perguruan tinggi negeri yang memiliki kompetensi pendampingan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur

Tugas dan tanggung jawab pendamping :

- 1) Bertanggung jawab memfasilitasi seluruh kegiatan pendampingan di Desa/ Kelurahan lokasi P3EL
- 2) Melakukan fasilitasi pembentukan dan pengoptimalan fungsi dan peran Unit Pengelola Keuangan (UPK)
- 3) Memfasilitasi UPK dalam penyusunan proposal kegiatan
- 4) Melakukan fasilitasi dan pembinaan KP-UEP terutama pada aspek Kelembagaan dan Pengembangan Usaha
- 5) Mewujudkan pengembangan potensi ekonomi dan produk unggulan Desa/ Kelurahan
- 6) Melaporkan hasil kegiatan pendampingan ke Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur minimal 3 kali dalam setahun.

Gambar 5: Struktur Organisasi Pelaksana P3EL



Sumber : Petunjuk Teknis Operasional P3EL Tahun 2009

Keterangan :

— Garis hubungan struktural

..... Garis hubungan konsultasi atau koordinasi

- - - - - Garis hubungan fasilitasi dan pendampingan

4) Mekanisme Kegiatan

a) Persiapan

Kegiatan persiapan meliputi : a) penetapan lokasi P3EL, b) seleksi pendamping, c) pendidikan kemasyarakatan dalam rangka mendukung P3EL tingkat Kabupaten/ Kota.

b) Perencanaan

Perencanaan kegiatan P3EL merupakan tahapan kegiatan yang bertujuan untuk menyusun usulan kegiatan secara partisipatif. Melalui musyawarah Desa/Kelurahan khusus perempuan.

c) Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan adalah tahap melaksanakan seluruh rencana yang telah disepakati dalam musyawarah Desa/Kelurahan khusus perempuan. Tahap ini dimulai dari pencairan dana, pelaksanaan kegiatan sampai pembuatan laporan.

d) Monitoring dan evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan pelaksanaan tetap sesuai dengan rencana yang disepakati.

Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan dengan kunjungan langsung. Melalui mekanisme pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

b) Pelaksanaan Kegiatan P3EL di Lapangan

Salah satu sasaran Pembangunan Nasional adalah peningkatan kualitas perempuan sebagai sumber daya

pembangunan yang mampu berperan aktif dalam berbagai aspek pembangunan. Pembangunan yang mengarah pada peningkatan

pengetahuan, keterampilan, kesehatan, perbaikan gizi mendukung

kemampuan perempuan serta peningkatan kualitas kelembagaan

dan organisasi perempuan perlu digalakkan. Sejalan dengan hal

tersebut sejak tahun 2003 Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Badan

Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur telah

melaksanakan P3EL (Pemberdayaan Perempuan Pengembang

Ekonomi Lokal). Salah satu isu dalam meningkatkan peran

perempuan dan pembangunan pedesaan adalah melalui

pengembangan kelembagaan dan usaha ekonomi produktif.

Dimana dikelola oleh perempuan. Dengan harapan memberikan

peningkatan pendapatan untuk kesejahteraan keluarga yang pada

akhirnya, akan meningkatkan posisi perempuan menuju kesetaraan

jender.

Pelaksanaan P3EL ini telah diterapkan di seluruh Jawa

Timur, termasuk Kabupaten Jombang. Kegiatan ini dilakukan oleh

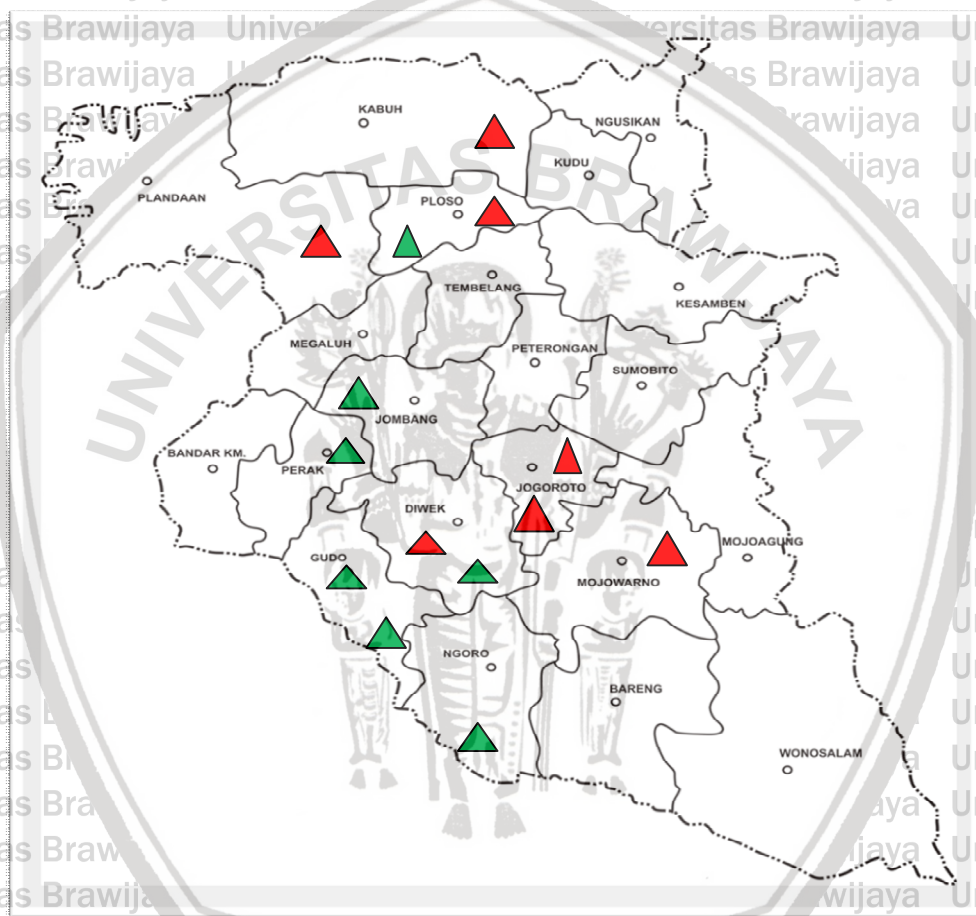
Kabupaten Jombang dibawah naungan Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang sejak

tahun 2003 tepatnya di Desa Alang-Alang, Kecamatan Jogoroto.

Kemudian kegiatan P3EL ini dilakukan secara berkelanjutan setiap tahunnya hingga saat ini pada tahun 2012 tepatnya di Desa Gedongombo Kecamatan Ploso. Hal tersebut dapat digambarkan seperti peta di bawah ini :

Gambar 6: PETA Lokasi P3EL Di Kabupaten Jombang



Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang Tahun 2012

KETERANGAN :



APBD I (Provinsi)



APBD II (Kabupaten)

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Ds. Alang-alang Kec. Jogoroto 2003 | 1. Ds. Temuwulan Kec. Perak 2007 |
| 2. Ds. Purisemanding Kec. Plandaan 2004 | 2. Ds. Krembangan Kec. Gudo 2007 |
| 3. Ds. Jatigedong Kec. Ploso 2005 | 3. Ds. Balongbesuk Kec. Diwek 2008 |
| 4. Ds. Rejoslamet Kec. Mojowarno 2006 | 4. Ds. Jombok Kec. Ngoro 2009 |
| 5. Ds. Genengan Jasem Kec. Kabuh 2007 | 5. Ds. Sepanyul Kec. Gudo 2010 |
| 6. Ds. Sumbermulyo Kec. Jogoroto 2008 | 6. Ds. Banjardowo Kec. Jombang 2011 |
| 7. Ds. Pandanwangi Kec. Diwek 2009 | 7. Ds. Gedongombo Kec. Ploso 2012 |

Kegiatan P3EL di Kabupaten Jombang telah diterapkan di 14 Desa, dan 10 Kecamatan. Diantara ke-14 Desa tersebut, peneliti menfokuskan pada Desa Genengan Jasem, Kecamatan Kabuh.

Dikarenakan di Desa ini kegiatan P3EL berhasil diterapkan sehingga dapat menjadi juara 1 Kabupaten (Laporan Monitoring BPPKB Kabupaten Jombang Tahun 2011).

Penerapan P3EL di Desa Genengan Jasem telah dilakukan sejak tanggal 15 Desember 2007. Berdasarkan dengan petunjuk teknis operasional P3EL, Desa ini mendapatkan bantuan modal sebesar Rp 25.000.000,00. Desa ini mendapatkan bantuan dari APBD I yaitu berasal dari provinsi. Dengan alasan, desa Genengan Jasem termasuk desa dengan kategori merah atau miskin/tertinggal. Selain itu, desa ini pada awalnya telah melakukan kegiatan wirausaha yaitu dengan membuat anyaman pandan dimana pelakunya adalah para perempuan.

Kaum perempuan sudah sejak dulu melakukan kegiatan ini. Dikarenakan pendapatan suami mereka kurang mencukupi kebutuhan perekonomian keluarga. Terkait penghasilan kaum pria ditunjukkan dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp 500.000, 00 s/d Rp 750.000,00 (Proposal Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal Desa Genengan Jasem Tahun 2007).

Dan di Desa Genengan Jasem memiliki potensi sumber daya alamnya berupa tanaman pandan berduri (Hasil Survei BPPKB

Kabupaten Jombang Tahun 2007). Hal tersebut yang menjadi faktor Badan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Jombang menerapkan kegiatan P3EL di Desa Genengan Jasem, Kecamatan Kabuh.

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang, tidak hanya memberikan modal. Namun juga melakukan pembinaan berupa pemberian materi terkait dengan kreatifitas dalam menganyam. Dimana kegiatan tersebut mendatangkan pemateri dari Gresik. Dengan tujuan untuk memberitahukan pada masyarakat setempat terutama kaum perempuan yang berkecimpung dalam pembuatan anyaman tersebut, agar dapat mengembangkan ide untuk kemajuan hasil produksinya. Kegiatan P3EL ini agar dapat berjalan dengan baik maka diperlukan penguatan kelembagaan. Hal ini bermakna bahwa BPPKB Kabupaten Jombang melakukan kerjasama dengan perangkat desa atau tim pelaksana desa setempat dan para pelaksana tingkat Kecamatan serta pendamping.

Mekanisme dana bantuan tersebut adalah dengan terjadinya perguliran dana, yaitu dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Di Desa Genengan Jasem ini pada awalnya terdapat 7 kelompok yang masing-masing terdiri dari 10 orang. Namun dengan seiring berjalannya waktu dan terjadinya perkembangan modal yang awalnya Rp 25.000.000 menjadi Rp 52.239.758. Maka terjadinya

penambahan kelompok yaitu 12 kelompok (Laporan Monitoring P3EL Desa Genengan Jasem Tahun 2011). Sesuai dengan petunjuk teknis operasional kegiatan P3EL di Desa ini, modal yang diberikan tersebut dibagi ke dalam kelompok-kelompok. Dengan acuan bahwa modal tersebut sebagai pinjaman yang berbunga 1%. Dengan bunga 1% tersebut maka dana dapat digulirkan kelompok lainnya. Sehingga mampu menghasilkan tambahan kelompok pada kegiatan tersebut. Begitu seterusnya terkait dengan mekanisme perguliran dana (Laporan Monitoring P3EL Desa Genengan Jasem Tahun 2011). Disamping itu, biaya operasional pengurus sejak tahun 2007 s/d 2011 sebesar 11. 525. 540,00 (Laporan Monitoring P3EL Desa Genengan Jasem Tahun 2011).

Permasalahan dana atau keuangan atau perguliran dana yang bertanggungjawab adalah UPK (Unit Pengelola Keuangan). Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana bekerja sama dengan itu untuk masalah pelaporan keuangan. Selain itu, untuk melakukan survei lapangan atau memantau kegiatan P3EL, BPPKB Kabupaten Jombang bekerja sama dengan PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana). Hal tersebut ditujukan agar supaya mempermudah tim pelaksanaan Kabupaten dalam hal ini BPPKB Kabupaten Jombang untuk memberikan laporan dan koordinasi dengan provinsi setiap 1 tahun sekali.

Adapun laporan monitoring dan evaluasi P3EL Desa
Genengan Jasem Tahun 2011 :

Monitoring P3EL di desa Genenganjasem dilaksanakan
pada hari rabu, tanggal 21 Desember 2011. Desa Genenganjasem
yang berada di wilayah Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang,
termasuk salah satu desa penerima dana bantuan P3EL dari APBD
Tingkat I pada tahun 2007 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh
lima juta rupiah).

Berdasarkan hasil monitoring di lapangan, dapat dilaporkan :

- 1) Dana bergulir diberikan kepada 12 kelompok, yang masing-masing kelompok terdiri dari 10 anggota, jadi total penerima dana bergulir P3EL sebanyak 120 orang
- 2) Dana bergulir yang diberikan dengan bunga sebesar 1,5 %, dengan perincian 1 % dimasukkan kembali ke dalam modal dan 0,5 % digunakan untuk dana operasional pengurus
- 3) Dana pinjaman diangsur setiap bulan dengan lama pinjaman 10 bulan (10 x)
- 4) Pengguliran dana saat ini dilakukan secara berjenjang (Skala 1 s/d 10), dimana setiap bulan ada kelompok yang pinjamannya lunas, dan setiap bulan ada kelompok baru yang menerima pinjaman
- 5) Pencatatan pembukuan sudah cukup baik dan rapi dan setiap bulan bisa melaporkan kondisi keuangan terakhir

- 6) Dari dana sebesar Rp. 25.000.000,00 yang digulirkan pada tahun 2007, berkembang menjadi Rp. 52.239.758,00 pada bulan Desember 2011 (belum di potong pengeluaran)
- 7) Biaya operasional pengurus sejak tahun 2007 s/d 2011 sebesar Rp. 11.525.540,00. Dana bersih yang bergulir Rp. 52.239.758,00 - Rp. 11.525.540,00 = Rp. 40.714.218,00
- 8) Penerima dana P3EL, sebagian besar adalah pengrajin tikar (dari daun pandan), dan beberapa usaha lain seperti Toko Pracangan, Warung, dan ada juga yang sudah menjadi pengepul tikar untuk dikirim ke luar kota.
- 9) Dari 12 kelompok yang ada, ada 1 kelompok yang proses pengembalian pinjaman tidak lancar yaitu TASMI dikarenakan sakit. Berhubung TASMI adalah ketua kelompok, akibatnya seluruh anggota kelompok juga tidak lancar. Meskipun demikian suami dari Ny TASMI sudah menyatakan kesanggupannya untuk membayar cicilan semampunya. Untuk menjaga kelangsungan usaha (anyaman tikar) di Desa Genenganjsem dilakukan pelatihan membuat tikar berkualitas yang bekerjasama dengan Deperindag Kab. Jombang. Pelatihan dilaksanakan bulan Oktober 2011.

Evaluasi :

- 1) Dana operasional sebesar Rp. 11.525.540,00 ternyata sudah melebihi jatah 0,5 % dari bunga. Besarnya bunga adalah

$$\text{Rp. } 52.239.758,00 - \text{Rp. } 25.000.000,00 = \text{Rp. } 27.239.758,00$$

$$1/3 \times \text{Rp. } 27.239.758,00 = \text{Rp. } 9.079.919,00$$
 Pengeluaran pengurus = Rp. 11.525.540,00. Kelebihan pengeluaran = Rp. 11.525.540,00 - Rp. 9.079.919,00 = Rp. 2.445.621,00. Meskipun pengeluaran ini melebihi jatah yang seharusnya, namun semua pengeluaran yang dilakukan sudah sepengetahuan dan seijin Kepala Desa.

Berdasarkan data tersebut, direkomendasikan :

- Untuk tahun 2012, diharapkan dana operasional yang dikeluarkan seminimal mungkin, hal ini dimaksudkan untuk menutupi pengeluaran yang sudah melebihi batas pada tahun 2011. Sehingga diharapkan pada akhir tahun 2012, besarnya total pengeluaran untuk dana operasional tidak melebihi dari jatah yang ada (0,5 % dari bunga)

- 2) Untuk kelompok Tasmi yang tidak lancar proses pengembalian pinjamannya, disarankan untuk mengganti ketua kelompok (Tasmi), sehingga anggota kelompok lebih semangat dan pembayaran cicilan dapat berjalan normal.

3) Evaluasi untuk dana pinjaman. Pinjaman yang diterima oleh anggota, banyak yang tidak digunakan untuk proses pengembangan usaha, tetapi digunakan untuk keperluan yang lain (perbaikan rumah, bayar sekolah, keperluan rumah tangga lain). Hal ini terjadi karena anggota merasa pengembangan usahanya sudah maksimal. Misalnya untuk pengrajin tikar, produksi ditingkatkan, mereka kesulitan dengan pemasarannya. Untuk itu diperlukan pembinaan secara menyeluruh terhadap para pengrajin, mulai dari masalah bahan baku, proses pembuatan, sampai pada pemasaran hasil produksi, dan modal usaha yang lebih besar.

3) Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Pemberian Keterampilan

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang melakukan segala upaya agar dapat mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender khususnya bidang ekonomi. Seperti yang telah tertuang pada pembasan sebelumnya terkait kegiatan P3EL. Upaya atau kegiatan yang dilakukan BPPKB Kabupaten Jombang lainnya adalah dengan kegiatan pemberdayaan perempuan pemberian keterampilan.

Kegiatan ini ditujukan agar kaum perempuan memiliki keterampilan yang baik. Dimana potensi yang tersimpan pada diri

perempuan dapat dikembangkan. Pengembangan potensi perempuan ini adalah wujud nyata dari pemberdayaan perempuan agar supaya perempuan lebih berkualitas dan dapat turut serta dalam pembangunan.

Pelaksanaan kegiatan pemberian keterampilan ini dilakukan BPPKB Kabupaten Jombang dengan berbagai bentuk kegiatan maupun sosialisasi. Adapun jenis kegiatan pemberian keterampilan sepanjang tahun 2011-2012 adalah sebagai berikut :

- a. Pelatihan dan Sosialisasi Aneka Olahan Ikan
- b. Pelatihan Keterampilan Anyaman Bambu
- c. Pelatihan Keterampilan Pangan Non Beras
- d. Pelatihan Merajut Benang
- e. Pelatihan Pembuatan Kue Kering

Dalam pelaksanaan kegiatan BPPKB bekerjasama dengan sejumlah pemateri-pemateri yang ahli di bidangnya. Seperti halnya dalam pelatihan pengolahan aneka ikan menghadirkan pemateri dari dinas peternakan dan perikanan Kabupaten Jombang, pada kegiatan anyaman bambu menghadirkan pemateri pengrajin dari Gresik. Para peserta diberi materi penyuluhan berupa *handout*, dan disediakan konsumsi. Peserta kegiatan pemberdayaan perempuan pemberian keterampilan adalah semua kaum perempuan yang ada di Jombang. Baik yang berasal dari perempuan P3EL, anggota P2WKSS, dan P4A (Pembentukan Pusat Pelayanan Pemberdayaan

Perempuan dan Anak). Kegiatan ini dipergunakan untuk para perempuan yang memiliki permasalahan ekonomi maupun yang ingin menjadi seorang wirausaha.

Tentang permasalahan dana, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang memperoleh dari APBD Kabupaten. Untuk menentukan lokasi dan tempat dilaksanakan pelatihan tersebut, berpedoman pada DPA (Dokumen Perencanaan Anggaran) SKPD BPPKB Kabupaten Jombang.

b. Kesesuaian TUPOKSI(Tugas Pokok dan Fungsi) dengan Implementasi

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, dan *legitimate*. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasiguna, dan bertanggungjawab. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun

1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara untuk dapat mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Perencanaan strategik adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Proses ini menghasilkan rencana strategik instansi pemerintah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi. Dimana terdiri atas kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Dengan landasan berpikir dan dasar ketentuan peraturan perundangan tersebut, maka Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang dapat mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Melalui penerapan sistem akuntabilitas instansi pemerintah, menetapkan rencana strategik 2009-2013.

Adapun tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang tepatnya pada subbidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pengarusutamaan Gender meliputi (Peraturan Bupati Jombang Nomor 6 Tahun 2009) :

Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana :

- c. Penyusunan program pembangunan dibidang Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
- d. Koordinasi dan penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan program pembangunan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera
- e. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi serta melaksanakan koordinasi dibidang pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera
- f. Penyelenggaraan peningkatan peran serta masyarakat dan keluarga dibidang pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera
- g. Penyelenggaraan pembinaan, pemantauan dan pengembangan terhadap program pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera
- h. Pemberian rekomendasi pengembangan modal Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
- i. Penyelenggaraan pengawasan melekat administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan perbekalan serta evaluasi pelaporan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Tugas dan Fungsi Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup

Perempuan dan Pengarusutamaan Gender yaitu :

- 1) Menyiapkan dan menganalisis data dalam penetapan kebijakan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan guna terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender
- 2) Menyusun dan melaksanakan program peningkatan kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan gender perempuan dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya
- 3) Melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan melalui peningkatan sumberdaya manusia dan pelatihan ketrampilan.
- 4) Melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan peranan perempuan sebagai pengambil keputusan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender
- 5) Memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas peran pusat studi wanita (PSW), organisasi masyarakat / LSM pemerhati perempuan dan dunia usaha
- 6) Memfasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin

- 7) Melakukan analisis jender, perencanaan anggaran, yang responsif jender, dan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi pengarusutamaan jender (KIE PUG)
- 8) Melaksanakan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya
- 9) Mengembangkan usaha pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga serta masyarakat melalui kegiatan P2WKSS (Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera) dan P3EL (Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal)
- 10) Melaksanakan pembinaan, sosialisasi dan implementasi program peningkatan kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan jender
- 11) Menyiapkan bahan koordinasi dengan komponen terkait dalam rangka mengembangkan pelaksanaan pengarusutamaan jender
- 12) Melaksanakan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan program serta pelaporan terhadap dampak, perkembangan program peningkatan kualitas hidup dan pengarusutamaan jender

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang, pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Menyempit pada subbidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pengarusutamaan Gender. Bahwasannya instansi tersebut telah melakukan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2009.

Implementasi tersebut nampak pada segala bentuk program dan kegiatan yang dilakukan oleh BPPKB Kabupaten Jombang. Penerapan program dan kegiatan untuk dapat mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender disegala bidang telah dilakukan oleh instansi tersebut. Dalam hal ini peneliti lebih menfokuskan pada wujud pelaksanaan keadilan dan kesetaraan gender bidang ekonomi. Hal tersebut dilakukan oleh BPPKB Kabupaten Jombang yaitu dengan adanya program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan yang terwujud dalam kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha dan kegiatan Pemberdayaan Perempuan Pemberian Keterampilan. Dimana pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan kegiatan pelaksanaan P3EL (Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal) dan sosialisasi serta bentuk pelatihan keterampilan bagi perempuan yang beranggotakan P4A (Pembentukan Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak). Adapun anggota P4A adalah Ibu PERSIT (Persatuan Istri Tentara), Bayangkari, Muslimat, Aisiyah, Komunitas Janda, Pusat Studi Wanita (PSW) dan lain sebagainya. Wujud dari pada

bentuk pelatihan keterampilan tersebut telah dilakukannya bentuk keterampilan dalam pengelolaan aneka olahan ikan, pelatihan anyaman bambu dan pelatihan keterampilan pangan non beras.

Sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan P3EL (Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal), diturunkan dengan wujud pemberian modal yang berasal dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten. Hal ini ditujukan untuk Desa/ Kelurahan yang memiliki potensi sumber daya alam dan para perempuan yang telah berwirausaha.

Dengan kriteria bagi Desa/ Kelurahan yang menerima bantuan modal tersebut adalah desa merah/kuning. Merupakan desa miskin dan tertinggal. Dalam prakteknya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang membentuk suatu pendamping untuk memantau dan memonitoring kegiatan pelaksanaan P3EL dilapangan yaitu PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana). Dimana pendampingan ini berfungsi untuk melaporkan dan membina dalam kegiatan P3EL pada tim pelaksana Kabupaten/ Kota. Dalam rangka untuk memonitoring perkembangan modal dan usaha Kabad BPPKB Kabupaten Jombang menunjuk petugas dengan berdasarkan keputusan Kepala Badan Nomor 188/4.45/1581/415.41/2011 tentang penunjukkan Petugas Pelaksana di Kabupaten Jombang.

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang, memilih lokasi untuk pelaksanaan kegiatan berdasarkan DPA (Dokumen Perencanaan Anggaran) SKPD BPPKB

Kabupaten Jombang dan pelaksanaan survei lapangan oleh petugas yang berasal dari perwakilan BPPKB Kabupaten Jombang. Terkait dengan modal yang berasal dari APBD Provinsi dan Kabupaten ini, syarat akan ketentuan. APBD I (Provinsi) diberikan untuk Desa/ Kelurahan yang menjadi anggota P3EL sebesar Rp. 25.000.000,00. Sedangkan dan APBD II (Kabupaten) diberikan pada Desa/Kelurahan anggota P2WKSS (Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera).

P2WKSS ini merupakan salah satu program Peningkatan Peranan Wanita Dalam Pembangunan, yang berupaya untuk mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam serta lingkungan, untuk mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat dan bahagia. Dalam rangka pembangunan masyarakat desa/kelurahan dengan perempuan sebagai penggeraknya. Kegiatan penilaian ini merupakan hasil dari pembinaan Tim Daerah dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan perempuan di suatu Desa/Kelurahan. Sasaran program P2WKSS adalah keluarga dengan tingkat kesejahteraan tergolong rendah dalam kategori keluarga pra sejahtera serta keluarga sejahtera utamanya yang rawan sosial, ekonomi, kesehatan dan pendidikan.

Terkait dengan permasalahan pemasaran hasil produksi para perempuan yang kreatif tersebut adalah masih mencakup lingkup lokal.

Dari segi pelaporan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang sebagai Tim pelaksana Kabupaten

memberikan laporan pada tim pelaksana provinsi setiap 3 bulan sekali terkait dengan monitoring, pemantauan kegiatan dan keuangan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesetaraan Gender

a. Faktor Pendukung

Hal yang menjadi faktor pendukung Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang (Kassubid Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pengarusutamaan Gender) :

1) Internal

a) Dari segi anggaran : dimana anggaran berasal dari bantuan APBD 1, dan APBD (Anggaran Perencanaan Belanja Daerah) II, yaitu dari Kabupaten Jombang. Pemberian dana ini melalui DPA (Dokumen Perencanaan Anggaran) SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) BPPKB (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana) Jombang, sebesar kurang lebih Rp 600.000.000,00.

b) Memiliki Sumber Daya Manusia, 1 orang Kepala Bidang, 2 orang Kepala SubBidang, 4 orang staf.

c) Dari segi sarana dan prasarana : difasilitasi dengan 2 mobil dinas, masing-masing pegawai diberi motor

dinas, dan mendapatkan literatur untuk panduan pelaksanaan materi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan.

2) Eksternal

- a) Antusiasme masyarakat Jombang khususnya anggota P4A (Pembentukan Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dan kaum perempuan.
- b) Adanya tim fasilitator Pengarusutamaan gender yang membantu dalam pelaksanaan program baik itu sosialisasi maupun *workshop* kelembagaan pada 51 SKPD Kabupaten Jombang.
- c) Dukungan dari organisasi perempuan dan PSW (Pusat Studi Wanita) yang beranggotakan para akademisi perempuan di Kabupaten Jombang.
- d) Kerjasama yang baik dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) pemerhati perempuan seperti ; KPI (Koalisi Perempuan Indonesia cabang Jombang), WCC (*Women Crisis Centre*), Narisakti Jombang.

b. Faktor Penghambat

Hal yang menjadi faktor penghambat Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang
(Kassubid Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan
Pengarusutamaan Jender):

1) Internal

Dengan jumlah SDM yang tersedia yaitu 7 orang, menjadikan suatu hambatan tersendiri. Hal ini dikarenakan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan sangat banyak.

2) Eksternal

- a. Dari segi pendidikan : tingkat pemahaman masyarakat terkait dengan keadilan dan kesetaraan jender kurang.
- b. Dari segi ekonomi : dalam pengembangan ekonomi lokal kurang permodalan untuk mengembangkan kearifan lokal.
- c. Dari segi teknologi dan informasi : masih dirasa kurang, tidak adanya pemanfaatan teknologi secara benar. Masyarakat masih sangat tradisional.
- d. Dari segi budaya : masyarakat tidak ingin berkembang atau maju, dikarenakan masih adanya pemikiran yang tradisional. Dalam arti tidak memikirkan kearah depan namun hanya terpacu pada pemikiran sesaat saja.

C. Analisis

Kata pembangunan sudah menjadi kata kunci dalam segala hal.

Secara umum, kata ini diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Ada banyak sekali bidang pembangunan yang menjadi tujuan dari pembangunan itu sendiri baik di bidang ekonomi, infrastruktur, ataupun sumber daya manusia.

Bagaimanapun juga, pembangunan juga harus diarahkan dan ditujukan pada pembangunan sumber daya manusia, dimana nantinya akan mendorong lahirnya manusia yang kreatif dan mandiri serta mempunyai inisiatif dan dapat memecahkan berbagai macam permasalahan (Arief Budiman, 1995:55). Siagian (1994:90) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”.

Beberapa ahli menganjurkan bahwa pembangunan suatu daerah harus mencakup tiga inti nilai (Kuncoro, 2000:43):

- a. Ketahanan (*Sustenance*): kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok(pangan,papan, kesehatan, dan proteksi) untuk mempertahankan hidup.
- b. Harga diri (*Self Esteem*): pembangunan haruslah memanusiakan orang. Dalam arti luas pembangunan suatu daerah haruslah

meningkatkan kebanggaan sebagai manusia yang berada di daerah itu.

- c. *Freedom from servitude*: kebebasan bagi setiap individu suatu negara untuk berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Kualitas manusia yang meningkat merupakan prasyarat utama dalam proses produksi dan memenuhi tuntutan masyarakat industrial.

Alternatif lain dalam strategi pembangunan manusia adalah apa yang disebut sebagai *people-centered development* atau *panting people first* (Korten, 1981 dalam Kuncoro, 2003:89). Artinya, manusia (rakyat) merupakan tujuan utama dari pembangunan, dan kehendak serta kapasitas manusia merupakan sumber daya yang paling penting dimensi pembangunan yang semacam ini jelas lebih luas daripada sekedar membentuk manusia profesional dan trampil sehingga bermanfaat dalam proses produksi.

Telah disebutkan pada inti suatu pembangunan daerah salah satu poinnya adalah *Freedom from servitude* yaitu kebebasan bagi setiap individu suatu negara untuk berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwasannya semua warga negara suatu negara baik laki-laki maupun perempuan boleh berpartisipasi dalam rangka pembangunan. Atau dengan kata lain perlunya suatu kerjasama diantara keduanya. Dimana inti dari

pembangunan itu sendiri adalah untuk memajukan negara dan mencapai apa yang menjadi tujuan negara.

Serta didukung dengan adanya sasaran pembangunan Nasional itu sendiri salah satunya adalah peningkatan kualitas perempuan sebagai sumber daya pembangunan yang berperan aktif dalam semua aspek pembangunan. Dengan adanya peran serta aktif dari perempuan dalam segala bidang pembangunan. Hal itu menunjukkan, bahwa negara ini menerapkan apa yang dinamakan jender. Adapun makna jender adalah suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi kondisi sosial dan budaya, nilai dan perilaku, mentalitas, dan emosi, serta faktor-faktor nonbiologis lainnya. Jender berbeda dengan sex, meskipun secara etimologis artinya sama sama dengan sex, yaitu jenis kelamin (John M. Echols dan Hassan Shadily, 1983: 517). Secara umum sex digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis, sedang jender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, dan aspek-aspek nonbiologis lainnya. Kalau studi sex lebih menekankan kepada perkembangan aspek biologis dan komposisi kimia dalam tubuh seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka studi gender lebih menekankan kepada perkembangan aspek maskulinitas dan femininitas seseorang. Menurut Ibu Supristiar (Kassubid Pengarusutamaan Jender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan BPPKB Kabupaten Jombang) “Jender itu menyetarakan / menyamakan peran laki-laki dan

perempuan agar sama-sama merasakan dan berkecimpung dalam pembangunan”.

Seperti halnya yang tertuang pada Inpres No 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan jender dalam pembangunan Nasional, yaitu. Presiden menginstruksikan kepada Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Gubernur, Bupati/Walikota untuk melaksanakan pengarusutamaan jender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan Nasional yang berspektif jender sesuai dengan bidang, tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing.

Untuk melaksanakan berbagai kegiatan tersebut keberadaan perempuan sebagai sumber daya alam pembangunan perlu dimaksimalkan. Sedangkan kondisi yang ada masih dijumpai peran perempuan sangat lemah jika dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini disebabkan karena ketidakberdayaan kaum perempuan yang disebabkan faktor sarana dan prasarana, pengetahuan dan keterampilan yang belum memadai serta modal usaha yang terbatas. Guna mengatasi keadaan yang demikian perlu keterlibatan semua pihak untuk menangani adanya program pengembangan kualitas perempuan dalam pembangunan. Melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, kesehatan. Perbaikan gizi perempuan.

Program pembangunan pemberdayaan perempuan pada masa-masa mendatang akan semakin memperlihatkan dan menyikapi perubahan yang berkembang di dalam masyarakat. Dalam bidang ekonomi produktif dilaksanakan melalui berbagai kegiatan perluasan kesempatan kerja dan usaha bagi perempuan. Sehingga dapat tercipta lapangan kerja dengan menggalakkan kewirausahaan dikalangan perempuan. Dengan demikian akan tumbuh kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh perempuan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka dalam berusaha. Penempatan manusia sebagai subyek pembangunan menekankan pada pentingnya pemberdayaan (*empowerment*) manusia khususnya dalam hal ini adalah perempuan, yaitu kemampuan seseorang untuk mengaktualisasikan segala potensinya.

Untuk dapat menghasilkan *output* yang maksimal atas pengaktualisasian potensi dari perempuan. Diperlukan suatu fasilitas agar menunjang keberhasilan yang akan dicapai. Oleh karena itu, hal ini mengacu pada suatu fungsi dari Badan Pemberdayaan Perempuan yang memiliki tanggung jawab untuk mempermudah dalam pencapaian keadilan dan kesetaraan jender. Badan Pemberdayaan Perempuan ini tidak hanya dalam cakupan Nasional saja, tetapi juga dalam cakupan lebih kecil yaitu di suatu Kota/Kabupaten. Agar lebih mempermudah perempuan dalam menggali potensinya dan dapat turut andil di pembangunan.

1. Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesetaraan Jender di Bidang Ekonomi

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial, individu maupun institusi melakukan intervensi baik secara sosial, ekonomi, maupun budaya. Salah satu intervensi yang dilakukan dan telah menjadi salah satu *icon* dalam upaya mengurangi kemiskinan masyarakat serta mengatasi berbagai permasalahan sosial yang terjadi adalah pemberdayaan. Suatu pemberdayaan tidak hanya dilakukan pada satu pihak atau laki-laki saja, tetapi juga pada kaum perempuan.

Pemberdayaan perempuan adalah usaha pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi, politik, sosial dan budaya agar perempuan dapat mengatur diri, meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif guna memecahkan masalah pembangunan serta mampu membangun dirinya (Anonymous, 2010).

Pada hakekatnya sasaran program pemberdayaan perempuan diarahkan untuk mengembangkan dan mematangkan berbagai potensi yang ada pada diri perempuan yang memungkinkan dirinya dapat memanfaatkan hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki terhadap sumber daya pembangunan.

Adanya anggapan bahwa perempuan dengan bentuk dan keterbatasan fisik biologis ikut dikondisikan sebagai makhluk yang

kurang produktif dalam bidang ekonomi, sedangkan laki-laki dikondisikan sebagai unsur pencari nafkah yang lebih produktif. Sehubungan dengan itu laki-laki memperoleh kesempatan untuk berperan dalam berbagai sumber pembangunan. Di Indonesia dalam rumah tangga perempuan dipolakan sebagai unsur pengatur / pengguna penghasil suami (laki-laki), dengan pembagian tugas antar yang menghasilkan (laki-laki) dan yang mengatur pengeluaran (perempuan).

Untuk itulah pemberdayaan perempuan dilakukan guna mengurangi suatu bias jender. Sebagai wujud nyata pelaksanaan pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan jender telah dilaksanakan oleh negara dengan adanya MDGs (*Millenium Development Goal's*) terdapat indikator-indikator MDGs yang menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 (RPJMN 2010-2014) (Hasil *Workshop* Penguatan Kelembagaan PUG dan PUHA se-Kabupaten Jombang), antara lain sebagai berikut:

- 1) Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan
- 2) Mencapai Pendidikan dasar Untuk Semua
- 3) Mendorong Kesetaraan Jender dan Pemberdayaan Perempuan
- 4) Menurunkan Angka Kematian Anak
- 5) Meningkatkan Kesehatan Ibu Hamil
- 6) Memerangi HIV dan AIDS, Malaria, dan Penyakit menular
- 7) Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup

8) Membangun Kemitraan Global Untuk Pembangunan

Pelaksanaan pemberdayaan perempuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan sumber daya manusia perempuan yang mempunyai kemampuan dan kemauan guna kemandirian, dengan kepribadian, memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan, keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Negara maupun suatu instansi melaksanakan pemberdayaan perempuan mengandung unsur kesejahteraan. Dimana merupakan salah satu aspek yang penting dalam pemberdayaan perempuan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam akses terhadap kesejahteraan, perempuan menempati posisi yang tidak menguntungkan. Kesejahteraan ini dibagi ke dalam 3 unsur utama (Claros and Zahidi, 2005:2-5) yaitu :

- 1) Partisipasi ekonomi perempuan, merupakan hal yang penting tidak hanya mengurangi level kemiskinan pada perempuan melainkan pula sebagai langkah penting untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga dan mendorong pembangunan ekonomi negara secara keseluruhan.

- 2) Pencapaian pendidikan, merupakan aspek paling fundamental dalam kegiatan pemberdayaan perempuan. Tanpa memperoleh pendidikan yang memadai perempuan tidak mampu mengakses pekerjaan sektor

formal, mendapatkan upah yang lebih baik, berpartisipasi dalam pemerintahan dan mencapai pengaruh politik.

- 3) Kesehatan dan kesejahteraan, merupakan sebuah konsep yang terkait dengan perbedaan substansial antara perempuan dan laki-laki dalam mengakses nutrisi yang cukup, kesehatan, fasilitas reproduksi dan untuk mengemukakan keselamatan integritas seseorang.

Negara mendukung sepenuhnya atas pemberdayaan perempuan untuk dapat mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Dengan dukungan dari negara, maka instansi/Badan/Kantor/Dinas pun melaksanakan hal itu sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan negara. Dalam hal ini Badan Pemberdayaan Perempuan sebagai fasilitator utama kegiatan tersebut. Bekerja sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan. Baik itu dari program maupun kegiatan yang dilakukan di segala bidang pembangunan khususnya ekonomi. Badan Pemberdayaan Perempuan ini bekerja dengan maksimal agar perempuan dapat diberdayakan sebagaimana mestinya. Dengan *output* mampu melahirkan wirausahawan baru dan dapat membantu perekonomian keluarga serta merasakan pembangunan.

a. Peranan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga

Berencana Kabupaten Jombang Terkait dengan Program dan Kegiatan

1) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan

Program ini dilaksanakan oleh BPPKB Kabupaten Jombang dalam rangka memberdayakan perempuan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan jender di bidang ekonomi. Program ini dilakukan dengan cara meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan. Dimana dalam meningkatkan peran serta dari perempuan tersebut dititikberatkan pada penggalan serta pengembangan potensi yang dimiliki oleh perempuan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menyetarakan hak perempuan dan laki-laki, agar sama-sama menikmati dan berpartisipasi dalam pembangunan. Menurut Ibu Supristiar (Kassubid Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pengarusutamaan Jender), “Program ini sangat membantu perempuan di Jombang lebih mandiri dan dapat meningkatkan perekonomian keluarga”. Hal ini menunjukkan bahwasannya program memberdayakan perempuan di bidang ekonomi tersebut telah berhasil dilaksanakan, tidak sekedar menjadi program ataupun hanya rencana-rencana saja. Dengan begitu maka secara tidak langsung jika perempuan mampu mandiri dan dapat mengekspresikan potensinya atau bahkan memberikan hasil karyanya maka keadilan dan kesetaraan jender di Jombang sudah terwujud. Berdasarkan hasil *workshop* Penguatan Kelembagaan 51 SKPD

Kabupaten Jombang tahun 2012, bahwa keadilan jender adalah keadaan yang dirasa adil tidak memihak salah satu jenis kelamin. Sedangkan pengertian kesetaraan jender adalah suatu situasi atau keadaan yang sama rata untuk dapat bersama-sama merasakan pembangunan. Hal tersebut semakin membuktikan bahwa KKG khususnya dibidang ekonomi yang digawangi oleh BPPKB Kabupaten Jombang nyata adanya. Perempuan di Jombang sama-sama berkecimpung dalam pembangunan serta dapat menopang kebutuhan keluarga ataupun membantu suami untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Artinya bahwa perempuan di Jombang adalah perempuan yang berkualitas yang telah dapat mengembangkan potensinya sehingga tidak kalah bersaing dengan laki-laki dalam pembangunan atau dengan kata lain mampu menyejajarkan dirinya dengan laki-laki.

2) Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha dalam Mengelola

Usaha

Terselenggara dengan adanya kegiatan P3EL. Dengan kata lain dikatakan bahwa kegiatan P3EL ini merupakan turunan dari induk kegiatan yaitu bimbingan manajemen usaha dalam mengelola usaha. P3EL (Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang dalam hal ini memiliki peran sebagai wadah serta fasilitator untuk dapat mewujudkan keadilan dan kesetaraan jender bagi masyarakat Jombang. Perwujudan ini dilakukan disegala bidang pembangunan. Namun dalam hal ini, peneliti memfokuskan pada sektor pembangunan bidang ekonomi.

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kabupaten Jombang memfasilitasi berbagai program dan kegiatan tersebut guna memperkecil kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di segala bidang. Dengan mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki. Dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pada seluruh kebijakan dan program pembangunan nasional disamping meningkatkan kualitas hidup perempuan itu sendiri. Dengan kata lain, bahwasannya program dan kegiatan yang dilakukan BPPKB Kabupaten Jombang ini merupakan bagian dari pengarusutamaan gender. Dimana PUG ini sendiri merupakan strategi yang dilakukan untuk dapat mencapai keadilan dan kesetaraan gender serta di dalamnya terkandung suatu perencanaan sampai dengan evaluasi. Hal ini merupakan program dan kegiatan yang dilakukan lebih terarah dan tepat sasaran. Dengan PUG ini diharapkan dapat bekerja lebih efisien dan efektif dalam memproduksi kebijakan publik yang adil dan responsif gender kepada masyarakat, perempuan dan laki-laki.

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kabupaten Jombang, untuk mewujudkan KKG (Keadilan dan Kesetaraan Gender) bidang ekonomi pada masyarakat Jombang, dilakukan melalui program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan. Program tersebut didukung dengan kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha. Hal ini merupakan cikal bakal terwujudnya P3EL (Pemberdayaan Perempuan

Pengembang Ekonomi Lokal). Dimana suatu proses pemberdayaan perempuan terutama dalam bidang ekonomi menjadi lebih terangkat dan perempuan ikut berkecimpung dalam pembangunan. Dengan harapan akan dapat menumbuhkembangkan kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh perempuan dan berbasis pada sumber daya ekonomi lokal yang tersedia. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan untuk kesejahteraan keluarga dan percepatan pertumbuhan ekonomi pedesaan. Disamping itu pula dilakukan dengan adanya kegiatan Pemberdayaan Perempuan Pemberian Keterampilan menjadikan suatu wadah atau fasilitas bagi semua perempuan di Jombang untuk dapat lebih mengasah potensinya dan melahirkan wirausaha baru.

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan ini, dimaksudkan agar perempuan dapat menggali potensinya. Artinya, program ini digunakan untuk memberdayakan perempuan khususnya di bidang ekonomi. Hal itu ditunjukkan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung seperti halnya bimbingan manajemen usaha dalam mengelola usaha serta kegiatan pemberian keterampilan. Dari sini dapat terlihat bahwa peran dari BPPKB Kabupaten Jombang sangatlah nampak. Dengan adanya berbagai kegiatan tersebut tentunya efek langsung yang dirasakan adalah peran serta aktif dari perempuan yang merasa terwadahi dan diberdayakan. Sejalan dengan hal tersebut sejak tahun 2003 Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Badan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jawa Timur telah memberikan bantuan

dalam kegiatan melaksanakan P3EL (Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal) di Kabupaten Jombang. Salah satu isu dalam meningkatkan peran perempuan dan pembangunan pedesaan adalah melalui pengembangan kelembagaan dan usaha ekonomi produktif. Dimana kegiatan ini dikelola oleh perempuan. Dengan harapan dapat memberikan peningkatan pendapatan keluarga, sehingga kesejahteraan dapat terwujud. Dengan demikian akan meningkatkan posisi perempuan menuju kesetaraan gender.

Pada tahun 2003, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang melaksanakan kegiatan P3EL pertama tepatnya di Desa Alang-Alang, Kecamatan Jogoroto. Kemudian kegiatan P3EL ini dilakukan secara berkelanjutan setiap tahunnya hingga saat ini pada tahun 2012 tepatnya di Desa Gedongombo Kecamatan Ploso. Kegiatan P3EL di Kabupaten Jombang telah diterapkan di 14 Desa, dan 10 Kecamatan. Diantara ke-14 Desa tersebut, peneliti memfokuskan pada Desa Genengan Jasem, Kecamatan Kabuh. Dikarenakan di Desa ini kegiatan P3EL berhasil diterapkan sehingga dapat menjadi juara 1 Kabupaten (Laporan Monitoring BPPKB Kabupaten Jombang Tahun 2011).

Penerapan P3EL di Desa Genengan Jasem telah dilakukan sejak tanggal 15 Desember 2007. Berdasarkan dengan petunjuk teknis operasional P3EL, Desa ini mendapatkan bantuan modal sebesar

Rp 25.000.000,00. Desa ini mendapatkan bantuan dari APBD I yaitu berasal dari provinsi. Dengan alasan, Desa Genengan Jasem termasuk desa dengan kategori merah atau miskin/ tertinggal. Selain itu, desa ini pada awalnya telah melakukan kegiatan wirausaha yaitu dengan membuat anyaman pandan dimana pelakunya adalah para perempuan.

Kaum perempuan sudah sejak dulu melakukan kegiatan ini. Dikarenakan pendapatan suami mereka kurang mencukupi kebutuhan perekonomian keluarga. Terkait penghasilan kaum pria ditunjukkan dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp 500.000, 00 s/d Rp 750.000,00. (Proposal Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal Desa Genengan Jasem Tahun 2007). Desa Genengan Jasem memiliki potensi sumber daya alamnya berupa tanaman pandan berduri (Hasil Survei BPPKB Kabupaten Jombang Tahun 2007). Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang, tidak hanya memberikan modal, namun juga melakukan pembinaan berupa pemberian materi terkait dengan kreatifitas dalam menganyam. Dimana kegiatan tersebut mendatangkan pemateri dari Gresik. Dengan tujuan untuk memberitahukan pada masyarakat setempat terutama kaum perempuan yang berkecimpung dalam pembuatan anyaman tersebut agar dapat mengembangkan ide untuk kemajuan hasil produksinya. Kegiatan P3EL ini agar dapat berjalan dengan baik maka diperlukan penguatan kelembagaan.

Kegiatan P3EL ini adalah salah satu strategi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan jender di bidang ekonomi pada masyarakat Jombang yang telah dilakukan BPPKB Kabupaten Jombang. Kegiatan P3EL ini secara teknis operasional telah melambangkan kesesuaian dengan apa yang terdapat pada pengarusutamaan jender. Hal itu meliputi :

Ruang lingkup pengarusutamaan jender (PUG) mencakup aspek-aspek sebagai berikut (Inpres No. 9 Tahun 2000) yaitu :

1) Perencanaan

Perencanaan merupakan upaya untuk mencapai tujuan secara rasional baik dalam tahapan membuat kebijakan maupun program, di tingkat nasional, propinsi maupun kabupaten. Perencanaan kebijakan merupakan penentuan tujuan dan sasaran pembangunan, sedangkan perencanaan program merupakan operasionalisasi dari kewenangan pemerintah yang dilakukan pada setiap lingkup diberbagai tingkatan wilayah. Pengertian program disini adalah program/proyek/kegiatan operasional yang merujuk kepada Propenas/ Propeda dan Repeta/ Repetada serta RAPBN/RAPBD.

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan pengarusutamaan jender perlu didukung dan diefektifkan dengan menyiapkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Pemampuan para pelaksana pengarusutamaan jender.
- b) Penyusunan perangkat analisis, pemantauan dan penilaian.

- c) Pembentukan mekanisme pelaksanaan pengarusutamaan jender, antara lain :

- 1) Forum Komunikasi
- 2) Kelompok Kerja
- 3) Panitia Pengarah (*Steering Committee*)
- 4) Tim Penggerak pengarusutamaan jender (*Gender Focal Point*)

- d) Pembuatan kebijakan formal yang mampu mengembangkan komitmen kesegelan jajaran pemerintah dan swasta serta disemua tingkatan, propinsi, kabupaten dan kota, pembentukan mekanisme jejaring kerja yang melibatkan semua *stakeholder* dalam proses pengarusutamaan jender.

- e) Pembentukan Kelembagaan pengarusutamaan jender pada instansi pemerintah disetiap tingkatan wilayah.

3) Pemantauan dan Evaluasi

Berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang sudah disusun perlu dipantau dan dievaluasi dengan memperhatikan hal-hal berikut :

- a) Dapat dipertanggung jawabkan.
- b) Tepat waktu.
- c) Sederhana, efektif dan efisien.
- d) Transparan, dapat dipercaya dengan data yang valid.
- e) Menggunakan data terpilah menurut jenis kelamin.
- f) Adanya indikator dan tolak ukur.

Mekanisme Kegiatan P3EL :

1) Persiapan

Kegiatan persiapan meliputi : a) penetapan lokasi P3EL, b) seleksi pendamping, c) pendidikan kemasyarakatan dalam rangka mendukung P3EL tingkat Kabupaten/ Kota. Penetapan lokasi P3EL dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Jawa Timur setelah mendapatkan usulan dari Pemerintah Kota/Kabupaten. Dimana lokasi P3EL ini diprioritaskan pada Desa/Kelurahan kategori merah/kuning. Dan dalam hal ini didanai oleh APBD I serta APBD II.

2) Perencanaan

Perencanaan kegiatan P3EL merupakan tahapan kegiatan yang bertujuan untuk menyusun usulan kegiatan secara partisipatif. Melalui musyawarah Desa/Kelurahan khusus perempuan. Dalam hal ini melibatkan perempuan dimana untuk pengambilan keputusan pada semua tahapan dan itu artinya tidak memarginalkan perempuan.

3) Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan adalah tahap melaksanakan seluruh rencana yang telah disepakati dalam musyawarah Desa/Kelurahan khusus perempuan. Tahap ini dimulai dari pencairan dana, pelaksanaan kegiatan sampai pembuatan laporan. Dalam hal ini yang bertanggungjawab adalah UPK (Unit Pengelola

Keuangan). Dimana UPK ini adalah wanita yang dipilih warga dan wanita ini tidak memiliki hubungan keluarga dengan pengurus P3EL di Desa.

4) Monitoring dan evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan pelaksanaan tetap sesuai dengan rencana yang disepakati.

Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan dengan kunjungan langsung. Dengan dibentuk pendampingan serta PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana). Melalui mekanisme pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Dari penjabaran tersebut diatas, dapat dikaji bahwa Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang sudah bekerja sebagaimana mestinya. Pasalnya, hal itu dibuktikan dengan instansi ini menjalankan program dan kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan jender di bidang ekonomi. Dalam kegiatan tersebut baik pada proses maupun pelaksanaannya selalu melibatkan perempuan dengan membentuk kelompok kerja, yang bertujuan untuk mempermudah pengerjaannya. Hasil monitoring serta evaluasi, pada kegiatan P3EL ini telah menunjukkan adanya suatu usaha yang maksimal. Hal ini terlihat bahwa BPPKB Kabupaten Jombang ini melakukan semua kegiatan berdasarkan pada buku pedoman operasional P3EL, yaitu dengan adanya pendampingan yang bertanggungjawab untuk memonitoring pelaksanaan kegiatan di lapangan dan bentuk pelaporan

keuangan yang nantinya akan disampaikan ke BPPKB Kabupaten Jombang. BPPKB Kabupaten Jombang ini memiliki petugas PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) untuk dapat meninjau langsung ke lapangan. PLKB ini mempunyai tugas sebagai pelaksana program dan kegiatan BPPKB Kabupaten Jombang, tepatnya sebagai tim pemantau. Kegiatan monitoring tersebut dilakukan 2 kali setiap bulan. Sinergitas antara kelompok kerja yang menjadi pelaksana Kabupaten Jombang maupun pelaksana Desa/Kelurahan/Kecamatan sangat terjalin dengan baik. Akibat hubungan tersebut, kegiatan P3EL ini menjadi suatu kegiatan yang berhasil. Dengan terpilihnya Desa Genengan Jasem, Kecamatan Kabuh sebagai juara 1 Kabupaten pada tahun 2007. Dan akibat dari itu, kegiatan P3EL ini terus berjalan hingga sekarang.

Keberhasilan kegiatan ini tidak hanya faktor kerjasama pelaksananya saja, tetapi juga dengan adanya keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat Desa GenenganJasem. Dimana masyarakat disana mendukung sepenuhnya atas kegiatan P3EL ini. Hal ini terlihat bahwa masyarakat dibudayakan untuk menanam pohon pandan di setiap lahan yang ada. Bagi perempuan yang bekerja sebagai penganyam pandan ini tidak melupakan tugas mereka sebagai ibu rumah tangga. Mereka mengerjakan pekerjaan tersebut sebagai pekerjaan sampingan, setelah pekerjaan ibu rumah tangga selesai. Menurut Bapak Suprapno “Tidak terganggu, karena kegiatan P3EL ini dilakukan pas waktu istirahat dan pengerjaannya berkelompok, Mbak”. Artinya bahwa

walaupun para istri atau kaum perempuan bekerja mengayam pandan, suami atau kaum laki-laki tidak keberatan atau setuju jika P3EL ini berjalan di desa meraka. Selain itu pula bisa membantu perekonomian keluarga. Menurut Bapak Suprapno “Sangat setuju bahkan warga sudah tidak lagi cari pinjaman modal ke Bank *Titil* (Bahasa Jawa), suami sangat senang bisa dibantu istri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga”.

Tingkat perekonomian keluarga di Desa Genengan Jasem rata-rata berkisar Rp 500.000,00 sampai Rp 750.000,00 per bulannya sebelum ada kegiatan P3EL ini. Namun setelah kegiatan P3EL ini dilakukan di Desa tersebut dengan BPPKB Kabupaten Jombang memberikan modal sebesar Rp 25.000.000,00. Maka tingkat perekonomian keluarga disana meningkat. Menurut Ibu Suparni “Jelas ada peningkatan perekonomian masyarakat. Yang dapat pinjaman dimanfaatkan untuk membeli bahan. Kemudian pandan diolah jadilah tikar langsung dijual pada bakul tanpa menunggu terlalu lama. Sebagian hasilnya untuk kebutuhan rumah tangga”. Para perempuan di Desa tersebut membantu kesejahteraan keluarganya dengan memperoleh pendapatan Rp 600.000.00 per bulan.

Menurut Ibu Suparni “Penghasilan individu dari pandan, setiap hari kalau dikerjakan sendiri dapat Rp 20.000,00. Satu bulannya Rp 600.000,00”.

Artinya bahwa dengan begitu tingkat perekonomian keluarga yang semula berkisar Rp 750.000,00 bertambah menjadi Rp 1.350.000,00 per bulan.

Dan itu dapat membuat keluarga lebih sejahtera, pendidikan anak-anaknya pun bisa lebih baik. Serta untuk memenuhi gizi bagi keluarga bisa

tercukupi. Pendapatan individu (perempuan) per bulan Rp 600.000,00 tidak terlepas dari pemasarannya. Hasil penjualan tikar anyaman pandan ini tingkat pemasarannya tidak hanya di wilayah Jombang saja. Menurut Ibu Sumini “Antar kecamatan di Jombang, Mbak. Bahkan ada yang setiap bulannya dikirim ke Bali. Dan baru-baru ini ada Dosen dan mahasiswanya berkunjung kesini, Mbak. Mau ngajak kerjasama dengan kader P3EL tentang kerajinan tikar”. Artinya bahwa usaha yang dilakukan kaum perempuan ini semakin maju dan berkembang. Dan dapat dengan mudah mendapatkan untung serta perguliran dana modal yang diberikan BPPKB Kabupaten Jombang dapat berjalan dengan baik.

Mekanisme dana bantuan tersebut dengan cara perguliran dana, yaitu dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Di Desa Genengen Jasem ini pada awalnya terdapat 7 kelompok yang masing-masing terdiri dari 10 orang. Namun dengan seiring berjalannya waktu dan terjadinya perkembangan modal yang awalnya Rp 25.000.000 menjadi Rp 52.239.758. Maka terjadinya penambahan kelompok yaitu 12 kelompok (Laporan Monitoring P3EL Desa Genengan Jasem Tahun 2011). Sesuai dengan petunjuk teknis operasional kegiatan P3EL di Desa ini, modal yang diberikan tersebut dibagi ke dalam kelompok-kelompok.

Dengan acuan bahwa modal tersebut sebagai pinjaman yang berbunga 1%.

Dengan bunga 1% tersebut maka dana dapat digulirkan kelompok lainnya.

Sehingga mampu menghasilkan tambahan kelompok pada kegiatan tersebut. Begitu seterusnya terkait dengan mekanisme perguliran dana

(Laporan Monitoring P3EL Desa Genengan Jasem Tahun 2011).

Disamping itu, biaya operasional pengurus sejak tahun 2007 s/d 2011 sebesar 11.525.540,00 (Laporan Monitoring P3EL Desa Genengan Jasem Tahun 2011).

Dari hal tersebut diatas, yang menjadi faktor penentu Desa Genengan Jasem bisa dipilih BPPKB Kabupaten Jombang untuk meletakkan kegiatan P3EL disana adalah bahwa desa ini merupakan desa dengan kategori merah (miskin). Para perempuan desa ini sebelumnya sudah menjalankan usaha menganyam pandan karena masing-masing KK (Kepala Keluarga) memiliki lahan yang ditanami pandan berduri. Menurut Bapak Suprapno "Karena di Desa GenengJasem tanaman pandan sangat digalakkan bahkan setiap KK pasti lahannya atau tegalan ditanami pandan berduri demi membantu penghasilan keluarga". Desa ini sudah berpotensi dari awal dan BPPKB Kabupaten Jombang memberikan bantuan modal agar usahanya lebih maksimal, desa tersebut perekonomian keluarganya bisa lebih baik. Atau dengan kata lain banyaknya perempuan di desa tersebut yang menganyam dapat lebih diberdayakan. Serta mereka dapat ikut langsung dalam pembangunan khususnya bidang ekonomi. Selain itu pula perempuan tidak termajinalkan dan KKG (Keadilan dan Kesetaraan Jender) bidang ekonomi dapat terwujud.

3) Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Pemberian Keterampilan

Selain kegiatan P3EL diatas, BPPKB Kabupaten Jombang juga memiliki kegiatan yang juga berkecimpung di bidang ekonomi. Kegiatan ini ditujukan agar kaum perempuan memiliki keterampilan yang baik.

Dimana potensi yang tersimpan pada diri perempuan dapat dikembangkan.

Pengembangan potensi perempuan ini adalah wujud nyata dari pemberdayaan perempuan agar supaya perempuan lebih berkualitas dan dapat turut serta dalam pembangunan.

Pelaksanaan kegiatan pemberian keterampilan ini dilakukan BPPKB Kabupaten jombang dengan berbagai bentuk kegiatan maupun sosialisasi. Adapun jenis kegiatan pemberian keterampilan sepanjang tahun 2011-2012 adalah sebagai berikut :

- a. Pelatihan dan Sosialisasi Aneka Olahan Ikan
- b. Pelatihan Keterampilan Anyaman Bambu
- c. Pelatihan Keterampilan Pangan Non Beras
- d. Pelatihan Merajut Benang
- e. Pelatihan Pembuatan Kue Kering

Dalam pelaksanaan kegiatan BPPKB bekerjasama dengan sejumlah pemateri-pemateri yang ahli dibidangnya. Seperti halnya dalam pelatihan pengolahan aneka ikan menghadirkan pemateri dari dinas peternakan dan perikanan Kabupaten Jombang, pada kegiatan anyaman bambu menghadirkan pemateri pengrajin dari Gresik. Para peserta diberi

materi penyuluhan berupa *handout*, dan disediakan konsumsi. Peserta kegiatan pemberdayaan perempuan pemberian keterampilan adalah semua kaum perempuan yang ada di Jombang. Baik yang berasal dari perempuan P3EL, anggota P2WKSS, dan P4A (Pembentukan Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak). Kegiatan ini dipergunakan untuk para perempuan yang memiliki permasalahan ekonomi maupun yang ingin menjadi seorang wirausaha.

Tentang permasalahan dana, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang memperoleh dari APBD Kabupaten. Untuk menentukan lokasi dan tempat dilaksanakan pelatihan tersebut, berpedoman pada DPA (Dokumen Perencanaan Anggaran) SKPD BPPKB Kabupaten Jombang.

Terkait dengan tujuan masing-masing kegiatan berbeda walaupun sama-sama memberdayakan perempuan dibidang ekonomi. Kegiatan P3EL memiliki tujuan untuk menumbuhkan kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif yang dikelola perempuan dari hasil potensi sumber daya alam desanya. Berbeda dengan kegiatan pemberian keterampilan. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan wirausaha baru khususnya kaum perempuan di wilayah Kabupaten Jombang. Kegiatan ini tidak menggunakan kriteria seperti halnya P3EL yang menggunakan desa miskin/tertinggal. Namun kegiatan pemberian keterampilan ini, diberlakukan untuk semua perempuan di Jombang. Hal itu ditunjukkan dengan anggota dari kegiatan ini adalah berasal dari anggota P3EL,

P2WKSS, dan P4A. Kegiatan pemberdayaan perempuan pemberian keterampilan ini adalah memang murni memberikan materi atau pembekalan bagi perempuan untuk dapat mengasah potensinya. Dan kegiatan ini lebih sering dilakukan dengan adanya bentuk pelatihan serta sosialisasi.

Dengan pelaksanaan kegiatan ini harapan dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang.

Agar para peserta dapat menerapkan ilmu yang di dapat serta anggota organisasi tersebut dapat menyebarkan tentang ilmu keterampilan yang di dapat dari perempuan satu ke perempuan lainnya. Sehingga para kaum perempuan dapat meningkatkan potensinya. Dan lebih berdaya untuk ikut dalam pembangunan.

b. Kesesuaian TUPOKSI(Tugas Pokok dan Fungsi) dengan Implementasi

Adapun tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang tepatnya pada subbidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pengarusutamaan Gender meliputi (Peraturan Bupati Jombang Nomor 6 Tahun 2009) :

Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana :

- 1) Penyusunan program pembangunan dibidang Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- 2) Koordinasi dan penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan program pembangunan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera
- 3) Penyelenggaraan manajemen dan administrasi serta melaksanakan koordinasi dibidang pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera
- 4) Penyelenggaraan peningkatan peran serta masyarakat dan keluarga dibidang pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera
- 5) Penyelenggaraan pembinaan, pemantauan dan pengembangan terhadap program pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera
- 6) Pemberian rekomendasi pengembangan modal Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
- 7) Penyelenggaraan pengawasan melekat administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan perbekalan serta evaluasi pelaporan
- 8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Tugas dan Fungsi Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup

Perempuan dan Pengarusutamaan Jender yaitu :

- 1) Menyiapkan dan menganalisis data dalam penetapan kebijakan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan guna terwujudnya kesetaraan dan keadilan jender

- 2) Menyusun dan melaksanakan program peningkatan kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan jender perempuan dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya
- 3) **Melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan melalui peningkatan sumberdaya manusia dan pelatihan ketrampilan.**
- 4) Melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan peranan perempuan sebagai pengambil keputusan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan jender
- 5) **Memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas peran pusat studi wanita (PSW), organisasi masyarakat / LSM pemerhati perempuan dan dunia usaha**
- 6) Memfasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin
- 7) Melakukan analisis jender, perencanaan anggaran, yang responsif jender, dan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi pengarusutamaan jender (KIE PUG)
- 8) **Melaksanakan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya**

9) Mengembangkan usaha pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga serta masyarakat melalui kegiatan P2WKSS (Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera) dan P3EL (Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal)

10) Melaksanakan pembinaan, sosialisasi dan implementasi program peningkatan kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan gender

11) Menyiapkan bahan koordinasi dengan komponen terkait dalam rangka mengembangkan pelaksanaan pengarusutamaan gender

12) Melaksanakan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan program serta pelaporan terhadap dampak, perkembangan program peningkatan kualitas hidup dan pengarusutamaan gender

Dengan adanya tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh BPPKB

Kabupaten Jombang, dimana terdapat 3 bidang di dalamnya yaitu bidang

Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, bidang Keluarga

Berencana, bidang Keluarga Sejahtera. Tugas pokok dan fungsi ini sudah

mencerminkan adanya keefektifan, sebab tidak ada suatu tanggungjawab

ataupun tugas yang tumpang tindih. Semua bekerja berdasarkan tupoksi

yang ada.

Khususnya di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak yang kemudian disempitkan pada Subbidang Peningkatan Kualitas

Hidup Perempuan dan Pengarusutamaan Gender. Seperti data yang tersaji

diatas yang tercetak tebal bahwasannya, pada subbidang ini telah melakukan tanggungjawabnya sebagaimana yang tertuang dalam tupoksi.

Dari segi untuk memberdayakan perempuan agar dapat berperan serta dalam pembangunan di bidang ekonomi. Telah dilakukan dengan melaksanakan poin ketiga yaitu tentang melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan melalui peningkatan sumberdaya manusia dan pelatihan ketrampilan. Itu diimplementasikan dengan adanya berbagai kegiatan yang ada seperti Pelatihan dan Sosialisasi Aneka Olahan Ikan, Pelatihan Keterampilan Anyaman Bambu, Pelatihan Keterampilan Pangan Non Beras dan Pelatihan Merajut Benang, Pelatihan Pembuatan Kue Kering. Kegiatan ini dilakukan sepanjang tahun 2011 sampai tahun 2012.

BPPKB Kabupaten Jombang juga melakukan kegiatan yang ada pada poin kelima yaitu fasilitasi dan melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas peran pusat studi wanita (PSW), organisasi masyarakat / LSM pemerhati perempuan dan dunia usaha. Hal ini diimplementasikan dengan adanya serangkain kegiatan pemberdayaan perempuan bidang pelatihan keterampilan yang salah satu anggotanya berasal dari PSW (Pusat Studi Wanita). PSW ini beranggotakan kampus-kampus yang berada di Kabupaten Jombang sebut saja Universitas Darul Ulum, STKIP Jombang, STIE Dewantara Jombang, dan masih banyak lagi. Serta BPPKB Kabupaten Jombang bekerjasama dengan LSM pemerhati wanita yang gunanya untuk membantu tugas mereka dalam

memberdayakan perempuan. LSM tersebut seperti KPI (Koalisi Perempuan Indonesia cabang Jombang), WCC (*Women Cricis Centre*), Narisakti Jombang. Dimana kesemuanya itu dilakukan guna menunjukkan bahwa BPPKB Kabupaten Jombang benar-benar menjalankan apa yang telah menjadi tanggungjawabnya dalam hal ini sebagai fasilitator.

Selain menjalankan yang ada pada poin tiga dan lima, BPPKB Kabupaten Jombang juga menjalankan poin kedelapan yaitu melaksanakan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang ekonomi. Hal ini diimplementasikan dengan adanya program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan yang disusun oleh kantor tersebut. Secara umum tentunya bertujuan untuk memberdayakan perempuan dengan alokasi modal atau dana, agar para perempuan dapat berkarya dan dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan kesamaan dalam merasakan pembangunan.

Pada tupoksi ini pula, BPPKB Kabupaten Jombang juga menjalankan apa yang terdapat di poin sembilan yaitu mengembangkan usaha pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga serta masyarakat melalui kegiatan P2WKSS (Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera) dan P3EL (Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal). Hal ini diimplementasikan dengan serangkaian kegiatan yang telah dipaparkan oleh penulis. Dalam hal pelaksanaan terselenggaranya P3EL dan P2WKSS ini menjadikan suatu dobrakan bagi masyarakat Jombang agar lebih mengerti tentang

jender dan perempuan menjadi lebih berdaya guna tentunya. Selain itu, kegiatan ini menyokong terciptanya tujuan dari program yang ada pada poin kedelapan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, menunjukkan bahwa Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sangat efektif dan efisien.

Karena terlihat jelas bahwa bentuk dari tanggungjawab BPPKB Kabupaten Jombang terutama di bidang ekonomi atau untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan jender bidang ekonomi dilakukan dengan maksimal. Tidak adanya satu poin pun yang tertinggal untuk mewujudkan itu. Hal ini berarti BPPKB Kabupaten Jombang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan implementasinya. Artinya bahwa masyarakat Jombang khususnya kaum perempuan benar-benar diberdayakan. Selain itu, fungsi dari BPPKB Kabupaten Jombang sebagai fasilitator itu benar adanya.

Sementara itu Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang, khususnya pada bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Melakukan tupoksinya juga atas dasar melaksanakan komitmen untuk mengimplementasikan pengarusutamaan gender (PUG) di wilayah Jombang berdasarkan Instruksi Bupati Jombang No. 2 tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Jombang. Diimplementasikan dengan adanya segala bentuk program dan kegiatan yang dilakukan berdasarkan atas perencanaan sampai evaluasi

yang tidak memarginalkan perempuan. Dalam arti partisipasi perempuan selalu dilibatkan. Peraturan Bupati Jombang No. 39 tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.45/94/415.10.10/2009 tentang pembentukan kelompok kerja pengarusutamaan *gender* di Kabupaten Jombang. Diimplementasikan dengan adanya sosialisasi dan *workshop* yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang terhadap 51 SKPD Kabupaten Jombang. Peraturan Bupati Jombang No. 18 tahun 2010 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P4A). Dengan adanya P4A ini menjadikan suatu wadah bagi perempuan dan anak untuk lebih diberdayakan. Hal ini diimplementasikan dengan adanya keanggotaan P4A yang terdiri atas Ibu PERSIT (Persatuan Istri Tentara), Bayangkari, Muslimat, Aisiyah, Komunitas Janda, Pusat Studi Wanita (PSW) dan lain sebagainya. Tergolong dalam kegiatan pemberdayaan perempuan pemberian keterampilan.

Semakin menunjukkan kepatuhan atas kewajiban dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang pada Pemerintah Kabupaten Jombang. Dengan melaksanakan apa yang menjadi peraturan serta apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. Dimana kesemuanya dilakukan dengan baik dan yang bertujuan untuk menyetarakan dan memberi keadilan bagi perempuan Jombang.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pemberdayaan

Perempuan dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesetaraan Jender

Dalam setiap peristiwa atau kegiatan yang dijalankan oleh seorang /kelompok /badan /kantor / dinas, akan selalu memiliki suatu faktor pendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Maupun faktor penghambat terselenggaranya kegiatan tersebut. Suatu faktor pendukung pun diklasifikasikan menjadi pendukung internal dan eksternal. Begitu juga dengan faktor penghambat.

Hal tersebut juga terjadi atau berlaku pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang. Pada instansi ini mereka pun juga memiliki faktor pendukung dan penghambat kegiatan dalam proses memberdayakan perempuan untuk dapat mewujudkan keadilan dan kesetaraan jender. Adapun faktor pendukung dan penghambatnya adalah :

a. Faktor Pendukung

Merupakan suatu hal yang mendorong seorang / kelompok / badan /kantor /dinas untuk dapat bergerak dalam mewujudkan tujuan yang dikehendaki. Baik itu dorongan yang berasal dari dalam maupun luar. Adapun faktor pendukung dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang meliputi :

1) Internal

- a) Dari segi anggaran : dimana anggaran berasal dari bantuan APBD 1 dan APBD (Anggaran Perencanaan Belanja Daerah) II, yaitu dari Kabupaten Jombang.

Pemberian dana ini melalui DPA (Dokumen Perencanaan Anggaran) SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) BPPKB (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana) Jombang, sebesar kurang lebih Rp 600.000.000, 00

- b) Memiliki Sumber Daya Manusia, 1 orang Kepala Bidang, 2 orang Kepala Subbidang, 4 orang staf.
- c) Dari segi sarana dan prasarana : difasilitasi dengan 2 mobil dinas, masing-masing pegawai diberi motor dinas, dan mendapatkan literatur untuk panduan pelaksanaan materi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan

2) Eksternal

- a) Antusiasme masyarakat Jombang khususnya anggota P4A (Pembentukan Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dan kaum perempuan.
- b) Adanya tim fasilitator Pengarusutamaan gender yang membantu dalam pelaksanaan program baik itu sosialisasi maupun *workshop* kelembagaan pada 51 SKPD Kabupaten Jombang.
- c) Dukungan dari organisasi perempuan dan PSW (Pusat Studi Wanita) yang beranggotakan para akademisi perempuan di Kabupaten Jombang.

d) Kerjasama yang baik dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) pemerhati perempuan seperti ; KPI (Koalisi Perempuan Indonesia cabang Jombang), WCC (Women Crisis Centre), Narisakti Jombang.

Dengan adanya faktor-faktor yang mendukung Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang

tersebut diatas, maka dapat dilihat bahwa baik internal maupun eksternal

menjadi kunci keberhasilan BPPKB Kabupaten Jombang dalam

melaksanakan pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan keadilan dan

kesetaraan jender di Kabupaten Jombang. Anggaran yang diterima oleh

BPPKB Kabupaten Jombang bermacam-macam terlihat dengan adanya

dana APBD. Dalam hal ini adalah baik dari APBD I dan II turut serta

untuk dapat mewujudkan keadilan dan kesetaraan jender dalam

pembangunan. Seperti halnya dana APBD I digunakan untuk mendanai

atau menjadi modal bagi kegiatan P3EL, serta APBD II digunakan untuk

memodali kegiatan pemberdayaan perempuan pemberian keterampilan dan

P2WKSS. Hal tersebut tentunya merupakan langkah BPPKB untuk dapat

mewujudkan KKG bidang ekonomi. Selain itu, adanya anggaran SKPD

BPPKB Kabupaten Jombang yang berjumlah sekian ratus juta. Itu

menunjukkan bahwa peran dari pada BPPKB Kabupaten Jombang sangat

penting. Dan itu didukung sepenuhnya oleh Provinsi maupun Kabupaten.

Serta adanya dukungan dari sumber daya manusianya. Dimana di bidang

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini memiliki 1 Kepala

Bidang, 2 Kepala Subbidang, 4 orang staf yang memiliki kemampuan serta pengetahuan yang kuat untuk dapat menjalankan tupoksinya. Kemudian didukung pula dengan saran dan prasarana yang lengkap. Dimana Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang, memiliki 2 mobil dinas, masing-masing pegawai diberi motor dinas, dan mendapatkan literatur untuk panduan pelaksanaan materi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Terkait dengan sumber daya manusia yang dimiliki BPPKB Kabupaten Jombang yang memiliki kemampuan untuk dapat memberdayakan perempuan di Jombang. Dengan adanya buku literatur tersebut dijadikan pedoman dalam menjalankan kegiatannya.

Selain faktor pendukung secara internal BPPKB sendiri. Suatu keberhasilan program dan kegiatan yang dilakukan BPPKB Kabupaten Jombang juga terdapat faktor pendukung dari luar BPPKB. Dimana dengan adanya keterlibatan masyarakat khususnya kaum perempuan yang aktif dalam setiap kegiatan pelatihan maupun sosialisasi terkait dengan pembinaan dan keterampilan yang dilakukan oleh BPPKB. Dalam melakukan pembinaan BPPKB tidak sendirian. Pasalnya BPPKB mendatangkan fasilitator dari lembaga yang ahli dibidang tersebut untuk memberikan pengarahan pada masyarakat Jombang. Misalnya untuk memberikan pelatihan dan pembinaan perihal pengolahan pangan dari bahan ikan. BPPKB Kabupaten Jombang mendatangkan fasilitator yang ahli di bidang tersebut yaitu berasal dari dinas peternakan Kabupaten Jombang. Hal itulah yang mendukung terwujudnya pemberdayaan

perempuan. Selain itu pula adanya dukungan dari 51 SKPD Kabupaten Jombang. Pasalnya dalam peraturan tentang pengarusutamaan jender di Kabupaten Jombang juga disebutkan adanya kelompok kerja yang terdiri atas seluruh kepala/pimpinan SKPD. Dengan adanya dukungan semacam itu BPPKB Kabupaten Jombang juga memberikan pengarahan terkait dengan pengarusutamaan jender. Melalui seminar dan *workshop* kelembagaan. Selain itu pula dukungan didapat dengan para akademisi yang ada di Kabupaten Jombang yang turun langsung ke lapangan untuk mengikuti kegiatan dalam rangka memberdayakan perempuan. Serta adanya kerjasama yang dilakukan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang ada di Jombang. Mereka ikut serta untuk dapat mewujudkan keadilan dan kesetaraan jender. Semua kegiatan atau kerjasama yang dilakukan BPPKB Kabupaten Jombang ini terlaksana dengan baik dengan adanya dukungan dana yang besar dan tepat sasaran.

b. Faktor Penghambat

Terlepas dari faktor yang mendukung terselenggaranya kegiatan ataupun program BPPKB Kabupaten Jombang. Terdapat pula faktor yang dapat menghambat terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan jender, yaitu :

1) Internal

Program dan kegiatan pemberdayaan perempuan sangatlah banyak. Maka, diperlukan penambahan tenaga kerja lagi. Dengan jumlah SDM yang tersedia yaitu 7 orang, menjadikan suatu hambatan tersendiri.

2) Eksternal

a) Dari segi pendidikan : tingkat pemahaman masyarakat terkait dengan keadilan dan kesetaraan jender kurang.

b) Dari segi ekonomi : dalam pengembangan ekonomi lokal kurang permodalan untuk mengembangkan kearifan lokal.

c) Dari segi teknologi dan informasi : masih dirasa kurang, tidak adanya pemanfaatan teknologi secara benar. Masyarakat masih sangat tradisional.

d) Dari segi budaya : masyarakat tidak ingin berkembang atau maju, dikarenakan masih

adanya pemikiran yang tradisional. Dalam arti tidak memikirkan kearah depan namun hanya terpacu pada pemikiran sesaat saja.

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang tidak terlepas dengan adanya suatu faktor yang memicu kendala dalam pelaksanaan kegiatan maupun programnya. Hal itu terlihat dengan adanya sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPPKB Kabupaten Jombang yang berkisar 7 orang membuat suatu pelaksanaan kegiatan mengalami kenadala. Hal ini dikarenakan program dan kegiatan yang dilakukan oleh BPPKB ini sangat banyak. Dengan kata lain walaupun sumber daya manusia yang dimiliki itu berkualitas, namun dari segi kuantitasnya yang kurang dimana suatu kegiatan pasti membutuhkan penanggung jawab.

Selain faktor penghambat yang muncul dari dalam diri BPPKB sendiri, terdapat faktor yang menghambat dari luar BPPKB. Hal itu nampak pada masyarakat Jombang. Dimana dari sisi pendidikan atau intelektual masyarakat Jombang kurang memahami keadilan dan kesetaraan jender. Dimana kebanyakan diantara mereka kurang mengerti apa itu jender. di dalam intern BPPKB Kabupaten Jombang dengan adanya dana yang sebesar itu telah dimaksimalkan sedemikian rupa sehingga mampu melaksanakan berbagai kegiatan. Namun pada kenyataannya modal yang diberikan ke desa dalam hal ini terkait dengan kegiatan P3EL, ternyata kurang. Pasalnya masih banyak desa di Jombang

yang semestinya diberikan modal bantuan itu. Sehingga untuk dapat mengembangkan nilai kearifan lokal yang dimiliki desa tersebut kurang mencukupi. Kemudian suatu hambatan yang dialami oleh BPPKB

Kabupaten Jombang adalah dari segi teknologi dan informasi masih dirasa kurang, tidak adanya pemanfaatan teknologi secara benar dan masyarakat masih sangat tradisional. Hal ini dibuktikan dengan para pengurus kegiatan P3EL di Desa GenenganJasem, Kecamatan Kabuh masih menggunakan mesin ketik untuk melaporkan kegiatan yang terjadi disana.

Kemudian jika sewaktu-waktu pelaksana Kabupaten hendak menghubungi ketua pengurus merasa kesulitan. Dimana kadang alat komunikasi (*handpohone*) tidak dibawa, orangnya ke sawah atau kemana. Hal semacam ini membuat Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang mengalami suatu kendala.

Selain hambatan diatas masih ada lagi hambatan dari segi budaya.

Dimana masyarakat tidak ingin berkembang atau maju, dikarenakan masih adanya pemikiran yang tradisional. Dalam arti tidak memikirkan kearah depan namun hanya terpacu pada pemikiran sesaat saja. Hal itu ditunjukkan pada kegiatan P3EL. Masyarakat Desa selalu mendapatkan bimbingan maupun pembinaan terlebih dulu untuk dapat menghasilkan karya yang baik. Kemudian jika karyanya baik maka pemasaran

produknya pun dapat merambah ke supermarket. Namun, pada kenyataannya masyarakat desa tidak melakukan hal tersebut. Mereka melakukan kegiatan mengayam tersebut menjadi bahan setengah jadi atau

dalam bentuk tikar saja, bukannya sampai pada bentuk kreatifitas misalnya tas anyaman. Mereka melakukan hal demikian dikarenakan adanya suatu pemiliran yang sesaat saja. Hari itu mengerjakan, hari itu juga mendapatkan uang. Suatu pemikiran yang tidak mau diajak maju. Pola pemikiran semacam ini membuat BPPKB Kabupaten Jombang mengalami kendala.

Walaupun terdapat banyak hambatan seperti ditunjukkan diatas. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang memiliki satu solusi untuk mengatasi itu. Hal ini dikarenakan BPPKB Kabupaten Jombang menunjukkan kinerja yang professional. Dan agar masyarakat perempuan khususnya dapat diberdayakan. Solusi yang ditawarkan menurut Ibu Supristiar (Kasubbid Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pengarusutamaan Gender), yaitu:

1. Untuk mengatasi kendala internal, dimana dari segi kuantitas SDM yang kurang. Disiasati dengan menunjuk PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana). Hal tersebut dilakukan guna meninjau kegiatan P3EL di lapangan. Dan hal ini berdasarkan atas surat perintah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang No.188.4.45/1581/415.41/2011 tentang penunjukan petugas pelaksana di Kabupaten Jombang.
2. Terkait dengan kendala eksternal dimana kurangnya modal untuk desa yang belum tersentuh P3EL, diupayakan untuk

usulan dana kepada provinsi untuk segera cair. Kemudian dapat diberikan ke desa yang tentunya sesuai dengan kriteria.

3. Kendala pendidikan dan budaya, dilakukan pemahaman dalam bentuk sosialisasi bagi *stakeholder* tingkat Kecamatan, Desa serta kerjasama dengan LSM dan organisasi kemasyarakatan. Dengan berdasarkan pada buku pedoman yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan serta mendatangkan fasilitator dari lembaga lainnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, mengenai pelaksanaan pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di bidang ekonomi pada masyarakat Jombang. Dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Jombang terlaksana dengan baik sehingga mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di bidang ekonomi pada masyarakat Jombang. Dimana perempuan dalam hal ini diberdayakan dengan cara difasilitasi oleh BPPKB Kabupaten Jombang. Hal ini untuk dapat menggali dan mengembangkan potensi perempuan. Agar dapat menjadi perempuan yang berkualitas dan mampu sejajar dengan laki-laki untuk terlibat aktif dalam pembangunan. Dalam menjalankan perannya BPPKB Kabupaten Jombang tidak berdiri sendiri. Terdapat kerjasama yang sangat besar diantara *stakeholder*. Yaitu adanya kerjasama dan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Jombang, Kelompok Kerja (Pokja) yang dibentuk oleh Kabupaten yaitu SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang ada di Jombang, peran serta masyarakat dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). BPPKB Kabupaten Jombang menjalankan misinya ini semua berdasarkan peraturan tertinggi yaitu dari Instruksi Presiden,

Peraturan dari Provinsi Jawa Timur, Peraturan dari Kabupaten, dan adanya peraturan dari Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang. Keberhasilan dari peran BPPKB Kabupaten Jombang terkait dengan pengarusutamaan gender bidang ekonomi dapat dicontoh.

a. Program BPPKB Kabupaten Jombang

Terdapat 1 program pada BPPKB Kabupaten Jombang untuk melaksanakan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, yaitu program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan. Program pada BPPKB Kabupaten Jombang terlaksana dengan adanya dana dari APBD I dan APBD II.

b. Kegiatan BPPKB Kabupaten Jombang

Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan program diatas adalah kegiatan P3EL yang merupakan turunan dari kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha dan kegiatan pemberdayaan perempuan pemberian keterampilan. Dua kegiatan ini berhasil dilaksanakan dengan baik oleh BPPKB Kabupaten Jombang sehingga masyarakat Jombang khususnya kaum perempuan menjadi lebih berdaya, potensinya lebih dapat berkembang. Kegiatan-kegiatan ini tidak terjadi begitu saja. Untuk menentukan lokasi kegiatan, BPPKB Kabupaten Jombang melakukan survei lapangan. Selain itu pula dilakukan sosialisasi serta *workshop* pada 51 SKPD ataupun pada para

masyarakat Jombang yang tergabung dalam forum/komunitas yang ada di Jombang sebelum kegiatan dilaksanakan.

c. Kesesuaian dengan tupoksi

Selain itu pula apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi BPPKB sesuai dengan implementasinya. BPPKB Kabupaten Jombang melaksanakan di setiap tahap penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi berbagai kebijakan, program, dan kegiatan termasuk penganggarannya sesuai dengan fungsi, bidang tugas, dan kewenangan masing-masing. Dengan tidak adanya *overlapping*, hal itu menjadikan segala apa yang dijalankan oleh BPPKB Kabupaten Jombang khususnya subbidang peningkatan kualitas hidup dan pengarusutamaan gender berjalan dengan sebagaimana mestinya.

d. Peranan Masyarakat Jombang

- 1) Keterlibatan masyarakat Jombang, dari segala lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan sosialisasi.
- 2) Keaktifan masyarakat khususnya kaum perempuan dalam menerima bentuk pemberian keterampilan yang diberikan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang.
- 3) Kesiediaan masyarakat Jombang dalam pengadaan program pengembangan ekonomi lokal.

2. Faktor Pendukung dan penghambat pelaksanaan pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan jender bidang ekonomi pada masyarakat Jombang

a. Faktor Pendukung

- 1) Anggaran, didukung penuh oleh APBD (Anggaran Perencanaan Belanja Daerah) II, yaitu dari Kabupaten Jombang, serta bantuan dari APBD Provinsi
- 2) Memiliki Sumber Daya Manusia yang berkualitas
- 3) Adanya kelengkapan sarana dan prasarana bagi pegawai
- 4) Antusiasme masyarakat Jombang khususnya anggota P4A (Pembentukan Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dan kaum perempuan.
- 5) Kerjasama dengan tim fasilitator Pengarusutamaan jender dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) pemerhati perempuan
- 6) Dukungan dari organisasi perempuan dan PSW (Pusat Studi Wanita) di Kabupaten Jombang.

b. Faktor Penghambat

- 1) Kuantitas SDM yang dimiliki kurang memadai
- 2) Tingkat pemahaman masyarakat terkait dengan keadilan dan kesetaraan jender kurang.
- 3) Dalam pengembangan ekonomi lokal kurang permodalan untuk mengembangkan kearifan lokal.

- 4) Tidak adanya pemanfaatan teknologi secara benar. Masyarakat masih sangat tradisional.
- 5) Terdapat budaya patriarki pada masyarakat.

B. Saran

1. Pelaksanaan pemberdayaan perempuan terkait dengan peran BPPKB

Kabupaten Jombang di bidang ekonomi :

- a. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang. Dalam membuat suatu perencanaan pada umumnya hanya menekankan pada perempuan yang dapat menyebabkan bias gender. Maka ke depan agar diperoleh informasi yang seimbang mengenai apa yang dialami dan dirasakan oleh laki-laki baik di tempat kerja, rumah tangga, maupun di masyarakat, untuk itu perlu melibatkan responden laki-laki.
- b. Untuk saat ini pemberdayaan perempuan di Kabupaten Jombang lebih diarahkan pada bidang pekerjaan yang dekat dengan pekerjaan domestik. Jika memang diharapkan perempuan mengerjakan pekerjaan dengan kualifikasi yang tinggi. Diperlukan membuat kegiatan yang mengarahkan perempuan pada saat memasuki jenjang sekolah untuk memilih sekolah-sekolah yang tamatannya memiliki kualifikasi yang tinggi.

- c. Kerjasama BPPKB Kabupaten Jombang dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dibidang ekonomi. Hanya sebatas kerjasama dengan 2 *stakeholder* yaitu antara pemerintah dengan masyarakat. Diperlukan merancang program atau kegiatan untuk melakukan sosialisasi atau advokasi ke perusahaan-perusahaan swasta mengenai keadilan dan kesetaraan gender, sehingga dapat mempertimbangkan kesetaraan gender dalam penunjukan jabatan atau kegiatan promosi karyawan.

2. Faktor penghambat BPPKB Kabupaten Jombang dalam melangsungkan pelaksanaan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi :

- a. Diperlukan usaha lebih terkait pemantapan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai program-program perempuan yang selama ini telah dilaksanakan. Untuk dapat menjadikan pengarusutamaan gender di Kabupaten Jombang berkelanjutan.
- b. Seluruh program dan kegiatan terkait perwujudan keadilan dan kesetaraan gender di Kabupaten Jombang hanya mendapatkan dana dari APBD. Hal ini berarti sensitivitas gender dalam birokrasi publik harus ditingkatkan, antara lain melalui peningkatan alokasi anggaran untuk PUG dari pemerintah melalui APBN, agar terjadi peningkatan kegiatan secara signifikan.

- c. Diperlukan adanya penambahan pegawai di BPPKB Kabupaten Jombang bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hal tersebut dikarenakan kuantitas pegawai sangat kurang, meskipun kualitasnya memadai.

